



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2022 DAN 2021

---

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pemerintah Indonesia telah menggulirkan otonomi daerah dan desentralisasi, peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerapan Otonomi Daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang baru dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Selanjutnya juga dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu digantikan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pasal 184 ayat 1 dan 2 dijelaskan, bahwasannya Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam



4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait dengan sumber-sumber perusahaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan administratif pajak dan pajanan;
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, apakah mengalami masalah atau pemertaan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Selanjutnya Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas akun-akun laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Neraca dan berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan dan non keuangan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Maksud. Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dan cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan aset lain selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk menumbuhkembangkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan kemampuannya terhadap pemertaan pendapatan-cadangan.
2. Tujuan. Menunjang ketertarikan tingkat atas cara pertanggungjawaban keuangan daerah.

### **1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1807);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Layanan Utama;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pegawai Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
25. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

### **1.3. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**  
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan  
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  
Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**  
Ekonomi Makro  
Kebijakan Keuangan  
Revisi Realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan SKPD  
Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan  
Revisi Kinerja Keuangan Berbasis LO
- BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
Evaluasi akuntansi/teknis pelaporan keuangan daerah  
Evaluasi akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah  
Basis pengakuan yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah  
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah
- BAB IV PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN**  
Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran  
Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan SAL  
Penjelasan Akun-akun Nomen  
Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional  
Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas

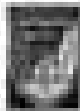


**PEMERINTAH KABUPATEN BAHITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2022)**

---

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas  
Informasi Lainnya Berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Bahito Utara

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**  
**BAB VII PENUTUP**



## BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEHILANGAN KEUANGAN

### 2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gabungan perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat diartikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk memantau dan mengawasi serta kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Asas-aspek makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Ponds) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Survei Uraan yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,61%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,10%
- c. Gini Ratio sebesar 0,32%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,75%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 7114,5%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,17%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDHABH) sebesar Rp74.970,118.

Selengkapnya diketahui bahwa APBD Kabupaten Karo Utara Tahun 2022 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran penertarikan maupun belanja daerah ditambah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, dan akuntabel sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan APBD Tahun 2022 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengabdikan makna bahwa pengabdian kepatutan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sebagai bentuk melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

#### 2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Hal ini mengabdikan makna bahwa APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi tersebut meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis dan objek belanja serta kerangka umum besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap program anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

#### 3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Fasilitas yang disediakan merupakan prioritas yang terbaik secara minimal dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sehingga belanja yang dianggarkan pada tiap program dan kegiatan merupakan biaya tertinggi.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan kepatutan pemerintahan yang cukup dan tidak dibarengkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggaran



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- dalam APBD.
  - a. Semua penanaman dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
4. **Kualitas Anggaran**
- Pajak, retribusi, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar Masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah secara proporsional diberikan beban yang ringan, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk mempertimbangkan hal tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskontinuitas tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan.
5. **Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**
- Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai dalam rangka Pelaksanaan Program atau Kegiatan APBD. Untuk realisasi tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara berikut disampaikan kondisi dan prestasi yang Kabupaten Barito Utara.

**1.2. Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin didefinisikan berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah penghasilan per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata penghasilan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam periode penduduk miskin Barito Utara periode tertentu.

Manusia menentukan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kelangkaan dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemerintahan yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggarisbawahi seberapa jauh level penghasilan penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak penghasilan orang termiskin di suatu wilayah tertentu relatif terhadap penghasilan rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Utara

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan(%)
1.	Kabupaten Barito Utara (%)	5,17	5,81	0,64
2.	Kabupaten Kota Ulu Guguk	2,20	2,48	0,28
3.	Provinsi (%)	5,95	6,18	0,23
4.	Nasional (%)	6,75	12,12	5,37
5.	Pertumbuhan Provinsi Barito Utara TnG Kabupaten Insulin kemuda	Tertinggi 0,5 0 Kabupaten	Barito kemuda	
6.	Pertumbuhan Nasional Kabupaten TnG Indonesia	Insulin kemuda	Tertinggi 0,5 0 Kabupaten	Barito kemuda

Sumber Dokumen: DPO Barito Utara

Persentase penduduk miskin Barito Utara pada Tahun 2021 sebesar 5,17% mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin berhasil ditahan hingga menjadi 5,81% Persentase penduduk miskin 2021 Barito Utara di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kesejahteraan Kabupaten Barito Utara**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Nilai Target (%)
1	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Barito Utara	0,37	0,38	(0,00)
2	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tengah	0,36	0,71	(0,00)
3	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nasional	1,41	1,71	(0,00)
4	Peringkat Provinsi	Belum Terselesa	Belum Terselesa	Belum Terselesa
5	Peringkat Nasional	Belum Terselesa	Belum Terselesa	Belum Terselesa

Sumber Dokumen: BPS Barito Utara

**Tabel 2.3 Tingkat Ketersediaan Kesejahteraan Kabupaten Barito Utara**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Nilai Target (%)
1	Tingkat Ketersediaan Kesejahteraan Barito Utara	0,10	0,10	(0,00)
2	Tingkat Ketersediaan Kesejahteraan Kabupaten Tengah	0,00	0,10	(0,00)
3	Tingkat Ketersediaan Kesejahteraan Nasional	0,30	0,40	(0,00)
4	Peringkat Provinsi Barito Utara (Tid. Tertinggi)	Belum Terselesa	Tertinggi ke-5 di Kalteng	Belum Terselesa
5	Peringkat Nasional Tertinggi (Tid. Indonesia)	Belum Terselesa	Tertinggi ke-4 di Indonesia	Belum Terselesa

Sumber Dokumen: BPS Barito Utara

### 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Barito Utara Tahun 2021 adalah sebesar 5,14 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Utara**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Nilai Target (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Barito Utara (%)	5,09	5,14	(0,10)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia (%)	4,30	4,30	(0,00)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	1,27	0,68	(0,00)
4	Peringkat Provinsi (Sangat Tertinggi Kalteng)	Belum Terselesa	Belum Terselesa	Tertinggi ke-3 dari 14 provinsi di Kalteng
5	Peringkat Nasional (Kalteng Tid. Indonesia)	Belum Terselesa	Belum Terselesa	Tertinggi ke-10 dari 24 provinsi di Indonesia

Sumber Dokumen: BPS Barito Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Barito Utara Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,14%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 5,29% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Namun, dengan demikian TPT Barito Utara masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi 4,33%, dan sebesar 4,58% pada Tahun 2021.

### 2.4 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini diukur pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengukurannya kuantitatif yang menggambarkan distribusi dari suatu nilai pendapatan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

kontaminasi dengan distribusi uniform (sempurna) yang mewakili persentase kandidat pendahuk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan semua pemerata/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak sama mutlak/sempang, dimana bagian pendapatan hanya dimiliki satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Barito Utara Realisasi pencapaian Gini Ratio Barito Utara Tahun 2021 belum tersedia bersama data Sumber RPS Barito Utara dalam Angka Tahun 2021.

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Barito Utara yang diukur oleh Gini Ratio belum tersedia dari RPS, jika dibandingkan dengan Gini Ratio.

**2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diartikan oleh 1 dimensi dasar yaitu harapan hidup, umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (<60)
- Sedang (60 ≤ IPM <70)
- Tinggi (70 ≤ IPM <80)
- Sangat Tinggi (>80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Barito Utara Realisasi pencapaian IPM Barito Utara Tahun 2021 adalah sebesar 70,79 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Maknanya (%)
1	Kabupaten Barito Utara	70,79	70,79	0,00
2	Provinsi Kalimantan Tengah	71,86	71,26	-0,83
3	Indonesia Nasional	70,84	72,26	2,04
4	Peringkat Provinsi	Belum tersedia	Tertinggi ke-4 Kalimera	
5	Peringkat Nasional		Tertinggi ke-20 di Indonesia	

Sumber: Dokumen RPS Barito Utara

Realisasi pencapaian IPM Barito Utara adalah sebesar 70,79 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 70,79 poin mengalami kenaikan sebesar 0,0%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHL), usia dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RALS), usia dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,00 tahun pada Tahun 2022, lebih cepat 71,27 tahun 2021 dibandingkan dengan rerata yang lahir pada tahun sebelumnya. Kesehatan, rata-rata lama sekolah selama 8,59 tahun 2022 dengan harapan lama sekolah 11,60 tahun 2021. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun





sebesar Rp9.220,7 atau meningkat Rp9.800,7 dibandingkan tahun sebelumnya.

DPM di Barito Utara pada saat ini berada pada urutan 4 dari 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan berada pada urutan 21 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

#### 1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengprediksi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan biaya jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan PDRB atau dasar harga konstan 2010.

Tabel 1.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Utara

No	Uraian	Kabupaten (Rp)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	PDRB Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)	8.085.410,8	7.151.771,7	7.587.871,7
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,76	1,60	6,24

Sumber Dokumen: DPS Barito Utara

Nilai PDRB Barito Utara atau dasar harga konstan 2010 di tahun 2022 mencapai 7,60 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 7,15 triliun rupiah di tahun 2021. Hal ini menunjukkan di tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,24 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang mencapai 3,82 persen.

#### 1.5. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Barito Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendukung bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*Crawling Inflation*) inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun, (ii) inflasi sedang (*Galloping Inflation*) inflasi ini relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajuinya berkisar antara 10-100% setahun, (iii) inflasi berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Melampaui kisaran nilai dari 10-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit diendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) jenis inflasi ini sangat disebabkan pengaruhnya karena terjadi secara massal-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Barito Utara Tingkat Inflasi belum ada data dan dilakukan perhitungan data inflasi yang tersedia hanya pada Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Madya Palangkaraya.

#### 1.6. Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Utara

Struktur perekonomian Barito Utara dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

**Tabel 2.17 PDRB**  
 dan 2020 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No	Uraian	Nilai (dalam jutaan rupiah)		
		Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Pendapatan Kabupaten dan pemerintah	1.002,3	1.112,3	1.224,3
2	Pendapatan dan Pengeluaran	-442,2	1.254,1	1.114,1
3	Saldo Penghasilan	560,1	858,2	1.110,2
4	Pengeluaran, Lebih dan Lebih	4,3	5,3	4,3
5	Pengeluaran, K/L, Pengeluaran Berwujud, Utang dan Utang Utang	14,3	17,3	14,3
6	Perubahan Nilai	272,2	228,1	228,1
7	Perubahan Nilai dan Utang, Perwujudan Modal dan Investasi	850,3	711,2	710,3
8	Perubahan dan Pengeluaran	850,3	711,2	710,3
9	Pengeluaran, Perwujudan dan Modal Tetap	100,3	100,3	100,3
10	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
11	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
12	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
13	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
14	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
15	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
16	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
17	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
18	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
19	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
20	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
21	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3
22	Perubahan dan Perwujudan	100,3	100,3	100,3

Sumber: Dokumen DPO Barito Utara

**Tabel 2.18 Indeks Pertumbuhan Manufaktur (IPM) Kabupaten Barito Utara, 2019-2022**

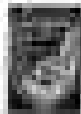
Tahun	UMH MABASAP RIBOL	INDUKSI LAMA RIBOLAN	INDUKSI LAMA RIBOLAN	PERUBAHAN INDUKSI LAMA RIBOLAN	IPM
2019	100	100	100	100	100
2020	100	100	100	100	100
2021	100	100	100	100	100
2022	100	100	100	100	100

Sumber: Data Unsur dasar Angas 2021

**2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Ekonomi Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2022 tumbuh sebesar -2,24%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi Pemertanian pertumbuhan ekonomi sebesar -2,88 %. Terjadinya Pemertanian yang tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara dibandingkan tahun 2020 PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 9.391,7 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2021 sebesar 9.391,1 milyar rupiah. Tahun 2021 sektor pengadaaan Pertambangan dan Punggalan memberi sumbangan yang terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 14,88% kemudian disusul sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,31 % bersa sektor sektor lainnya.

Produk Domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diimpor dari luar daerah/region.



## PEMERINTAH KABUPATEN HARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNITAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/wilayah. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto atau dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditimbulkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah melalui nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara.PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari sembilan lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha.PDRB menurut lapangan usaha diteliti menurut **SISTEM NERACA REGIONAL TECHNICAL NOTES** total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perantara; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

PDRB menurut pengelompokan mengalami perubahan klasifikasi dimana pengelompokan ekonomis Lembaga Non-Profit yang Melayani Masyarakat (LNPM) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengelompokan konsumsi rumah tangga menjadi kelompok terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengelompokan diteliti menjadi 7 komponen yaitu kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi LNPM, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor.

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 9.806,7 miliar rupiah dibandingkan tahun 2020 yang besarnya mencapai 9.220,7 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2018 pada tahun 2021 sebesar 7,114,3 miliar rupiah.

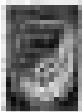
Tahun 2020, sektor yang merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 14,80%, kemudian disusul sektor pengalangan Listrik dan Gas sebesar 14,7%, baru sektor-sektor lainnya.

### 1.18. Ketajaman Keuangan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengalihan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan persetujuan daerah yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### A. Pendapatan

Utama daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terikat dan tidak menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif



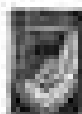
Salah merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, salah satu upaya pengalihan pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelengkapan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; juga meningkatkan kemajuan daerah serta, bahkan sebaliknya diharap mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengalihan sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berdampak menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan PAD terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat. Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - a. Hasil Pajak Daerah;
  - b. Hasil Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer.
  - a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
  - b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya: Dana Otonomi Khusus, Dana Penunjang; dan
  - c. Transfer Pemerintah Provinsi: Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah: Pendapatan Hibah, Pendapatan Donasi Daerah, Pendapatan Lainnya.

Memperhatikan hal tersebut di atas, kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Karo Utara tahun 2021 adalah:

1. Peningkatan pendapatan daerah dari komponen-komponen penerimaan PAD yang masih memiliki peluang dan potensi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi baik pajak dan retribusi daerah, dengan tetap berpegang pada prinsip yang berkeadilan dan tidak menyumbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pemertaan konvensional atau diperbaharui keuangannya pada sumber pendapatan alternatif, berupa peningkatan perantara modal daerah (investasi daerah), pendirian/penyehatan perusahaan daerah (BUMD), kerjasama dengan swasta atau pinjaman daerah.
  - a. Peningkatan efisiensi, pemertaan skala prioritas dan kebijakan umum alokasi belanja yang tepat. Kebijakan belanja yang sesuai, ke tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat (*the right place on the right time*).
  - b. Mendirikan pemangung dan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak dan retribusi.
  - c. Mengembangkan prosedur pengalihan dan upaya memperbaiki (memperbaharui) anggaran belanja menjadi instrumen pengontrol



pendapatan oleh SKPD yang mempunyai jumlah pendapatan dengan tetap meniadakan hasil-hasil pelayanan;

- d. Meningkatkan koordinasi antar SKPD/instansi yang menaungi pemerintahan pendajaran daerah, serta koordinasi dengan para peguache, pemerintah provinsi dan pusat;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan pada umumnya, khususnya aparatur pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah; dan
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

### 2.11. Belanja

Dalam melaksanakan penyusunan anggaran belanja diklasifikasikan menurut Manfaat Ekonomi (jenis belanja). Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja pada Kabupaten Darul Uluh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

1. Belanja Operasi, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Sewa, Hibah, Bantuan Sosial,
2. Belanja Modal, Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Diponegoro dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya,
3. Belanja Lain-lain/Tak Terduga, dan
4. Transfer/Bagi Hasil ke Desa.

Arah kebijakan anggaran belanja Kabupaten Darul Uluh tahun 2012 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran belanja dengan penyusunan rencana anggaran belanja berdasarkan pendapatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang disediakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran;
2. Meningkatkan alokasi anggaran belanja untuk program/kegiatan yang memiliki kebutuhan masyarakat luas, menunjang nilai-nilai produktif dan mempunyai multiplier effect luas serta berjangka panjang dan diarahkan untuk belanja yang bersifat kumulatif;
3. Penguasaan baru gedung/kantor/ruang jabatan dan pengadaan kendaraan berjenis, baik roda dua maupun roda empat hanya dapat dipertimbangkan untuk yang sangat prioritas, esensial dan berkelanjutan;
4. Belanja langsung yang baik, rasional, dan dampaknya untuk publik diberikan prioritas penyalangan tahun 2012 dengan tidak mengabaikan penyalangan belanja yang tidak termasuk prioritas;
5. Belanja bantuan, khususnya bantuan sosial dialokasikan sesuai kemampuannya dengan prinsip terbatas, tidak mengikat, tidak serta merta dan berkelanjutan. Bantuan dialokasikan bahwa bantuan tersebut berfungsi sebagai stimulasi/pengembang, khususnya tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan;
6. Tidak mungkin disediakan bahwa Pemerintah Daerah tidak terikat harus membantu atau Pemerintah Daerah mempunyai keluwesan untuk dapat membantu atau bantuan untuk keuangan daerah. Belangan bantuan tidak bisa diberikan secara serta merta yang dapat menyebabkan ketergantungan dan melambaga. Jika bantuan baru dapat



memberikan kondisi atau nilai hanya untuk kelompok/polongan tertentu;

7. Dalam bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten lainnya dapat dilakukan sesuai keperluan dalam rangka pembiayaan strategis dalam bentuk pembiayaan bersama/charing);
8. Tidak dipertukarkannya pelaksanaan belanja yang dipertukarkan resultansi instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah; dan
9. Meningkatkan penguasaan atas belanja, pertanggung jawaban dan pertanggung jawaban pertanggungjawaban barang/sat daerah.

### **2.12. Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik pemerintah sebagai pengalihan, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah tersebut dimasukkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengalihan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pencairan pinjaman kepada entitas lain, dan penyerahan modal oleh pemerintah. Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 adalah:

1. Prinsip anggaran defisit dilaksanakan dalam rangka penganggaran belanja publik yang sangat prioritas, dan akan dihindari penganggaran defisit yang didorong karena meningkatnya belanja operasi;
2. Tidak lebih tabung anggaran yang lain akan digunakan untuk menutup defisit anggaran, dan sebagian dibebankan pada dan lebih tabung anggaran berhemat, pembayaran pokok utang, penyerahan modal dan sebagainya; dan
3. Menghindari pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dalam rangka pinjaman sat daerah.



**BAB III**  
**EKSTRAK PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ekstrak Pencapaian Kinerja Keuangan**

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bario Utara yang akan dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang difinansikan secara fungsional. Khususnya ini bertujuan untuk mencapai adanya kelestarian dan ketayuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fungsi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari pelayanan umum, kesehatan dan keamatan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, ketertanian, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan terdapat dalam fungsi pelayanan umum. Arah kebijakan dalam fungsi pelayanan umum yang terkait dengan kinerja keuangan adalah:

1. Peningkatan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua kegiatan pada semua urusan dan lini pemerintahan; dan
2. Peningkatan pendapatan daerah, kebijakan alokasi anggaran yang tepat, efisien, dan efektifitas dengan semakin meningkatkan alokasi untuk belanja publik.

Capaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bario Utara tahun 2022 secara umum terdapat atas capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bario Utara telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bario Utara dengan rincian sebagai berikut.

**PROGRAM KEGIATAN UNTUK Mendukung CAPAIAN KINERJA KEUANGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BARIO UTARA TA 2022**

NO	URAIAN	JML. PISDG	ANGDARAN	REALISASI	%	SISA ANGDARAN
1	Peningkatan, Pengembangan, dan Sustainabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	40	2.010.717.000,00	1.804.247.121,00	90,00	206.469.879,00
2	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	26	10.008.470.100,00	14.740.034.000,00	147,40	1.027.000.000,00
3	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	00	0,127.074.075,00	2.040.013.285,00	160,20	199.889.711,00
4	Administrasi Umum Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah	44	20.042.781.000,00	20.000.000.000,00	99,80	42.781.000,00
5	Daerah Pemeringkat Umum Pemerintah Daerah	29	31.017.330.000,00	24.404.287.184,00	78,70	6.613.042.816,00
6	Pelayanan Jasa Pemungut Layanan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	40	44.071.000.000,00	41.000.734.410,00	93,00	3.070.265.590,00
7	Daerah Pemeringkat Umum Pemerintahan Daerah	41	87.016.490.910,00	10.770.200.000,00	12,30	76.246.290.910,00
8	Pengelolaan Perikanan Daerah Daerah	2	20.000.700.000,00	0,00	0,00	20.000.700,00
9	Pengelolaan Perikanan Daerah, Monev, Peltan, Peltan	2	20.004.704.100,00	0,00	0,00	20.004.704,100,00
10	Pengelolaan Perikanan Airan (PAC)	1	0,000.000,00	1.170.440.000,00	117,00	1.170.440,000,00
11	Pengelolaan Perikanan Budidaya/Budidaya	1	0,000.000,00	0,00	0,00	0,000.000,00
12	Pengelolaan Perikanan (P)	1	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	JML. PROJEK	ANALISISAN	REALISASI	%	REKA ANGGARAN
	Konflik Perolehan dan Tenaga Keperawatan bagi Satuan Pelayanan Dasar, PMAS, dan Pelayanan Kecamatan/Kabupaten					
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8	101.274.200,00	117.408.200,00	115,95	4.080.070,00
14	Administrasi Pengelolaan Daerah Kecamatan Perangkat Daerah	2	95.875.000,00	98.094.200,00	102,30	2.480.700,00
15	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan untuk Tertentu Melaya Kecamatan/Kabupaten	1	400.400.700,00	400.001.071,00	100,15	39.000.070,00
16	Pendanaan dan Pembiayaan Kecamatan di Melaya Kecamatan/Kabupaten	1	20.000.000,00	22.070.000,00	110,35	2.070.000,00
17	Pemenuhan Kebutuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UMK dan UMK di Melaya Kecamatan/Kabupaten	5	12.400.700.000,00	8.000.070.000,00	64,51	4.400.630.000,00
18	Pengembangan Model dan Pengujian Aplikasi Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kecamatan/Kabupaten	1	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00
19	Pendanaan dan Pembiayaan Kecamatan di Melaya Kecamatan/Kabupaten	1	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	10.000.000,00
20	Pemenuhan Kebutuhan dan Pengembangan Model dan Pengujian Aplikasi Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UMK, UMK Kecamatan/Kabupaten dan Daerah di Melaya (DAM)	1	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00
21	Pemenuhan dan Pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan dan Sistem Manajemen, Jaringan Kecamatan/Kabupaten	1	20.000.000,00	17.000.000,00	85,00	3.000.000,00
22	Pemenuhan dan Pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan dan Sistem Manajemen, Jaringan Kecamatan/Kabupaten	1	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00
23	Pemenuhan dan Pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan dan Sistem Manajemen, Jaringan Kecamatan/Kabupaten	1	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00
24	Pemenuhan dan Pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan dan Sistem Manajemen, Jaringan Kecamatan/Kabupaten	1	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00
25	Pemenuhan dan Pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan dan Sistem Manajemen, Jaringan Kecamatan/Kabupaten	1	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00
26	Pemenuhan dan Pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan dan Sistem Manajemen, Jaringan Kecamatan/Kabupaten	1	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00	10.000.000,00
27	Kebutuhan, Pemenuhan, Kecamatan, Pengembangan Sistem	0	117.420.000,00	117.420.000,00	100	10.000,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

NO	URAIAN	JML. PROG	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	untuk Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah KabupatenKota					
28	Pembinaan Sosial dalam rangka Pemulih Prewalif Tingkat Daerah KabupatenKota	1	1.778.878.503,00	1.361.241.528,00	76,53	427.207.000,00
29	Pengembangan dan Peningkatan Gaya Masyarakat Kemudaan Gaya Masyarakat "MADRIS" Tingkat Daerah KabupatenKota	1	10.000.000,00	7.328.000,00	73,28	2.672.000,00
30	Peningkatan Pemasaran B.L.O	1	84.777.888.200,00	63.000.791,00	74,33	21.777.097.409,00
31	Pembinaan Laporan Keuangan untuk UPM dan LPT Tingkat Tingkat Daerah KabupatenKota	30	38.412.000.000,00	33.204.264.711	86,47	5.207.735.289,00
32	Pengadaan SOP dan Rancangan Pengaturan Postal pada Wilayah Tingkat (WU) kelas 1 dan/atau Daerah KabupatenKota	18	14.887.888.000,00	878.833.008,00	5,89	14.009.054.992,00
33	Pengembangan dan Peningkatan Dalam Regeri Primer dan Sekunder pada Daerah Inggil yang Lelanya Mawak 100 Ha atau 1 atau Daerah KabupatenKota	1	8.308.888.000,00	813.806.871,00	9,78	7.495.081.129,00
34	Pengembangan dan Peningkatan All Mount (AM) di Daerah KabupatenKota	1	8.841.218.000,00	221.328.903,00	2,50	8.619.889.097,00
35	Pengembangan dan Peningkatan Peningkatan di Daerah KabupatenKota	1	8.242.002.875,00	8.264.329.200,00	100,03	22.326.325,00
36	Pengembangan dan Peningkatan All Lintan Corong atau Daerah KabupatenKota	1	4.877.188.875,00	3.888.208.888,00	79,76	988.979.987,00
37	Peningkatan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategic Daerah KabupatenKota	1	18.788.788.000,00	828.833.875,00	4,41	17.959.954.125,00
38	Peningkatan Rancangan Corong di Wilayah Daerah KabupatenKota, Peningkatan dan Mewakili Rancangan (M) dan Fasilitas Luk Peralat Rancangan Corong	1	871.334.000,00	870.250.075,00	99,89	1.083.925,00
39	Peningkatan dan Peningkatan KabupatenKota	1	87.808.878.000,00	8.881.878.000,00	10,11	78.927.000.000,00
40	Peningkatan dan Peningkatan Arisan Jaya Kemudaan Gunung Daerah KabupatenKota	1	40.888.875,00	41.875.000,00	102,20	1.027.875,00
41	Koridor dan Koridor Peningkatan Tali Ruang Daerah KabupatenKota	1	401.888.800,00	401.547.740,00	99,93	489.060,00
42	Koridor dan Koridor Peningkatan Ruang Daerah KabupatenKota	1	808.888.800,00	808.712.880,00	99,99	175.920,00
43	Pembinaan Peningkatan dan Peningkatan Peralat Rancangan Kemudaan atau Peralat Tingkat KabupatenKota	1	88.208.800,00	88.208.384,00	99,99	11.000.000,00
44	Peningkatan dan Peningkatan Fasilitas Kemudaan KabupatenKota	1	28.888.800,00	18.881.800,00	65,38	11.147.700,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BUKIT UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	JML. PROG	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	<b>Luas di bawah 12 (sepuluh)</b>					
45	Peringatan Tahunan Kemerdekaan Republik dengan Luas di Bawah 12 (sepuluh) Ha	1	254.875.185,00	8.942.700,00	3,54	245.932.485,00
46	Utama Pengembangan POU Perumahan	4	200.000.120,00	14.278.000,00	7,14	185.722.120,00
47	Peringatan Tanggal Kemerdekaan dan Kemerdekaan Utama Hari 1 (satu) Daerah Kabupaten Pula	1	64.880.000,00	64.880.000,00	100,00	0,00
48	Peringatan Peringatan Daerah Kabupaten Kota dan Peringatan Kabupaten Kota	1	64.880.000,00	64.880.000,00	100,00	0,00
49	Peringatan Peringatan dan Evaluasi Kerja Daerah	1	8.004.004.000,00	8.768.000.104,00	109,55	0,00
50	Peringatan Peringatan, Peringatan, Peringatan, Peringatan, dan Peringatan Hari Berdirinya dan Peringatan Kabupaten Kota (satu) Kabupaten Pula	1	78.440.000,00	78.380.000,00	99,92	60.000,00
51	Peringatan Tahunan Kemerdekaan Kabupaten Pula	2	1.948.480.000,00	880.717.400,00	45,25	1.067.762.600,00
52	Peringatan Peringatan dan Kemerdekaan daerah	1	2.282.878.000,00	1.007.004.804,00	44,14	1.275.873.196,00
53	Peringatan Hari Daerah Pengembangan Daerah	1	81.778.000,00	81.440.000,00	99,59	338.000,00
54	Peringatan Kemerdekaan dan Hari dan Hari Kemerdekaan serta Peringatan Peringatan 12.3 (dua) Kabupaten Pula Kabupaten Kota	1	88.171.700,00	88.877.800,00	100,80	0,00
55	Peringatan Hari Kemerdekaan Daerah (KMD) Lintas Daerah Kota (KMD) dan KMD di Luar Kota Kota	1	171.804.800,00	88.738.800,00	51,65	83.066.000,00
56	Peringatan Hari Puluhan Tahun Kabupaten Pula	1	78.880.000,00	78.850.000,00	99,96	30.000,00
57	Peringatan Kemerdekaan dan Peringatan Hari Kemerdekaan Kabupaten Pula	1	78.880.000,00	88.400.000,00	112,07	0,00
58	Peringatan Hari Peringatan dan Peringatan Hari Peringatan	1	1.882.840.000,00	1.000.887.044,00	53,17	881.952.956,00
59	Peringatan Hari Peringatan Hari Peringatan	1	280.150.000,00	282.880.000,00	101,00	0,00
60	Peringatan Hari Peringatan Hari Peringatan	1	81.720.000,00	81.274.000,00	99,33	446.000,00
61	Peringatan Peringatan Peringatan dan Peringatan Hari Peringatan yang terjadi Peringatan Hari 1 (satu) Daerah Kabupaten Pula	2	24.540.000,00	24.887.000,00	101,41	0,00
62	Peringatan dan Peringatan Peringatan Peringatan, MIPA Kota dan Peringatan Peringatan di Daerah Kabupaten Pula	1	12.810.000,00	12.400.000,00	97,00	410.000,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	JML. PRISN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
75	Perencanaan Pengadaan Peralatan Pengerak Berat Daerah Kabupaten/Pka	1	1.800.000,00	1.076.000,00	59,83	723.999,99
80	Perencanaan Kegiatan Terpadu (Kegiatan dalam Daerah Kabupaten/Pka)	1	27.212.000,00	1.487.100,00	5,47	25.724.899,99
81	Perencanaan Masalah Tuntutan Keuangan dan Bantuan Terpadu (Kegiatan dan Bantuan Terpadu) Kabupaten/Pka	1	2.478.148.104,00	222.282.226,00	9,01	2.255.865.878,00
82	Perencanaan Terpadu (Kegiatan dan Bantuan Terpadu) Kabupaten/Pka	1	27.738.400,00	16.267.200,00	58,68	11.471.200,00
83	Perencanaan Kemitraan/Manajemen (Mitra Kabupaten/Pka)	2	11.278.048.210,00	8.222.248.404,00	72,91	3.055.799.806,00
84	Perencanaan Informasi dan Komunikasi Publik (Kegiatan Terpadu Kabupaten/Pka)	1	1.563.434.000,00	1.876.488.207,00	120,15	13.145.792,00
85	Perencanaan Inisiatif/Program (Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Pka)	1	521.288.108,00	814.373.204,00	156,24	1.482.940,00
86	Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan (Kegiatan Lingkungan Hidup Kabupaten/Pka)	1	1.738.021.250,00	1.608.288.975,00	92,52	129.732.275,00
87	Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan (Kegiatan Lingkungan Hidup Kabupaten/Pka)	1	303.501.000,00	278.282.000,00	91,72	25.219.000,00
88	Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan (Kegiatan Lingkungan Hidup Kabupaten/Pka)	1	1.021.401.000,00	698.284.281,00	68,37	323.116.719,00
89	Perencanaan Lainnya (Lain)	1	15.000.000,00	14.440.000,00	96,27	560.000,00
90	Perencanaan Lainnya (Lain) (Kategori 1 atau Daerah)	1	348.200.000,00	200.004.221,00	57,44	148.195.779,00
91	Perencanaan dan Pelaksanaan (Kegiatan dan Bantuan Terpadu) Kabupaten/Pka	1	648.200.000,00	328.173.211,00	50,63	320.026.789,00
92	Perencanaan (Kegiatan dan Bantuan Terpadu) Kabupaten/Pka	1	68.288.000,00	68.198.800,00	100,00	89.200,00
93	Perencanaan Pelaksanaan (Kegiatan dan Bantuan Terpadu) Kabupaten/Pka	1	2.288.287.000,00	1.222.242.287,00	53,44	1.066.044.713,00
94	Perencanaan Pelaksanaan (Kegiatan dan Bantuan Terpadu) Kabupaten/Pka	1	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00
95	Perencanaan Pelaksanaan (Kegiatan dan Bantuan Terpadu) Kabupaten/Pka	1	15.000.000,00	8.750.000,00	58,33	6.250.000,00
96	Perencanaan Pelaksanaan (Kegiatan dan Bantuan Terpadu) Kabupaten/Pka	1	87.288.000,00	48.108.800,00	55,11	39.179.200,00
97	Perencanaan Lainnya (Lain)	1	1.282.278.000,00	1.224.728.288,00	95,51	57.549.712,00
98	Perencanaan Pelaksanaan (Kegiatan dan Bantuan Terpadu) Kabupaten/Pka	1	322.400.000,00	317.278.000,00	98,44	5.122.000,00
99	Perencanaan Pelaksanaan (Kegiatan dan Bantuan Terpadu) Kabupaten/Pka	1	115.000.000,00	110.287.000,00	95,89	4.713.000,00







**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	JML. PROJEK	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Kelengkapan					
100	Pengadaan Robotik yang Mampu dan Praktis dalam Daerah Kabupaten Kita	1	101.710.000,00	101.710.000,00	99,49	999.000,00
101	Pengadaan Kesenian Tradisional yang Mempertahankan Budaya Daerah Kabupaten Kita	1	794.000.000,00	690.240.400,00	79,37	103.759.600,00
102	Pengadaan Kesenian yang Mempertahankan Budaya dalam Daerah Kabupaten Kita	1	91.200.200,00	80.200.000,00	86,95	110.200,00
103	Pengadaan Populerisasi Tingkat Daerah Kabupaten Kita	1	60.000.000,00	70.070.000,00	116,77	999.000,00
104	Pembudayaan Daerah Melalui Tingkat Daerah Kabupaten Kita	1	10.000.000,00	10.100.000,00	99,94	100.000,00
105	Facilitas, Konektivitas dan Rumbun Perumahan dan Penguatan Perumahan Desa Fasilitas, Konektivitas dan Konektivitas Perumahan dan Penguatan Perumahan Desa	6	1.048.700.000,00	1.047.700.000,00	99,92	999.000,00
106	Pengadaan Alat Bantu Daerah Kabupaten Kita	1	11.000.000,00	11.007.000,00	100	999.000,00
107	Pengadaan Sinyal Jaringan Jaringan Komunikasi Regional Tingkat Kabupaten Kita	1	10.000.000,00	10.007.000,00	99,97	999.000,00
108	Pengadaan Alat Peragaan Daerah Kabupaten Kita yang Dapat Digunakan dan Penguatan Daerah Perumahan dan Desa Kabupaten	1	10.000.000,00	10.000.000,00	99,99	100.000,00
109	Pengadaan Penguatan Desa Lumbung dan Jasa Multi-ventur dalam Daerah Kabupaten Kita	1	80.000.000,00	69.000.000,00	86,25	11.000.000,00
140	Pengadaan Peningkatan dan di Wilayah Kerja, Desa, Wakil, Renc, dan Gerakan An Lahir yang dapat diwujudkan dalam 1 tahun dalam Kabupaten Kita	1	60.000.000,00	60.000.700,00	99,99	299.300,00
141	Pembudayaan Budaya Lokal dalam Daerah Kabupaten Kita	1	10.000.000,00	10.007.000,00	99,97	999.000,00
142	Pembudayaan Fasilitas Desa dan Kota	1	200.000.000,00	200.000.000,00	99,99	999.000,00
143	Pengadaan Peningkatan dan	1	100.000.000,00	104.007.000,00	104,00	999.000,00
144	Pengadaan Sumber Daya Manusia di Wilayah Kerja, Desa, Wakil, Renc, dan Gerakan An Lahir yang dapat diwujudkan dalam Kabupaten Kita	1	0,000,000,00	0,000,000,00	0,00	0,00
145	Pengadaan Tindakan Lintas Penguatan dan Penguatan bagi Usaha Kecil Mikro dan Kecil	1	0,000,000,00	4.100.070,00	99,99	999.130,00
146	Pengadaan Mula dan Konektivitas, Konektivitas dan Penguatan bagi Usaha Penguatan dan Penguatan bagi Usaha Mikro dan Kecil	1	0,000,000,00	4.070.070,00	99,99	999.130,00
147	Pengadaan dan Penguatan Sumber Daya Manusia	1	0,000,000,00	4.000.700,00	99,99	999.300,00







**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

NO	URAIAN	JML. PROJEK	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
	Bidang Kebutuhan Pokok dan Masyarakat Penting di Tingkat Desa, Kelurahan/RT/ RW					
106	Pembangunan Monevring Jalan Desa, Desa Tera, Desa Wang, dan Pegunungan	6	132.354.750.00	132.354.870.00	99,32	1.019.000.00
107	Pembangunan dan Pemeliharaan Kawasan Perirampasan Jalan di Kelurahan/RT/ RW	6	72.000.000.00	71.908.000.00	99,87	92.000.000
108	Pembangunan Jalan untuk Kawasan Perirampasan	6	27.478.880.00	27.468.000.00	99,98	10.880.000
109	Pembangunan jalan Desa/RT dan 1 Desa/ Kelurahan/RT/ RW	1	28.875.000.00	28.809.000.00	99,78	66.000.000
110	Pembangunan Jembatan	6	300.388.500.00	300.384.800.00	99,99	3.700.000
111	Pembangunan Terminal dan Kawasan Perirampasan	6	1.638.387.000.00	1.634.807.048.00	99,79	355.950.000
112	Kawasan Perirampasan Jembatan Desa/RT/ RW	1	600.442.000.00	600.279.750.00	99,98	162.250.000
113	Kawasan Perirampasan Terminal/RT/ RW	1	975.109.070.00	991.114.000.00	99,59	83.995.070.00
114	Insentif Perawatan Perumahan Kebahasaan	1	279.004.000.00	279.000.400.00		3.603.600.00
115	Pembangunan Fasilitas Kawasan Perirampasan Perumahan	1	1.880.400.000.00	1.790.070.000.00	95,19	90.330.000.00
116	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	1	384.000.000.00	384.707.000.00	99,92	293.000.000.00
117	Pembangunan Kebutuhan Dasar Kawasan Perumahan	1	75.000.000.00	75.000.000.00	99,99	2.000.000.00
118	Pembangunan Perumahan Perumahan	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
119	Pembangunan Perumahan Perumahan	1	600.000.000.00	610.101.000.00	71,84	240.499.000.00
120	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	400.000.000.00	66,67	200.000.000.00
121	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	100.000.000.00	16,67	500.000.000.00
122	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
123	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
124	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
125	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
126	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
127	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
128	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
129	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
130	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
131	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
132	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
133	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
134	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
135	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
136	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
137	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00
138	Pembangunan Perumahan Desa, Desa, Desa	1	600.000.000.00	600.000.000.00	99,99	0.000.000.00



**PEMERINTAH KABUPATEN BAWO UTARA**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

NO	URAIAN	JML. PROJEK	ANGLIKSIAN	REALISASI	%	SISA ANGLIKSIAN
	Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Daerah					
198	Pengembangan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten Daerah	1	228.584.000,00	228.484.000,00	99,10	100.000,00
199	Pengembangan Ruang Muka Daerah	1	827.100.000,00	848.490.270,00	102,58	271.390.270,00
200	Pengembangan Kelembagaan Daerah	1	221.800.000,00	203.120.000,00	91,57	18.680.000,00
201	Pengembangan Perencanaan dan Informasi Kelembagaan ASN	1	428.204.400,00	408.981.448,00	95,51	19.222.952,00
202	Mutasi dan Promosi ASN	1	245.877.000,00	223.877.750,00	91,03	22.000.250,00
203	Pengembangan Kelembagaan ASN	1	1.200.887.000,00	1.148.888.217,00	95,68	150.918.783,00
204	Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	240.100.000,00	240.008.878,00	100,00	91.191.122,00
205	Pemeriksaan dan Pengembangan Bidang Hukum dan Kesejahteraan	1	84.000.000,00	80.222.870,00	95,51	3.777.130,00
206	Pemeriksaan dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan	1	81.180.000,00	88.278.822,00	108,87	7.098.822,00
207	Pemeriksaan dan Pengembangan Bidang Sosial					
208	Kontribusi Tenaga dan Peningkatan Mutu Produk Usaha Produk Makanan Melalui Perantara yang dapat Dimanfaatkan untuk Usaha Peningkatan		10.000.000,00	8.118.000,00	81,18	1.882.000,00
209	Pengembangan Produk dan Pelayanan	1	40.840.000,00	40.088.888,00	98,18	7.751.112,00
210	Pemeriksaan Perantara Daerah dan Peningkatan DPKD	1	410.878.000,00	410.878.000,00	100,00	17.088.000,00
211	Pemeriksaan Pelayanan Aparatur	1	80.000.000,00	78.102.000,00	97,63	1.898.000,00
212	Pengembangan Perencanaan	1	10.004.000,00	10.248.440,00	102,44	2.244.440,00
213	Pengembangan Kelembagaan (PKD)	1	1.287.201.281,00	1.288.821.218,00	100,06	1.287.201.281,00
214	Pengembangan dan Pengembangan Aparatur Masyarakat	1	8.118.128.000,00	8.170.102.880,00	100,64	148.884.000,00
215	Pengembangan Fasilitas					
216	Pelaksanaan Kegiatan untuk UPTD dan UPTK Pengembangan Daerah Kabupaten Kota	1	80.200.000.000,00	84.748.238.238,00	105,67	25.548.238.238,00
217	Fasilitas Kerja (PKD)	1	4.788.240.770,00	3.788.270.094,00	79,15	1.000.000.000,00
218	Layanan Keuangan dan Kelembagaan (PKD)	1	214.800.000,00	202.080.880,00	94,08	12.719.120,00
219	Layanan Administrasi (PKD)	1	180.000.000,00	162.210.128,00	90,12	17.789.872,00
220	Aparatur Pemerintahan Kabupaten	10	208.888.878,00	208.888.878,00	100,00	178.888,00
221	Koordinasi upaya Pengembangan dan Kelembagaan	8	388.888.878,00	387.888.880,00	99,73	212.888.880,00
222	Pemeriksaan Kelembagaan Yang dan Peningkatan Perencanaan Bidang Keuangan Perencanaan dan Kelembagaan	1	252.888.880,00	252.888.880,00	100,00	287.888,00
223	Pemeriksaan Kelembagaan Yang dan Peningkatan Perencanaan Bidang Perencanaan Perencanaan, Peningkatan Perencanaan, Fasilitas Peningkatan	1	88.888.880,00	88.888.880,00	100,00	27.888,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINIER TAJUK YANG BERKAIT 11 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	LOKASI	JML. PROJEK	ANGGARAN	REALISASI	%	ISRA ANGGARAN
	Pembinaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Umum/Perumahan Umum/Tempat Umum, serta Pemeliharaan					
210	Pembinaan Anggaran Tahunan dan Pemeliharaan/Perbaikan Ruang Perumahan dan Pengawasan Terhadap Pemukiman	1	19.948.200,00	19.948.200,00	99,97	112.730,00
220	Pembinaan Anggaran Tahunan dan Pemeliharaan/Perbaikan Ruang Perumahan Umum, Desa dan Kampung	1	25.821.000,00	25.497.400,00	98,81	103.000,00
221	Manajemen Perumahan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (MPPHLP) Kabupaten Kota	1	879.543.000,00	811.790.900,00	92,34	87.752.100,00
222	Pembinaan Anggaran Tahunan dan Pemeliharaan/Perbaikan/Keperawatan Rumah dan Pengawasan Rumah Sialit Kota	1	886.284.000,00	872.378.800,00	97,31	12.095.100,00
	Jumlah	447	777.876.200,00	749.625.300,00	97,66	406.892.200,00

**3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara**

Selama Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1.267.021.296.858,00 dengan realisasi sebesar Rp1.372.777.797.808,89 atau 108,37% sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp1.232.718.288.873,61. Ada kenaikan perserahan pendapatan selama TA 2022 sebesar Rp118.339.589.023,08 atau 9,61%. Perserahan Pendapatan TA 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah sebesar Rp108.296.507.771,08 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp21.706.872.729,00 dengan realisasi sebesar Rp20.280.469.777,20 atau 93,46 sedangkan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp20.137.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp16.948.883.077,00 atau 84,24% ada kenaikan pendapatan sebesar Rp3.299.324.766,20 atau 19,24%;
  - b. Hasil Retribusi Daerah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp14.724.768.817,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.171.945.418,00 atau 68,81% sedangkan Tahun 2021 realisasi Rp35.667.497.648,00 atau 25,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.721.667.648,00 maka terdapat kenaikan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp1.103.651.178,60 atau 12,22%;
  - c. Hasil Pengalihan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.818.366.983,00 atau 108,08% sedangkan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp11.634.997.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.432.753.624,00 atau 89,67%; maka terdapat Perserahan Pendapatan Hasil Pengalihan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp174.388.641,00 atau 1,57%;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp61.124.185.912 dan direalisasikan sebesar Rp48.025.366.983,00 atau 78,61%.



## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Selangkan Tahun 2021 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp29.442.186.007,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.643.480.331,00 atau 93,87%. Ada kasakusud pendapatan sebesar Rp169.291.263,89 atau 0,56%.

- a. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.121.453.387.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.223.758.813.286,88 atau 109,12 %.
- f. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp287.678.212.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp284.277.608.178.846,00 atau 126,63%.
- g. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp501.624.803.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp500.634.214.443,00 atau 99,80 %.
- h. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp116.307.382.000 dan direalisasikan sebesar Rp113.091.807.470,00 atau 97,22%.
- i. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp116.618.492.000 dan direalisasikan sebesar Rp77.064.489.420,00 atau 66,12%.
- j. Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan sebesar Rp2.461.865.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.461.865.000,00 atau 100%, sedangkan Tahun 2021 Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp26.028.179.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp26.028.179.000,00 atau 100%.
- k. Dana Desa dianggarkan sebesar Rp77.474.633.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp77.474.633.000,00 atau 100%, sedangkan tahun 2021 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp94.476.699.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp94.476.699.000,00 atau 100%.
- l. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.604.193.480,40 atau 93,02%. Sedangkan Tahun 2021 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp45.720.881.744,31 atau 228,60%. Ada kasakusud pendapatan sebesar Rp42.883.311.696,19 atau 91,79%.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28.126.383.807,50 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp28.126.383.807,50 dan.
- b. Pendapatan atau pengembalian Hibah dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp 0.747.000,00.

#### 3.3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara

Realisasi belanja daerah Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja dan transfer: Anggaran Belanja dianggarkan Rp1.433.394.697.170,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.248.831.766.307,23 atau 87,19%. Anggaran Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp169.533.007.861,00 dan direalisasikan sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN BAHITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Rp18.745.329.561,23 atau 98,89%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2021 Anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp1.568.582.841.893,62 dan direalisasikan sebesar Rp1.096.511.578.790,81 atau 69,92 % dengan rincian:

1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp967.497.839.802,00 dan direalisasikan sebesar Rp816.701.681.907,00 atau 84,41%. Sedangkan untuk Tahun anggaran 2021 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp812.508.411.419,68 dan direalisasikan sebesar Rp711.324.627.356,00 atau 87,52%.
2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp122.434.773.542,00 dan direalisasikan sebesar Rp201.381.338.839,99 atau 90,99 %; Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp216.097.185.362,00 dan direalisasikan sebesar Rp184.184.390.098,00 atau 85,27%.
3. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.929.785.964,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0%; Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.003.620,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0 %.
4. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp166.533.097.861,00 dan direalisasikan sebesar Rp 138.745.329.561,23 atau 83,39%. Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp158.889.934.300,00 dengan realisasi sebesar Rp138.745.329.561,23 atau 87,34%. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp321.017.996.829,97 dan direalisasikan sebesar Rp319.282.037.138,81 atau 99,46%.

**3.4. Pembiayaan Pembiayaan Daerah**

Anggaran Pembiayaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp384.876.671.293,00 dan direalisasikan sebesar Rp384.827.096.545,39 atau 99,99%. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 Anggaran Pembiayaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp247.689.734.025,00 dan direalisasikan sebesar Rp247.689.734.029,39 atau 100,00%.

**3.5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.666.938.000,00 atau 26,67% dengan rincian: Pengeluaran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

**3.6. Kinerja dan Hambatan Pencapaian Target**

Pada tahun 2022 realisasi Pendapatan, pada umumnya mencapai target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar 126,01%. Kinerja belanja daerah secara umum di bawah target yang ditetapkan yaitu hanya sebesar 87,26 %, hal tersebut antara lain disebabkan adanya efisiensi atas belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta adanya rasionalisasi dan penangkitan belanja serta relokating penangkitan COVID 19 pada tahun 2022.



**3.1. Ikhtisar Kinerja Keuangan Berbasis LO**

**1. Pendapatan LO Tahun 2022**

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukkan Pendapatan Operasional sebesar Rp1.164.288.892.166,72 melangkaui untuk Tahun Anggaran 2021. Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Pendapatan Operasional sebesar Rp1.490.119.090.810,50 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah LO	Rp	49.814.078.742,09
b. Pendapatan Transfer-LO	Rp	1.342.812.789.283,81
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Bersifat-LO	Rp	29.492.227.877,60

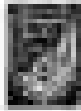
**2. Beban Tahun 2022**

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Beban Operasional sebesar Rp1.841.676.837.939,76. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Beban Operasional sebesar Rp1.811.881.449.044,76 yang terdiri dari:

a. Beban Pegawai	Rp	432.848.183.912,00
b. Beban Pensiunan	Rp	113.287.607.025,17
c. Beban Jasa	Rp	173.732.199.804,00
d. Beban Pemeliharaan	Rp	18.099.846.207,00
e. Beban Perjalanan Dinas	Rp	87.149.643.345,00
f. Beban Bangun	Rp	0,00
g. Beban Sewa	Rp	19.708.000,00
h. Beban Hibah	Rp	25.758.852.846,00
i. Beban Bantuan Sosial	Rp	2.409.332.875,00
j. Beban Penyelenggaraan Peningkatan	Rp	414.597.906,00
k. Beban Lain-Lain	Rp	945.605.290,00
l. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	61.802.048.139,74
m. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	18.927.640.304,00
n. Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	Rp	94.722.868.337,00
o. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
p. Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp	0,00
q. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	166.308.200,00
r. Beban Bagi Hasil	Rp	2.441.568.961,23
s. Beban Hibahan Keuangan	Rp	78.829.129.600,00

**3. Kegiatan Non Operasional**

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukkan Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.743.896.446,50. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Kegiatan Non Operasional sebesar Rp5.028.186.643,50.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LOKUS TAJUK YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

---

**4. Pin Luar Biasa**

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukkan Kegiatan Pin Luar Biasa sebesar Rp0,00. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Kegiatan Pin Luar Biasa sebesar Rp0,00.

**5. Surplus / Defisit LO**

Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukkan Surplus/Defisit LO sebesar Rp141.259.106.358,38. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 Laporan Operasional LKPD Kabupaten Barito Utara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan Surplus/Defisit LO sebesar Rp472.654.943.831,61.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara didasarkan pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 dijelaskan sebagai berikut.

#### **4.1. Etika Akuntansi**

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, kerangka-konsep, standar-standar, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai aliran sumber daya pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Tujuan Kebijakan Pelaporan Keuangan ialah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbacaan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan standar pertanggung-jawaban dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman penilaian laporan keuangan, dan penyusunan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang disediakan dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemertika/pengawas, pihak yang memiliki atau berpetaka dalam proses bisnis, investor, dan peminat, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, tidak termasuk pemerintah daerah. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK SKPD. Laporan keuangan gabungan yang memuat/





Laporan keuangan Pemerintah Daerah antara lain yang menghasilkan: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perhitungan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4.3. Basis Akuntansi yang Memandu Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Utara yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal tersebut perundang-undangan mewajibkan diadakannya laporan keuangan basis akrual, maka untuk waktu menyajikan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa dianggap pada pada LO.

Dalam hal anggaran diterima dan dibebaskan berdasarkan basis kas, maka LRA dianggap berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pencatatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pembiayaan pencatatan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi keuangan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Utara, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan struktur sumber, alokasi, dan penyaluran sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Utara, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang diungkap secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan – LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Utara atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Kutai Utara lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Utara, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Utara;
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Utara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Utara;
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran yang dari suatu entitas pelaporan difasilitasi antara pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
4. Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun Anggaran



berlaku, yang dalam penggunaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara terencana dimaksimalkan untuk menutup defisit atau memenuhkan syarat anggaran. Pembiayaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pelayanan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

#### **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (NAL)**

Laporan Perubahan NAL menyajikan informasi berkaitan atas perubahan NAL, tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **Netra**

Netra atau laporan posisi keuangan (*balance sheet* atau *statement of financial position*) merupakan bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Unsur yangandung oleh netra terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dasar. Masing-masing unsur diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi potensial akan di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperoleh untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperoleh karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

#### **Aset**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensial aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Barito Utara, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar.

1. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dijual untuk diproses atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat direalisasikan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, inventaris jangka pendek, piutang, dan persediaan.
2. Aset non lancar merupakan aset yang berwujud jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi inventaris jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
3. Inventaris jangka panjang merupakan inventaris yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu



periode akuntansi yang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan investasi permanen lainnya.

4. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, kapal dan jangkar, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
5. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (konsortium).

### **Kewajiban**

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan perubahan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban utamanya timbul karena pelaksanaan pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban timbul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terjadi karena perkataan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atau dengan pribadi lain lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipisahkan menurut bentuk sebagai konstituen dari kontrak yang mengikat atau peristiwa perundang-undangan. Kewajiban dibedakan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

### **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang merupakan saldo antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo awal ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

### **Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan aliran sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Utang yang timbul karena kegiatan dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, biaya, transfer, dan pinjaman luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Biaya adalah kewajiban yang timbul sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak pemerintahan atau kewajiban pengalihan yang diakui serta antara pelaporan dan/atau periode antara pelaporan lain, termasuk dana pertanggung dan dana bagi hasil; dan



4. Per Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan tidak dapat bersifat atau pengaruh relatif menguntungkan.

#### **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas संबंधные dengan aktivitas operasi, investasi, dan transaksi yang mengakibatkan saldo awal penyelesaian, pengalihan, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Harito Utara selama periode tertentu. Unsur yang diungkap dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing diklasifikasi sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Harito Utara;
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Harito Utara.

#### **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi jumlah dan perubahan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan terdapat atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diperlukan dan dinyatakan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta lingkup-lingkupan yang diperlukan untuk menghasilkan Penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Tertentu Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan kinerja pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atau transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diperlukan oleh Penyusun Sumber Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyajikan informasi lainnya yang diperlukan untuk Penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat memuat informasi ulang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas daftar tertaut dan analisis atas nilai mata pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan



Laporan Perbuatan Baik. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diperlukan dan diwajibkan oleh kebijakan akuntansi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kepatuhan dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Rincian pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, bentuk kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar Penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Risiko dan penjelasan masing-masing pos yang signifikan pada bentuk muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diberikan oleh kebijakan akuntansi yang belum diadopsi dalam bentuk muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk Penyajian yang wajar, yang tidak diadopsi dalam bentuk muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengadopsi kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang Perediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengaliran perediaan.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skema atau bentuk lain yang lebih yang mengilustrasikan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

#### **Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran umum secara umum. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi: identitas dan bentuk hukum serta entitas atau perwujudan tempat entitas tersebut berada; penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan utamanya; dan ketetapan perundang-undangan yang mengatur hubungan kegiatan operasinya.

#### **Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro**

Catatan atas Laporan Keuangan dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang dapat menjelaskan pencapaian-pencapaian seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

Untuk dapat menjelaskan pencapaian-pencapaian diatas, entitas pelaporan menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya selanjutnya dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan antara ekonomi makro



yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan pemertaan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjelasan rencana strategi dalam kebijakan penyusunan APBD, antara, program dan prioritas anggaran, kebijakan intervensi/komodifikasi pendapatan. Ekstensi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah menilai secara indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan indikator sosial lainnya yang perlu diinformasikan.

#### **Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kondisi dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target**

Catatan atas Laporan Keuangan dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang tidak tercapai, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen untuk pelaporan secara ikhtisar penulisan laporan keuangan.

Dalam satu periode pelaporan, dikemukakan alasan dan kondisi tertentu, setelah pelaporan mungkin melibatkan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar penulisan laporan keuangan dapat mengikhtisar kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan merupakan perbedaan dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan setelah pelaporan.

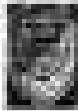
Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan antara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelayanan-LRA dan alokasi belanja yang tidak ditanggung dalam APBD. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: nilai target total, nilai realisasi total, persentase perbandingan antara target dan realisasi, dan alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi. Untuk membantu penulisan laporan keuangan, manajemen menulis pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan keterselesaian dana dalam anggaran periode mendatang.

#### **Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan**

Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Asumsi Dasar Akuntansi**

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika suatu kebijakan tidak mengikhtisar secara umum atau konsep tersebut dan diuraikan alasan dan penjelasannya.



Berisi dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sesuai diatur dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah anggaran yang diterima sebagai suatu kolektifitas terpadu perlu dibelikan agar kebijakan anggaran dapat diterapkan, yang terdiri dari Anggaran komandirias wilayah, Anggaran kemitraan/wilayah, dan Anggaran kemakmuran dalam negeri asing (monetary management).

Anggaran komandirias wilayah terdiri bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekurangan atau nilai instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan keuangan. Salah satu indikator keberhasilan anggaran ini adalah adanya keseimbangan antara untuk menyajikan anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Untuk bertanggung jawab atas pengalokasian aset dan sumberdaya di luar sarana untuk kepentingan jangka panjang pemerintah, termasuk atas kebijakan yang berkaitan aset dan sumber daya dimilikinya, yang penting yang terjadi akibat kapasitas antara, serta terakumulasi tidaknya program yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun dengan anggaran bahwa setiap pelaksanaan akan berhitung kegunaannya. Dengan demikian, pemerintah dilaksanakan tidak bermaksud melakukan tindakan atas antara pelaksanaan dalam jangka panjang. Laporan keuangan antara pelaksanaan menyajikan setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dinilai dengan situasi asing. Hal ini diperlukan agar menunjukkan efektivitasnya analisis dan pengukuran dalam anggaran.

#### Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Utara meliputi: Masyarakat, Para wakil rakyat, lembaga swasta, dan lembaga pemerintah, Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan Pemerintah. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan kerangka kebijakan anggaran sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keputusan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara acak jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan anggaran yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengungkapan kebijakan anggaran dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat divergensi. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu keputusan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perhitungan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perhitungan Ekuitas terdapat dari pengungkapan kebijakan terpilih.

#### Kebijakan Anggaran

Pertimbangan dan/atau penilaian kebijakan anggaran perlu dilaksanakan dengan kredibel antara pelaksanaan. Namun pilihan kebijakan yang paling tepat akan mempengaruhi realitas ekonomi antara pelaksanaan secara tepat dalam bentuk kondisi keuangan dan kegiatan. Tiga pertimbangan penilaian untuk anggaran kebijakan anggaran yang paling tepat dan penyajian laporan keuangan oleh manajemen:

1. Pertimbangan Sehat
2. Kelengkapan meliputi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Setiap butir-hal tidak menambahkan penyajian realisasi



realisasi atau disambungkan;

1. Schenasi Merganggi Bantik;
4. Transaksi dan kejadian lain dipertanggungjawabkan dan ditinjau sesuai dengan labelat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengenai bentuk hukum transaksi atau kejadian;
5. Materialitas.

Laporan keuangan mengungkapkan semua transaksi yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga meliputi perubahan-perubahan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Selain itu, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

1. Entitas pelaporan;
2. Dasar akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
3. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
4. Impact nyata semua kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transaksi. Sebaliknya, penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesetiaan entitas; dan
5. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Diungkapkan nya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas pelaporan di mana. Ketiduan informasi mengenai entitas pelaporan dan kekompatannya mempunyai potensi kesalahan-pelaporan sehingga mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Walaupun Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Hal ini akan mencocokkan pembaca laporan tanpa melihat kembali basis akuntansi yang tertata pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang ditinjau cukup memadai untuk dapat mengidentifikasi saat dan kerangka yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.

Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang terwujud dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan





diyakini yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain: Pengawasan pendapatan-LRA, Pengawasan pendapatan-LO, Pengakuan belanja, Pengakuan beban, Prinsip-prinsip penyusunan laporan komparabilitas, Internal, Pengakuan dan penghapusan/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud, Kontrol-kontrol keuangan, Kebijakan kapitalisasi pengeluaran, Kamitman dengan pihak ketiga, Biaya penelitian dan pengembangan, Penyusutan, baik yang untuk dipul maupun untuk dipakai sendiri, Peristiwa dan cadangan, Peristiwa dan keterlambatan pegawai, Penjualan mata uang asing dan Debitur nilai.

Salah satu perlu dipertimbangkan juga kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari sumber wajib, penjualan mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap nilai tukar.

Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai per-pes yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan.

Laporan keuangan seharusnya menyajikan informasi angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan semua kuantitatif diungkapkan. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

#### **Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Dijelaskan pada Lembar Mula Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Aritas Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut: Anggaran, Realisasi, Perbandingan persentase; Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, dan Lebih/Kurang Penyaliran Anggaran (MIPA/SKPA) tahun berjalan, kumul perubahan perolehan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut: Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian yang diperlukan; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut: Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut pendapatan- LO menurut sumber pendapatan; Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan



struktur sebagai berikut: Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk per unit kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan non keuangan, aktivitas pendanaan, dan aktivitas non keuangan dengan struktur sebagai berikut:

1. Perbandingan dengan periode yang lalu;
2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
3. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas;
4. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan; dan
5. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk setiap awal periode, meliputi/lewat-LG, sampai kumulatif perubahan kumulatif/keseluruhan residual, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
  - a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - c. Rincian yang diperlukan; dan
  - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

#### **Pengungkapan Informasi yang Diwajibkan Oleh Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Mulut Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang diperlukan dan diwajibkan oleh kebijakan akuntansi lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menyajikan wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan informasi lain yang tidak disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Karena keterbatasan waktu dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atau peristiwa yang diukur akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar mulut laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembuat laporan perlu diingatkan kewajibannya akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang.

Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang tidak termasuk rincian (misalnya rincian pembebasan, rincian aset tetap, dan rincian pengukuran lainnya) dari seperti yang telah ditunjukkan pada lembar mulut laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, mungkin ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi per unit tetap dibedakan dari pengukuran melalui harga perolehan. Peristiwa terhadap aset-aset yang mendukung per unit tersebut menunjukkan nilai salah satu aset unit dengan harga salah satu harga perolehan, karena unit dimaksud diperoleh dari donor.

#### **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan informasi yang jika tidak diungkapkan akan merugikan bagi pembuat laporan. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan kebijakan-kebijakan penting lainnya dalam pelaporan, seperti:



1. Penguatan manajemen pemerintah daerah antara lain berwujud;
2. Kualitas manajemen publik yang telah dikorksi oleh manajemen baru;
3. Kinerja atau kontribusi yang tidak dapat diabaikan pada kinerja;
4. Pengabdian atau pelayanan antara lain berwujud; dan
5. Kejelasan yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya persepakatan yang ditandatangani pemerintah daerah.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

#### **Simpulan**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan menelaah/ujarnya dengan laporan keuangan antara lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan catatan sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang antara pelaporan dan antara akuntansi;
2. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi nasional;
3. Rincian pencapaian target keuangan berfaat berburuh dan kemakmuran;
4. Kebijakan akuntansi yang penting terdiri dari antara pelaporan, Basis akuntansi yang menelaah penyusunan laporan keuangan, Basis pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, Kebijakan kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketetapan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh antara pelaporan, dan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk menelaah laporan keuangan.
5. Kebijakan pro-pro Laporan Keuangan:
  - a. Etika dan penjelasan masing-masing pro Laporan Keuangan;
  - b. Pengungkapan Informasi yang diperlukan oleh kebijakan akuntansi yang belum diwajibkan dalam lembar muka Laporan Keuangan;
  - c. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai yang untuk mengakui dan memisahkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Utara. Pengukuran pro-pro dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Utara menggunakan nilai perolehan historis. Agar dapat sebagai pengalokasian/penggunaan sumber daya akuntansi. Nilai sebagai nilai wajar dari aset/liabilitas yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban historis sebagai nilai wajar berdasarkan akuntansi yang digunakan pemerintah untuk menelaah kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pro-pro laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikategorikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dipetakan dalam mata uang Rupiah.

#### **Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasi ke Basis Akrua**

Perubahan Perundang-undangan Nomor 64 Tahun 2014 diadopsi bahwa mulai Tahun 2015 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menggunakan Basis Akrua, sehingga dengan perubahan basis akuntansi dari basis kas modifikasi yang masih digunakan untuk laporan keuangan tahun 2014 menjadi basis akrua. Pemerintah Kabupaten Kutai Utara mengikuti kepada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perbaikan Kebijakan Akuntansi, Perbaikan Informasi Akuntansi dan Operasi.



yang tidak diwajibkan serta Interpretasi Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan. Atas dasar hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan saldo akuntansi tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak dari Perubahan Kebijakan akuntansi diperbaiki sebagai koreksi tahun berjalan. Akun-saldo Akrial yang belum disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2014 meliputi:

1. Beban Dibayar Dimuka;
2. Akuntansi Penyisihan Piutang;
3. Akuntansi Penyusutan Aset Tetap;
4. Akuntansi Amortisasi Aset Tak Berwujud;
5. Pendapatan Utangra Denda; dan
6. Perbedaan nilai Penjualan sebagai dampak perubahan kebijakan akuntansi, yang semula menggunakan Harga Beli Teraktif menjadi menggunakan metode First In First Out (FIFO) yang diurut secara periode diperlakukan sebagai Koreksi tahun berjalan yang teraql pada laporan Perubahan Harga (LPH) dalam Sisi Kredit Tahun Sebelumnya pada rincian Lain-lain.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kelestarian Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Utara dilakukan pengakuan dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti ketentuan yang diatur dalam Beletra Teknik Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah dan Interpretasi Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

##### **Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang memindah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### **Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO**

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

##### **Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pengembaiannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja merupakan unsur-unsur penyusunan Laporan Hasil Anggaran (LRA), terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memuat manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja



- pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat daerah, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahan daerah yang belum bertatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.
  3. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
  4. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok uang (principal outstanding) termasuk dalam pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya administrasi hutang dan biaya denda.
  5. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
  6. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
  7. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang hidupnya tidak secara terus menerus dan bersifat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
  8. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian aset tetap dan aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk pembelian tanah, gedung dan bangunan, perantara, dan aset tak bergerak.
  9. Nilai yang dianggap dalam belanja modal sebesar harga belihangannya aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
  10. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pemerintah daerah.
  11. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Kebijakan Akuntansi Beban**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang



**PEMERINTAH KABUPATEN HARAU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

CINTUE TAJIB YANG BERSALAH 31 DESEMBER 2021 DAN 2021

dari antara dalam rangka kegiatan operasional antara agar antara dapat melakukan kegiatan dengan baik.

4. **Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Sewa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Perawatan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain**
5. **Beban Pegawai merupakan kewajiban terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat daerah, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dippekerjakan oleh pemerintahan daerah yang belum bernilai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan modal.**
6. **Beban Barang dan Jasa merupakan pemenuhan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang memuatkan akuisisi, yang dapat berupa pengalihan atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengalihan barang dan jasa yang lebih padat, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran kontrakan kegiatan kepada non pegawai dan pembelian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.**
7. **Beban Bunga merupakan akibat pengalihan pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukakan atas kewajiban penggunaan parkir uang (pinjaman outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya administrasi fee dan biaya dasar.**
8. **Beban Hibah merupakan pengalihan atau akibat anggaran yang diberikan Pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar dapat menjalankan yang diberikan dapat terjangkau oleh masyarakat.**
9. **Beban Hibah merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada masyarakat umum, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.**
10. **Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.**
11. **Beban Perawatan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat pemenuhan manfaat ekonomi atau pemenuhan jasa yang terjadi pada saat pemenuhan aset aset seluasnya dengan penggunaan aset bersangkutan/beralunya waktu.**
12. **Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kewargan piutang.**
13. **Beban Lain-lain adalah beban operasional yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.**
14. **Beban Transaksi merupakan beban berupa pengalihan uang atau kewajiban untuk melaksanakan uang dari pemerintah daerah kepada antara pelaporan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pemadangan-undangan.**
15. **Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dilaksanakan secara berkala dalam kegiatan non operasional.**
16. **Beban Luar Negeri adalah beban yang terjadi karena kewajiban yang tidak dapat ditransferkan menjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berbilang-slang, dan kewajiban di luar kendali antara pemerintah daerah.**



17. Belum diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengklasifikasikan beban berdasarkan jenis beban dalam Daftar Akun Standar.

#### **Kebijakan Akuntansi Transfer**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Transfer adalah pemindahan atau pengalihan uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada suatu pelaporan lain, termasuk dana pinjaman dan dana bagi hasil milik pemerintah daerah.
2. Transfer Mestik (LRA) adalah pemindahan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya pemindahan dana pinjaman dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
3. Transfer Kabur (LRA) adalah pengalihan dari suatu pelaporan ke suatu pelaporan lain seperti pengalihan dana pinjaman oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil kepada pemerintahan dan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa pemindahan uang atau hak untuk menerima uang oleh suatu pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari suatu pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Kebijakan Akuntansi Pembayaran**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Pembayaran (Paying) adalah bentuk musnah keuangan pemerintah daerah, baik pemindahan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengalihan yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam pengalihan pemerintah daerah tersebut dilaksanakan untuk menutupi defisit atau memulihkan surplus anggaran.
2. Akaun Debet adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara satu pemindahan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Debet Kas adalah bentuk akuntansi yang mengakui pengaruh transfer dan pertialan lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Badan/lembaga Utama Daerah untuk menunjang seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
5. Kas adalah suatu pertukaran dan mata uang.
6. Rekening Kas Utaran Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh bupati untuk menunjang seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada hari yang ditetapkan.
7. Surplus/Defisit adalah istilah lebih lanjut antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.



**Ketijaksanaan Akuntansi Kas dan Setoran Kas**

Berkas ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Kas merupakan uang tunai dan nilai simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah yang sangat likuid yang siap dipembayar/dibersihkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta nilai simpanan di bank yang setiap saat dapat ditilik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
2. Setoran Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap diartikan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal pembayarannya.

**Kebijakan Akuntansi Investasi**

Berkas ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

1. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam pembelian suatu investasi termasuk komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pengantar lainnya dari pasar modal.
2. Investasi adalah aset yang diakuisisikan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diartikan dan dimanfaatkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
4. Investasi jangka panjang adalah investasi yang diakuisisikan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
5. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, diakuisisikan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang diakuisisikan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
7. Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan entitas yang membuat keputusan pada pertimbangan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
8. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga pembelian.
9. Metode nilai adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga pembelian. Nilai investasi setelah pembelian disesuaikan dengan perubahan harga investor atas kemampuan berinvestasi dari harga pada pembelian investasi (investor) yang terjadi sesudah pembelian awal investasi.
10. Nilai likuida adalah jumlah kas atau nilai/nilai kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan untuk menyelesaikan suatu aset investasi pada saat pembayarannya.
11. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang





- tertera dalam lembar saham dan obligasi.
- 12. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif untuk pihak-pihak yang independen.
- 13. Nilai wajar adalah nilai wajar atas penyediaan kewajiban atau pihak yang menahkani dan bertanggung untuk melakukan transfer wajar.
- 14. Perubahan signifikan adalah suatu perubahan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.
- 15. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

#### Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang ialah aset yang paling penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemampuannya maupun dari sudut pandang likuiditasnya. Secara standar akuntansi menggunakan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buku Teknik SAP Nomor 02 tahun 2015 menjelaskan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak bayar atas layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak terbagi adalah tabanan nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari rekening debitus koperal debitus entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak terbagi tidak bersifat akumulatif tetapi diperoleh setiap akhir periode anggaran sesuai perkiraan/estimasi kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak terbagi dihitung berdasarkan kualitas aset piutang, karakteristik piutang, dan diperoleh dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Melakukan perhitungan dan penyisihan nilai piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

#### 1. Klasifikasi

Piutang diblat dari sisi peristiwanya yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi, Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Piutang Retribusi, dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

#### 2. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: Perikatan Pinjaman, Pinjaman, Keadwaan, dan Perikatan Fasilitas.

#### 3. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus, Piutang Dana Operasi Khusus, Piutang Transfer Lainnya, Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, Piutang Transfer Antar Daerah, dan Piutang Kelebihan Transfer.

#### 4. Tanggans Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tanggans ganti kerugian daerah, terdiri atas: Piutang yang timbul akibat Tanggans Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai



## FEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Negeri Baka Bandahara; Pintang yang terbelah oleh Tanaman Gami Kerugian Daerah terhadap Bandahara.

Dalam Peraturan Bupati Barito Utara ini, Pintang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Pintang Pemerintah	Pintang Tetap Daerah
	Pintang Sementara
	Pintang hasil Penghasilan Pemerintah Daerah yang Dikawatirkan
	Pintang lain-lain PAD yang Tetap
	Pintang Transfer Pemerintah Pusat
	Pintang Transfer Pemerintah Lainnya
	Pintang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Pintang Lainnya	Bunga Lampa Tagihan Jangka Panjang
	Bunga Lampa Tagihan Jangka Panjang Penerima Jangka Panjang Penerima Jangka Panjang Lainnya yang Tetap

### Kelompok Aktiva Perediaan

#### 1. Definisi

Perediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang disediakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang disediakan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### 2. Klasifikasi

Perediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*inventory*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komputer personal dan PTP, dan barang bekas pakai seperti komporan bahan.
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan besi.
- Barang dalam proses produksi yang disediakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, besi yang belum cukup berat.
- Barang yang diterima untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- Perediaan dalam kendali milik atau yang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### Kelompok Aktiva Tetap

#### 1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau disediakan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau disediakan oleh masyarakat umum.

#### 2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan bentuknya dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi utama. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

##### a. Tanah

Tanah yang diklasifikasikan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan modal untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kendali tetap diposisi.



- b. **Peralatan dan Mesin**  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris komputer, dan perabotan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kendali tetap.
  - c. **Gedung dan Bangunan**  
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan modal untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kendali tetap.
  - d. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kendali tetap.
  - e. **Aset Tetap Lainnya**  
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kendali tetap.
  - f. **Kontribusi Dalam Pergerakan**  
Kontribusi dalam pergerakan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses penandingan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
3. **Perubahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi diwajibkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014.**

**Ketepatan Akuntansi Kewajiban**

Berkas ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Ketepatan Akuntansi dengan pengertian:

1. **Akuntansi** yang adalah siklus sistematis dari prosedur atau prosedur selama aset atau pemerintah.
2. **Aset Tetap** yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*), selanjutnya disebut **Aset Tetap** adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.
3. **Harga Perjanjian** adalah harga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan perolehan data.
4. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dan kreditur.
5. **Diskonto** adalah jumlah nilai kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*nominal value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
6. **Efektif pelaporan** adalah saat pemerintahan yang terdapat dari suatu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang secara konsisten pemerintah perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
8. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
9. **Kewajiban akuntansi** adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
10. **Kewajiban kontingensi** adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
  - a. Tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) bahwa suatu entitas



menghasilkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

b. adalah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara riil.

11. Kurs adalah nilai pertukaran dan mata uang.
12. Metode garis lurus adalah metode akuntansi pemilikan atau disikonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode selaras dengan pemerintah daerah.
13. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah daerah.
14. Nilai riil (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang telah diakumulasi.
15. Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PTK, merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang melibatkan kewajiban pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pengutang lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Asuransi, Taspen, dan Taspenas.
16. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
17. Revisibilitas Utang adalah kesepakatan antara kreditor dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.
18. Tanggapan adalah jumlah kewajiban utrang karena ketidakmampuan untuk membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena ketidakmampuan pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau keluarga internasional. Kewajiban pemerintah daerah dapat juga terjadi karena perkaitan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tanggapan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan antara pajak dari wajib pajak, akuisisi/akumulasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipulihkan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

#### **Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

1. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah daerah atas kekayaan pemerintah daerah.
2. Ekuitas diukur sebesar nilai transaksi. Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah/dikurangi surplus/defisit dan koreksi.
3. Ekuitas disajikan pada neraca dalam kelompok ekuitas, Laporan Perhitungan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pengungkapan ekuitas dalam catatan atau laporan keuangan, selanjut-kelanjutnya mencakup hal-hal sebagai berikut: Kebijakan akuntansi ekuitas, Nilai awal ekuitas, Surplus/defisit, dan Nilai akhir ekuitas.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan-LRA adalah Pendapatan Daerah yang diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah.

1. Pendapatan kas yang tidak diterima pada RKUD;
2. Pendapatan kas yang diterima oleh Badan/lembaga Pemerintahan yang sebagai Pendapatan Daerah dan hingga tanggal pelaporan belum diartikan ke RKUD, dengan ketentuan badan/lembaga pemerintahan tersebut merupakan bagian dari DUD;
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa diartikan ke RKUD, dengan syarat setiap penerimaan wajib melaporkannya kepada DUD untuk dapat sebagai pendapatan daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari pihak langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan dengan syarat setiap penerimaan wajib melaporkannya kepada DUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
5. Pendapatan kas yang diterima setiap hari di kas umum pemerintah daerah berdasarkan rekening yang diberikan oleh DUD, dan DUD mengakui sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dapat berwujud atau bruto, yaitu dengan membiayai pemerintahan bruto, dan tidak memuat jumlah lainnya (jumlah dikompensasikan dengan pengurangan). Dalam hal tersebut pengakuan terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan diakumulasi dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses beban sesuai, maka akan bruto dapat dikurangkan. Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut:

**5.1.1. Pendapatan Rp1.352.277.797.898,69**

Anggaran Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp1.267.021.206.458,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.352.277.797.898,69 atau 106,71% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan pemerintahan sebesar Rp118.339.186.023,68 atau 9,81% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.233.938.208.871,61. Komponen pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan-LRA	1.267.021.206.458,00	1.352.277.797.898,69	106,71	1.233.938.208.871,61
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - (RUB)	145.555.819.458,00	158.396.565.775,09	108,87	154.667.827.276,40
Pendapatan Transfer Lain-lain	1.121.465.387.000,00	1.193.881.232.123,60	106,47	1.079.270.381.595,21
Pendapatan Daerah yang lain	0,00	10.185.905.000,00	0,00	10.185.905.000,00

**5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Rp158.396.565.775,09**

Anggaran Pendapatan Asli Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp 145.555.819.458,00 dengan realisasi yang dicapai



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

sebesar Rp108.298.503.773,09 atau 74,47% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD). Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp1.349.228.525,69 atau 4,18% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp104.647.427.279,48. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Barito Utara terdiri dari:

**Tabel 8.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022**

Kategori	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	21.706.872.729,00	20.206.408.777,00	93,06	19.940.880.077,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	14.724.700.077,00	10.101.948.418,00	68,61	8.028.144.247,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diwariskan – LRA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	10.432.708.024,00
Lain-lain PAD yang lain – LRA	66.124.188.072,00	66.026.782.486,00	99,97	67.849.492.231,00
<b>Jumlah</b>	<b>148.555.618.488,00</b>	<b>146.335.969.771,00</b>	<b>79,47</b>	<b>146.941.427.279,48</b>

**8.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah** **Rp21.206.408.777,00**

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan sebesar Rp21.706.872.729,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp20.206.408.777,00 atau 93,06% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD). Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp 1.349.228.525,69 atau 4,18% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.940.880.077,00.

Dari 10 item Pajak yang dikelola BPPD dengan target pajak Daerah yang ditetapkan sebesar Rp21.706.872.729 dengan realisasi pajak mencapai realisasi 93,06% yaitu Pajak Hotel tercapai sebesar 130,92% dan Pajak Restoran tercapai sebesar 117,42%.

Adapun beberapa faktor yang menghambat capaian target Pajak Daerah pada tahun 2022 tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Rendahnya kredibilitas dan kepatuhan WP untuk membayar pajak sehingga mempengaruhi tingkat pencapaian penerimaan dari sektor pajak;
2. Biaya publik dari situasi pandemi covid;
3. Rendahnya daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan pajak;
4. Adanya beberapa Objek pajak yang belum dibayarkan;
5. Terbatas jumlah SDM dari aparatur pengelola pajak terutama untuk petugas pelayanan dan petugas lapangan;
6. Masih kurangnya Perangko pendukung urusan dan prosedur untuk pengalihan pajak daerah;
7. Kurangnya pembinaan masyarakat terhadap regulasi dan prosedur sehingga berpengaruh;
8. Belum optimalnya pemanfaatan informasi dan teknologi dalam pengalihan pendapatan daerah;
9. Belum optimalnya kerjasama dengan pihak lain (Daerah lain dan lembaga pemerintahan lain);
10. Ketidak sesuaian jumlah petugas ditugaskan dengan beban pekerjaan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

pelayanan yang harus dilayani, dan  
 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran  
 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Pendapatan Pajak Daerah**  
**Berdasarkan Objek Pajak Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Hotel	400.000.000,00	526.796.120,00	131,62	494.992.241,00
Pajak Restoran	6.520.000.000,00	6.118.235.147,29	92,45	5.948.389.800,00
Pajak Hiburan	500.000.000,00	206.897.000,00	41,38	278.239.818,00
Pajak Parkir	400.000.000,00	308.808.000,00	77,19	302.888.000,00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	7.900.000.000,00	7.222.868.004,00	91,43	7.342.881.000,00
Pajak Penerangan Jalan	75.000.000,00	67.402.000,00	89,86	7.000.000,00
Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Energi Listrik	00.000.000,00	26.771.000,00	78,24	24.788.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	626.818.480,00	62,68	623.771.120,00
Pajak Sisa dan Bangunan Perumahan	2.110.001.000,00	1.498.785.470,00	70,98	1.428.888.207,00
Retribusi Lain-lain dan Sisa dan Bangunan	1.000.000.000,00	1.172.807.210,00	117,18	1.188.807.878,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.708.001.000,00</b>	<b>20.338.408.707,29</b>	<b>93,69</b>	<b>20.848.888.877,00</b>

**3.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah Rp16.131.945.418,00**

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp14.724.188.817,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp16.131.945.418,00 atau 109,56% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.407.756.601,00 atau 9,56% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.724.188.817,00.

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah Kabupaten Barito Utara dalam periode Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Pelayanan Tertentu dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pendapatan Retribusi Daerah berdasarkan Objek  
 Pajak Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.211.288.891,00</b>	<b>1.126.885.162,00</b>	<b>50,96</b>	<b>1.288.888.888,00</b>
- Retribusi Pelayanan Kelembagaan	818.000.000,00	216.378.000,00	26,32	208.812.000,00
- Retribusi Perkampungan Kotabaru	750.000.000,00	346.707.184,00	46,23	375.187.874,00
- Retribusi Pelayanan Pembiayaan Pajak Jalan Umum	643.288.891,00	563.800.000,00	87,65	563.888.888,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	81.000.000,00	104.190.000,00	128,50	0,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	600.000.000,00	64.802.000,00	10,80	178.878.871,00
- Retribusi Pelayanan Terdapat Meng Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	161.888.000,00	215,85	76.877.888,00
- Retribusi Pengujian Merkas Transportasi	175.000.000,00	76.190.000,00	43,53	188.872.000,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>71.481.888.888,00</b>	<b>8.886.887.218,00</b>	<b>12,43</b>	<b>7.587.787.887,00</b>
- Retribusi Pelayanan Pelayanan Daerah	2.078.778.878,00	2.144.418.228,00	103,16	208.188.887,00
- Retribusi Tertentu	13.410.788,00	180.000,00	1,34	188.000,00
- Retribusi Pelayanan	6.389.600.222,00	7.642.269.000,00	119,76	6.289.288.888,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Kepulauan				
- Realisasi Target Realisasi dan Out Pass	520.800.000,00	520.077.000,00	99,86	198.980.000,00
- Realisasi Realisasi Praktek Usaha Daerah	600.000.000,00	192.770.000,00	32,13	128.700.000,00
- Realisasi Pertalian Tertentu	352.400.000,00	141.473.000,00	40,14	648.527.570,40
- lain-lain lainnya Regional	0,00	11.873.000,00	0,00	470.227.570,40
- Realisasi lain-lain Pergerakan Monev dan Revisi	100.000.000,00	127.500.000,00	127,50	120.000.000,00
- Pemenuhan lain-lain	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.754.700.000,00</b>	<b>12.121.340.410,00</b>	<b>82,23</b>	<b>8.028.104.347,40</b>

**5.1.1.3.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp10.058.166.943,00**

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp10.058.166.943,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp10.058.166.943,00 atau 100,28% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2021 mengalami Pemenuhan pemerintahan sebesar Rp174.388.691,00 atau 1,73 % dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.432.788.624,00.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Rugian Laba dan Perseroan Modal lain (Perusahaan)	10.000.000.000,00	10.058.166.943,00	100,58	10.432.788.624,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.058.166.943,00</b>	<b>100,58</b>	<b>10.432.788.624,00</b>

Dilihat dibandingkan dengan realisasi pemerintahan PAD secara keseluruhan maka kontribusi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD hanya mencapai 9,38%.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari antara lain hasil laba Perusahaan Daerah Batare Membangun Tahun 2021 yang diantar Tahun 2022 dan antara pembagian laba/Dividen Bank Kalteng Tahun Buku 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

**5.1.1.3.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp6.005.783.594,89**

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp99.124.183.912,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp6.005.783.594,89 atau 6,07% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami pemenuhan pemerintahan sebesar Rp160.291.266,89 atau 0,51% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.645.402.110,00.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah untuk Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut:





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**Tabel 5.6**  
**Laporan PAD yang Baik**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Hati Harapan (M) yang Tidak Dipecahkan	0,00	660.000,00	0,00	0,00
Hati Harapan Lain Tahun Berakhir (M) yang Tidak Dipecahkan	0,00	267.780.000,00	0,00	0,00
Hati Harapan (M) yang Tidak Dipecahkan	416.000.000,00	267.780.000,00	64,37	276.476.000,00
Hati Harapan Lain Daerah	0,00	286.887,00	0,00	167.000,00
Jalan Dlm Rinc Daerah	10.886.000.000,00	9.647.000.216,00	88,47	4.362.960.000,00
Pembelian Bangun	0,00	14.116.661,00	0,00	0,00
Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	21.766.876,00
Tunjangan Gaji Pagar Daerah (TGP)	0,00	16.886.611,00	0,00	32.260.000,00
Pembelian Barang, Peralatan atau Jasa Lain	0,00	176.666.711,00	0,00	6.606.404,00
Pendapatan Denda Reklamasi	1.667.006.774,00	1.166.617.136,00	70,01	212.706.000,00
Pendapatan Persepsi				
Pendapatan Denda Pajak	167.664.774,00	66.467.761,00	39,67	116.666.000,00
Pendapatan Denda Retribusi	646.646.774,00	26.666.366,00	4,12	36.667.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	667.666.666,00	0,00	206.666.666,00
Pendapatan B.L.H	76.666.000.126,00	66.776.000.126,00	79,27	66.666.666.776,00
Pendapatan Denda Pemeliharaan (M) yang Tidak Dipecahkan	0,00	766.400,00	0,00	1.000.000,00
Pendapatan Jasa Kegiatan Nasional (M) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (PKTP)	7.677.147.466,00	166.666.466,00	2,16	6.666.667.666,00
Pendapatan Denda atau Penggantian Persepsi Denda	0,00	6.766.000,00	0,00	46.000.000,00
Lain-lain PAD yang sah lainnya	0,00	64.167.666,00	0,00	16.666.766,00
<b>Jumlah</b>	<b>66.124.166.616,00</b>	<b>66.666.766.666,00</b>	<b>66,47</b>	<b>67.666.666.666,00</b>

**5.1.3.1. Pendapatan Transfer**

**Rp1.223.758.813.286,60**

Anggaran Pendapatan Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp1.223.465.397.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.223.758.813.286,60 atau 100,12% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan persentasenya sebesar Rp16.872.536.692,60 atau 10,54% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.046.886.280.394,21.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.7**  
**Pendapatan Transfer**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (M)	1.001.466.567.000,00	1.156.064.617.646,00	105,34	1.061.166.000.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	10.000.000.000,00	10.104.105.440,00	101,04	10.100.000.744,71
<b>Jumlah</b>	<b>1.121.488.827.800,00</b>	<b>1.122.748.812.280,00</b>	<b>100,12</b>	<b>1.108.105.292.994,71</b>

**5.1.1.3.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.125.094.817.866,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp1.121.465.147.900,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.123.094.817.866,00 atau 100,04% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Rp72.819.218.096,00 atau 6,49% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.051.145.398.850,00.

Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)Fiskal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fiskal, pendapatan paga anggaran dan dana transfer pemerintah pusat anggaran pada Peraturan Presiden yang meniadakan APBN dan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2021. Paga dan realisasi pendapatan transfer dapat ditrasi sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	287.878.212.000,00	284.271.008.811,00	98,78	282.304.007.478,00
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dana Hasil - LRA				
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	801.824.822.400,00	800.634.214.440,00	99,85	801.448.000.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fiskal	118.207.262.000,00	113.001.807.470,00	95,59	84.805.000.271,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fiskal	118.018.402.000,00	77.064.400.420,00	65,32	92.118.000.700,00
Dana Transfer Daerah (DSD)	2.401.800.000,00	2.401.800.000,00	100,00	24.100.174.000,00
Dana Dana	77.474.835.000,00	77.474.835.000,00	100,00	24.478.210.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.121.488.827.800,00</b>	<b>1.122.094.812.280,00</b>	<b>100,04</b>	<b>1.081.105.292.994,71</b>

**5.1.1.3.1.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp564.277.408.788,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp287.878.212.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp564.277.408.788,00 atau 116,87% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebesar Rp102.008.010.509,00 atau 18,87% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp262.369.297.479,00.

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan realisasi pendapatan tagihan daerah hasil pajak dalam Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.9**  
**Dana Bagi Hasil Pajak**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
DBH Pajak Hasil dari Perdagangan	44.448.224.000,00	113.318.171.807,00	254,97	60.000.000.000,00
<b>DBH Pajak</b>	<b>44.448.224.000,00</b>	<b>113.318.171.807,00</b>	<b>254,97</b>	<b>60.000.000.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Uraian PPN Pasal 20 dari pasal 23 ayat (2) PP No. 21/2017	0,00	89.007.000,00	0,00	78.704.400,00
Uraian Dana Hasil Tambahan (DHT)	1.000,00	0,00	0,00	300,00
Uraian Bantuan Daya Alam (BDA) Monev dari	1.852.493.000,00	833.888.276,00	0,00	102.000.000,00
Uraian Bantuan Daya Alam (BDA) dari Pusat	0,00	2.700.000.000,00	0,00	1.475.273.211,00
Uraian Bantuan Daya Alam (BDA) Monev dan Data Daerah (Monev dan Data Daerah)	270.800.400.000,00	18.300.171.000,00	0,00	80.075.940.100,00
Uraian Bantuan Daya Alam (BDA) Monev dan Data Daerah (Monev dan Data Daerah)	0,00	270.870.141.000,00	0,00	110.700.770.000,00
Kebijakan: Pindah Nomor Rekening (PNR)	0,00	9.200.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00
Uraian Bantuan Daya Alam (BDA) Kebijakan dari lain daerah	12.000.000.000,00	40.100.000,00	0,27	120.100.000,00
Uraian Bantuan Daya Alam (BDA) Peralihan	1.000.000.000,00	2.770.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>207.870.210.000,00</b>	<b>394.877.000.000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>302.200.007.870,00</b>

**5.1.2.3.3. Dana Alokasi Umum (DAU)**

**Rp500.624.214.443,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp500.624.214.443,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp500.624.214.443,00 atau 100,00% dari realisasi yang ditanggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami penurunan persentase sebesar Rp11.624.335,00 atau 0,10% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp512.248.579.443,00.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat dalam Tahun Anggaran 2022, yang menjadi hak Kabupaten Barito Utara yang terdiri dari:

Tabel 5.10  
**Dana Alokasi Umum**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU) - DA	500.624.214.443,00	500.624.214.443,00	100,00	487.922.000.000,00
Dana Tambahan Subangan Pendapatan dan Laba-laba Penghasilan Tetap dan Perolehan dengan Pendirian	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>500.624.214.443,00</b>	<b>500.624.214.443,00</b>	<b>100,00</b>	<b>527.922.000.000,00</b>

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 22 Tahun 2001). Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang berdasarkan pada aspek pemerataan dan kondisi yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungannya Dana Alokasi Umumnya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

**5.1.2.3.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

**Rp190.156.296.890,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp232.225.874.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp190.156.296.890,00 atau 81,90% dari realisasi yang ditanggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan persentase sebesar Rp13.211.212.919,00 atau 7,47% dari realisasi pendapatan Tahun



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2022

Anggaran 2022 sebesar Rp176.942.081.971,00.

Perpartian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa "Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari Anggaran Dasar (DAS) Tahun Anggaran 2022 yang ditransfer terdiri dari:

Tabel 8.11  
**Dana Alokasi Khusus (DAK)**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	118.291.207.476,00	113.291.207.476,00	97,38	99.829.698.271,38
Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	118.078.498.000,00	77.094.408.400,00	65,42	66.718.295.768,29
Jumlah	236.369.705.476,00	190.385.685.876,00	81,28	166.547.994.039,67

**8.1.3.3.5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

**Rp113.291.207.476,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan sebesar Rp118.291.207.476,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp113.291.207.476,00 atau 97,32%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 yang ditransfer terdiri dari:

Tabel 8.12  
**Rincian Dana Alokasi Khusus**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	1.016.488.200,00	898.079.320,00	88,38	473.274.400,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	18.099.807.200,00	25.288.291.400,00	139,79	21.000.708.840,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	18.279.088.000,00	12.878.440.800,00	70,48	14.873.680.320,00
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMA	879.008.000,00	600.511.700,00	68,32	0,00
5	DAK Fisik Bidang Pendidikan Atas Dasar	0,00	0,00	0,00	4.887.408.290,00
6	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Program Kesehatan Ibu dan Anak	0,00	14.214.478.800,00	0,00	0.007.327.200,00
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Program Pelayanan Kesehatan Dasar	18.348.752.000,00	0,00	0,00	6.794.872.260,00
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Program Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	2.887.505.704,00
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	0,00	1.448.878.000,00	0,00	0,00
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	2.964.803.000,00	2.478.843.180,00	83,31	1.887.281.400,00
11	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler SD	200.296.000,00	200.296.000,00	100,00	178.000.000,00
12	DAK Fisik Bidang Instansi Pusat dan Perangkat	0,00	0,00	0,00	2.887.281.800,00
13	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler	11.811.841.000,00	10.048.527.480,00	112,70	518.790.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
	<b>Relevansi Program PAB</b>				
	<b>Daerah Pengembangan Pertanian</b>				
14	DAK Non Fisik Bidang Jasa - Pengawasan Jasa	4.166.741.000,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan Perikanan - Pengawasan	0,00	0,00	0,00	1.243.336.810,00
16	DAK Non Fisik Bidang Jasa - Pengawasan Jasa	8.208.848.000,00	14.036.475.289,00	170,87	92.447.294.084,00
17	DAK Non Fisik Bidang Air - Irigasi	2.751.324.000,00	4.707.246.000,00	170,96	212.493.490,00
18	DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan Air - Pengawasan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyelidikan Penyediaan Sumber Daya Manusia Masyarakat	0,00	794.183.000,00	0,00	0,00
19	DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan Air - Air Bersih - Pengawasan Pelayanan Dasar Perumahan	0,00	897.227.819,00	0,00	
20	DAK Non Fisik Bidang Air - Irigasi - Pengawasan	0,00	0,00	0,00	757.000.000,00
21	DAK Non Fisik Bidang Kesehatan - Riset	2.250.000.000,00	2.200.000.000,00	97,78	394.887.400,00
22	DAK Non Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Pengawasan Lingkungan (Risiko)	1.200.000.000,00	1.284.312.000,00	107,02	0,00
23	DAK Non Fisik Bidang Jasa - Pengawasan - Kesehatan	0,00	2.716.892.000,00	0,00	0,00
24	DAK Non Fisik Bidang Riset - Pengawasan	2.441.116.000,00	3.416.000.000,00	139,53	6.814.274.877,00
25	DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan Air - Riset Lingkungan Kesehatan - Daerah Kesehatan	10.001.201.000,00	11.036.804.000,00	110,35	387.207.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>116.207.388.865,00</b>	<b>113.091.885.479,00</b>	<b>97,32</b>	<b>94.614.886.277,00</b>

**5.1.2.3.6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp77.064.455.420,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyediakan sebesar Rp14.618.492.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp77.064.455.420,00 atau 66,42%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 yang diterima terdiri dari:

Tabel 5.12  
 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik  
 Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Non Fisik-2022-Pengawasan	21.207.475.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DAK Non Fisik-2022-Riset	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DAK Non Fisik-2022-PAB	36.187.000.000,00	47.036.475.289,00	129,98	48.275.084.084,00
4	DAK Non Fisik-Tanah Goro (Risiko)	1.887.000.000,00	4.848.814.070,00	257,44	16.802.751.200,00
5	DAK Non Fisik-2022-Lingkungan Hidup	4.126.000.000,00	2.284.798.000,00	55,38	1.790.954.000,00
6	DAK Non Fisik-2022-PAB	3.800.140.000,00	0,00	0,00	3.892.217.000,00
7	DAK Non Fisik-DAK-Pembinaan Kesehatan	887.100.000,00	817.000.000,00	92,09	1.294.800.000,00
8	DAK Non Fisik-2022-BCA	21.339.817.000,00	18.712.328.000,00	87,70	18.771.488.000,00
9	DAK Non Fisik-Pembinaan Perencanaan Madya	408.871.000,00	176.418.000,00	43,15	0,00
10	DAK Non Fisik-2022-BCA-2022-1. Jaminan Persewaan	127.124.000,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-2022-BCA-2022-2. Riset	2.754.376.000,00	1.276.347.000,00	46,35	802.883.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pengantar Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	1.209.194.804,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
12	DAK Non-Fiskal Dana Percepatan Pertumbuhan Pemerintahan dan Area	0,00	897.442.000,00	0,00	0,00
14	DAK Non-Fiskal-DEKRAL-DEKRAL	0,00	8.898.452.775,00	0,00	8.898.452.775,00
18	DAK Non-Fiskal Dana Katalisis Program Dan Jaringan	822.000.000,00	820.126.000,00	99,89	543.790.863,00
	<b>Jumlah</b>	<b>822.000.000,00</b>	<b>9.715.990.825,00</b>	<b>99,42</b>	<b>9.442.236.648,00</b>

**3.1.2.3.7. Dana Insentif Daerah (DID) Rp2.461.865.000,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp2.461.865.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.461.865.000,00 atau 100,00% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami Peningkatan sebesar Rp23.564.714.000,00 atau 99,54% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp24.028.179.000,00

Pendapatan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya yaitu Dana Insentif Daerah, yang secara ringkas untuk Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Dana Insentif Daerah (DID)**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	2.461.865.000,00	2.461.865.000,00	100	20.528.179.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.461.865.000,00</b>	<b>2.461.865.000,00</b>	<b>100</b>	<b>20.528.179.000,00</b>

**3.1.2.3.8. Dana Desa Rp77.474.633.000,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp77.474.633.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp77.474.633.000,00 atau 100,00% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami Peningkatan sebesar Rp17.002.066.000,00 atau 18,00% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp96.476.600.000,00

Pendapatan yang berasal dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak, yang dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Dana Desa**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Desa	77.474.633.000,00	77.474.633.000,00	100	96.476.600.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>77.474.633.000,00</b>	<b>77.474.633.000,00</b>	<b>100</b>	<b>96.476.600.000,00</b>

**3.1.2.3.9. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp88.754.193.443,60**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp88.754.193.443,60 atau 443,77% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.833.311.894,39 atau 94,12% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41.720.883.744,21. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dapat disajikan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERKAWAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2022

**Tabel 5.16**  
**Pendapatan Transfer Antar Daerah**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.000.000.000,00	88.004.195.440,00	440,02	40.732.002.744,21
Bantuan Anggaran Jumlah	0,00	98.004.195.440,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>88.004.195.440,00</b>	<b>440,02</b>	<b>40.732.002.744,21</b>

**5.1.2.3.10. Pendapatan Bagi Hasil**

**Rp88.004.195.440,00**

Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp88.004.195.440,00 atau 440,02% dari realisasi yang ditanggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp42.823.311.896,39 atau 95,79% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.236.453.783,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.17**  
**Pendapatan Bagi Hasil**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.000.000.000,00	88.004.195.440,00	440,02	40.732.002.744,21
<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>88.004.195.440,00</b>	<b>440,02</b>	<b>40.732.002.744,21</b>

**5.1.2.3.11. Bantuan Keuangan**

**Rp150.000.000,00**

Anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp0,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp150.000.000,00 atau 0,00% dari realisasi yang ditanggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp150.000.000,00 atau 100% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1,00.

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 seperti sebagai berikut:

**Tabel 5.18**  
**Bantuan Keuangan**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah bentuk sumbangan kebina keluarga yang ditransfer melalui Kas Daerah yang belanjanya ditanggarkan pada program kegiatan keluarga.

**5.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

**Rp20.122.478.837,00**

Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp0,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp20.122.478.837,00 atau 0,00% dari realisasi yang ditanggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan pada tahun 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp2.882.000.163,00 atau 11,79% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.804.499.000,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Barito



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2022

Utara Tahun Anggaran 2022 berasal dari pihak ketiga (Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri) dan pendapatan Hibah Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yakni berupa dana BOS dan Bonus Pendidikan yang tidak dibagikan dalam APBD yang sudah dibagikan dalam Laporan Realisasi APBD.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.19**  
**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Lain**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah dan Sumbangan Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan	0,00	20.122.479.877,00	0,00	20.204.488.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>20.122.479.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.204.488.000,00</b>

**5.1.3.3. Lain-Lain Pendapatan Sosial dengan Rp10.122.479.877,00**

**Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Lain-lain Pendapatan ini berasal dari pemerintah pusat/daerah lainnya yang dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.20**  
**Lain-lain Pendapatan Sosial dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	20.112.701.677,00	0,00	20.700.488.000,00
Pendapatan atau Pengembalian Hibah Lainnya	0,00	0.747.000,00	0,00	10.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>20.122.479.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.204.488.000,00</b>

**5.1.3.4. Belanja Rp1.268.831.766.307,23**

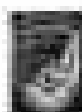
Anggaran Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp1.413.394.897.170,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.268.831.766.307,23 atau 87,30% dari realisasi yang dibagikan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 melampaui realisasi sebesar Rp172.390.387.314,42 atau 15,71% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.096.531.378.790,81.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang dibagi sesuai dengan jenis pengeluarannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.21**  
**Realisasi Belanja**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Operasi	967.467.200.000,00	875.702.084.007,23	90,41	711.229.927.000,00
Belanja Modal	225.424.773.740,00	292.287.458.000,00	129,89	124.124.280.000,00
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	199.323.000.000,00	79.799.229.800,00	39,89	140.222.287.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.402.214.973.740,00</b>	<b>1.268.831.766.307,23</b>	<b>87,30</b>	<b>1.004.656.274.100,00</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**5.1.2.4.2.1. Belanja Operasi**

**Rp816.703.088.907,00**

Anggaran Belanja Operasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp967.497.819.803,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp816.703.088.907,00 atau 84,41% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mencapai kemakluman sebesar Rp65.178.453.351,00 atau 6,77% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp751.524.627.556,00.

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.22**  
**Realisasi Belanja Operasi**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	816.061.388.088,00	620.782.222.912,00	84,59	400.390.714.300,00
2	Belanja Barang dan Jasa	608.861.443.816,00	347.802.002.096,00	57,11	287.040.444.107,00
3	Belanja Subsidi	2.000.200.000,00	18.798.000,00	0,94	82.000.000,00
4	Belanja Hibah	17.371.878.268,00	13.106.879.827,00	75,45	24.433.404.780,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.682.090.000,00	2.400.200.878,00	89,51	2.287.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.524.973.909.172,00</b>	<b>816.703.088.907,00</b>	<b>84,41</b>	<b>705.203.827.887,00</b>

Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp967.497.819.803,00 telah terealisasi Rp816.703.088.907,00 atau 84,41 dari Anggaran. Realisasi Tahun 2022 mencapai kemakluman sebesar Rp65.178.453.351,00 atau 6,77% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp751.524.627.556,00 dengan rincian dan penjelasan disajikan sebagai berikut:

**5.1.2.4.2.1.1. Belanja Pegawai**

**Rp413.763.233.912,00**

Anggaran Belanja Pegawai untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp336.661.366.688,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp413.763.233.912,00 atau 84,41% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mencapai kemakluman sebesar Rp4.711.829.635,00 atau 1,05% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp425.054.404.307,00.

Rincian Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tunjangan Peningkatan, Tunjangan Operasional KHP/WEDH dan Penertarikan pimpinan & anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dan Belanja Honorarium PNS/Non PNS dan Uang Lembur dengan Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2022 pada SKPD Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.23**  
**Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan SKPD**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DINAS PERKOTAAN	288.465.246.000,00	224.212.124.311,00	84,59	220.774.850.000,00
2	DINAS KESEHATAN	18.481.748.788,00	91.207.207.172,00	32,24	89.213.544.999,00
3	DINAS PERKOTAAN BARU	9.088.283.700,00	8.847.919.440,00	97,36	8.074.004.000,00
4	DINAS PERUBAHAN RUMAH TINGGAL, KEMUKHAAN PERMUKAWAHAN DAN PERTANAIAN	3.098.000.000,00	2.895.188.797,00	94,44	2.871.476.000,00
5	LAPORAN POLRES BARITO	4.282.789.888,00	3.797.808.201,00	88,69	3.808.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
6	BELANJA PENGADAAN BARANG MENCAM, TERDIRI DARI: (01)...	2.272.828.817,00	2.142.182.141,00	94,24	2.042.872.421,00
7	PENYEDIAAN MATERIAL DAN JASA DAN/ATAU PERUSAHAAN TIKAS/INDUSTRIAL, SUPPLAI DAN LAIN	1.298.021.874,00	1.278.740.274,00	97,99	1.722.228.472,00
8	TOKO PENYEDIAAN PENDUKUNG DAN/ATAU PENGENDAIAN DAN PENGUNJUNG JINTE	1.038.027.032,00	1.022.242.782,00	98,48	1.824.492.000,00
9	DINAS KEJARANAN PANGKAS DAN KETERANGAN	4.642.202.007,00	4.492.728.724,00	96,78	4.222.222.880,00
11	DINAS KEKAWAHLAN NEGARA	1.244.224.244,00	1.224.222.824,00	98,42	1.072.222.222,00
12	DINAS KEPERAWATAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.008.822.244,00	1.078.777.724,00	106,88	1.222.222.222,00
13	DINAS PERUSAHAAN TINGGI RUMAH SAKIT	4.224.278.222,00	4.274.222.722,00	101,19	4.222.222.222,00
14	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	2.422.278.222,00	1.992.278.222,00	82,27	2.272.222.222,00
15	DINAS PERANJARAN NEGARA DAN PELAYANAN BERKEMAH SATU PINTU	2.722.222.222,00	2.222.222.222,00	81,27	2.422.222.222,00
16	DINAS KEARIFAN DAN PENGUNJANGAN DINAS KEKAWAHLAN	2.872.222.222,00	2.872.222.222,00	100,00	2.222.222.222,00
17	MANAJEMEN, PEMERIKSAAN DAN KONTROL	2.222.222.222,00	2.122.222.222,00	95,51	2.072.222.222,00
18	DINAS PERENCANAAN DAN KONTROL	11.222.222.222,00	11.222.222.222,00	100,00	11.222.222.222,00
19	DINAS PERENCANAAN DAN KONTROL	2.222.222.222,00	2.222.222.222,00	100,00	2.222.222.222,00
20	DEKONTAMINASI DAN KONTROL	11.222.222.222,00	11.222.222.222,00	100,00	11.222.222.222,00
21	BAGIAN PERENCANAAN DAN KONTROL	2.222.222.222,00	2.222.222.222,00	100,00	2.222.222.222,00
22	BAGIAN PERENCANAAN DAN KONTROL	2.222.222.222,00	2.222.222.222,00	100,00	2.222.222.222,00
23	BAGIAN PERENCANAAN DAN KONTROL	2.222.222.222,00	2.222.222.222,00	100,00	2.222.222.222,00
24	BAGIAN PERENCANAAN DAN KONTROL	2.222.222.222,00	2.222.222.222,00	100,00	2.222.222.222,00
25	BAGIAN PERENCANAAN DAN KONTROL	2.222.222.222,00	2.222.222.222,00	100,00	2.222.222.222,00
26	BAGIAN PERENCANAAN DAN KONTROL	2.222.222.222,00	2.222.222.222,00	100,00	2.222.222.222,00
27	KDC TEMPAH TERBUKA	1.222.222.222,00	1.222.222.222,00	100,00	1.222.222.222,00
28	KDC TEMPAH TERBUKA	1.222.222.222,00	1.222.222.222,00	100,00	1.222.222.222,00
29	KDC TEMPAH TERBUKA	1.222.222.222,00	1.222.222.222,00	100,00	1.222.222.222,00
30	KDC TEMPAH TERBUKA	1.222.222.222,00	1.222.222.222,00	100,00	1.222.222.222,00
31	KDC MOKYALAT	1.222.222.222,00	1.222.222.222,00	100,00	1.222.222.222,00
32	KDC TEMPAH TERBUKA	1.222.222.222,00	1.222.222.222,00	100,00	1.222.222.222,00
33	KDC TEMPAH TERBUKA	1.222.222.222,00	1.222.222.222,00	100,00	1.222.222.222,00
34	KDC TEMPAH TERBUKA	1.222.222.222,00	1.222.222.222,00	100,00	1.222.222.222,00
35	KDC TEMPAH TERBUKA	1.222.222.222,00	1.222.222.222,00	100,00	1.222.222.222,00
36	BAGIAN PERENCANAAN DAN KONTROL	2.222.222.222,00	2.222.222.222,00	100,00	2.222.222.222,00
	<b>Jumlah</b>	<b>612.222.222.222,00</b>	<b>422.222.222.222,00</b>	<b>68,98</b>	<b>422.222.222.222,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai per objek belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.24  
Realisasi Belanja Pegawai per Objek  
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Jumlah Belanja Pegawai	222.222.222,00	222.222.222,00	100,00	222.222.222,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Tambahan Penghasilan Asli	128.424.264.814,00	88.021.800.000,00	68,55	88.122.254.281,00
Tambahan Penghasilan bertambahan Perpajakan Diyakini Lainnya ASB	56.227.383.870,00	74.426.777.487,00	132,54	75.740.194.048,00
Belanja Dali dan Terjamin DPYB	13.073.789.209,00	11.942.708.723,00	91,32	12.284.507.222,00
Belanja Dali dan Terjamin KORPORASI	189.486.000,00	191.274.494,00	101,02	189.028.027,00
Belanja Pembiayaan Lainnya Prinsipal DPYB serta KTA/KWTA	788.029.278,00	788.822.278,00	100,10	871.600.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BKD	773.625.000,00	438.750.000,00	56,71	387.334.240,00
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Pemungutan Membayar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Jasa Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
Biaya Jasa Perawatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>318.907.369.991,00</b>	<b>431.293.214.222,00</b>	<b>135,26</b>	<b>438.284.494.187,00</b>

**5.1.2.4.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp347.403.933.299,88**

Anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan sebesar Rp408.941.443.875,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp347.403.933.299,88 atau 84,93% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD.

Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp49.758.039.132,00 atau 16,72% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp297.645.444.167,00.

Rincian belanja barang dan jasa berdasarkan SKPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.25**  
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan SKPD**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Nama SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DINAS PERUMAHAN	42.721.090.423,00	48.828.128.722,00	114,32	47.478.988.088,00
2	DINAS KESEHATAN	88.718.382.887,00	83.423.028.100,00	93,97	73.028.478.400,00
3	BKAD BUKU	79.417.889.250,00	88.997.482.884,00	112,06	0,00
4	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PEKERJAAN UMUM DINAS PERUMAHAN KOTA/KAB DINAS PERUMAHAN KOTA/KAB	32.189.878.873,00	28.984.388.228,00	90,02	22.128.224.562,00
5	KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERTANYAIAN	1.242.004.897,00	1.277.987.183,00	102,87	1.242.004.897,00
6	SATUAN POLICE PAMONGSARI	4.424.498.855,00	4.278.798.400,00	96,49	0.000.000.000,00
7	BALAI PERANGKULAN DAN MENCANA DASAR	14.828.883.821,00	11.158.274.282,00	75,13	8.222.521.768,00
8	PEMBERONJAWAN MASYARAKAT DAN DESA	4.028.024.267,00	3.028.212.872,00	75,19	3.481.281.711,00
9	DINAS PERENCANAAN PERALOKAN DAN HAL PERENCANAAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ASAS	4.818.828.790,00	3.727.220.778,00	77,35	3.447.822.264,00
10	DINAS KEKAWASAN PERAGAN DAN PERUMAHAN	3.188.287.260,00	3.028.040.782,00	94,97	3.287.282.228,00
11	DINAS LINGKUNGAN TERUP	8.228.842.789,00	7.127.262.827,00	86,62	4.127.262.827,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BAITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

No.	Nama OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
13	UNIT PELAKSANAAN DAN PELAYANAN UMUM	1.065.128.880,00	1.000.500.070,00	94,79	1.144.432.984,00
14	UNIT PELAKSANAAN	3.407.841.414,00	2.762.080.888,00	81,18	2.404.149.488,00
15	UNIT KEMERDEKAAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	2.121.190.700,00	2.016.002.880,00	95,28	2.017.000.447,00
16	UNIT PERANGKAMAN, SARANA DAN PELAYANAN TERPADU BAKTI PRATI	1.408.080.000,00	1.121.498.242,00	79,68	1.071.008.242,00
17	UNIT KEARIFAN DAN PERILISARAHAN	1.214.007.212,00	1.187.194.887,00	98,00	1.023.000.000,00
18	UNIT KEMERDEKAAN, PARTISIPASI, PEMUDA DAN OLIMPADA	3.407.890.777,00	4.887.014.823,00	143,70	3.070.001.760,00
19	UNIT PERKAWASAN	17.348.026.118,00	17.348.710.000,00	100,00	1.381.000.000,00
20	UNIT PERENCANAAN DAN PENGANTARAN	3.064.150.000,00	3.208.810.371,00	104,70	3.070.000.000,00
21	KECAMATAN TAMBORA	21.181.841.800,00	18.808.848.790,00	88,81	14.080.100.000,00
22	KECAMATAN TOLITOLI	3.824.078.400,00	3.504.040.043,00	91,91	3.889.000.000,00
23	SARANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PERKAWASAN DAN PERENCANAAN DAERAH	1.188.798.100,00	1.002.000.000,00	84,38	1.000.000.000,00
24	SARANA PERENCANAAN KEMERDEKAAN DAN BERT	4.070.000.000,00	4.104.101.000,00	100,80	4.400.000.000,00
25	SARANA PERENCANAAN PERENCANAAN DAN PENGANTARAN	2.008.717.000,00	2.007.000.000,00	99,92	2.000.000.000,00
26	PERENCANAAN DAN PENGANTARAN DAERAH	2.188.004.000,00	2.008.000.000,00	91,77	1.710.770.000,00
27	KECAMATAN SIKOLU	24.212.007.000,00	21.138.411.400,00	87,30	18.000.000.000,00
28	KDC. TEWAHI TONGAH	1.804.210.000,00	1.890.104.000,00	104,77	1.700.000.000,00
29	KDC. TEWAHI TAMBORA	980.070.000,00	980.000.000,00	99,99	980.000.000,00
30	KDC. LUMBU	887.000.000,00	887.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
31	KDC. WILAJANG YEMANG	1.000.000.000,00	1.070.770.000,00	107,07	800.000.000,00
32	KDC. MONTALAY	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00	92,30	1.000.000.000,00
33	KDC. SUNGAI PANG	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	800.000.000,00
34	KDC. TEWAHI SIKOLU	1.400.000.000,00	1.300.000.000,00	92,85	1.100.000.000,00
35	KDC. TEWAHI SELATAN	980.000.000,00	980.000.000,00	100,00	980.000.000,00
36	KDC. LUMBU KAWA	900.000.000,00	790.000.000,00	87,77	700.000.000,00
37	SARANA KEKAWAAN BANGGA DAN POLTRIS	1.188.710.000,00	1.140.040.470,00	95,93	1.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>408.840.000.000,00</b>	<b>387.400.000.000,00</b>	<b>94,76</b>	<b>387.000.000.000,00</b>

Redistribusi Eksternal Belanja Barang dan Jasa per Objek Belanja Dapat Ditahan pada

Tabel berikut:

**Tabel 5.25**  
**Belanja Barang dan Jasa Per objek**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.	Urutan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Tidak Tetap	80.180.000.000,00	87.500.470.000,00	109,13	41.370.000.000,00
2	Belanja Barang Tetap	328.660.000,00	0,00	0,00	0.000.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	120.301.004.700,00	110.007.400.000,00	91,44	121.000.000.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi	10.004.000.000,00	8.010.000.000,00	79,99	0.000.000.000,00
5	Belanja Jasa Lain	0,00	0,00	0,00	0.000.000,00
6	Belanja Jasa Perawatan dan Merek	410.000.000,00	0.000.000,00	0,24	0.000.000,00
7	Belanja Jasa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0.000.000,00
8	Belanja Jasa Sewa Tanah Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
9	Belanja Jasa Perawatan Kendaraan	1.000.000.000,00	400.000.000,00	40,00	0.000.000,00
10	Belanja Jasa Perawatan dan Kendaraan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
11	Belanja Jasa Perawatan/ Layanan (Maintenance/Plumbing)	6.400.000,00	5.877.247,00	91,83	1.039.490,00
12	Belanja Sewa/Gedung/Perbaikan Gud	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
13	Belanja Kumpul/Pelatihan, Sosialisasi, Kampanye Tahunan serta Perbaikan dan Fasilitas	1.448.150.000,00	1.343.721.088,00	92,74	1.394.194.282,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Pengadaan dari APBN atau Perancangan/Peleburan Desain	148.000.000,00	173.948.354,00	117,53	181.799.490,00
15	Pengadaan dari APBD atau Perancangan/Peleburan Desain	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Perawatan/Peleburan Fasilitas	0,00	0,00	0,00	133.177.380,00
17	Belanja Perawatan/Peleburan per Mesin	4.887.448.240,00	4.289.078.270,00	87,76	3.831.271.882,00
18	Belanja Perawatan/Gedung dan Bangunan	2.622.001.620,00	2.973.848.301,00	113,38	2.607.782.878,00
19	Belanja Perawatan/UMK, Angkutan, dan Kapal	4.279.842.742,00	4.241.878.000,00	99,12	1.234.283.000,00
20	Belanja Perawatan/Asat/Traktor lainnya	0,00	0,00	0,00	17.889.000,00
21	Belanja Pengadaan/Diras/Diras/Proses	78.848.124.848,00	67.047.732.848,00	85,03	88.424.858.708,00
22	Belanja yang diberikan kepada Pihak Ketiga Pihak Lain Masyarakat	8.879.280.000,00	3.832.738.000,00	43,18	1.379.723.490,00
23	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga Pihak Lain Masyarakat	2.325.360.700,00	1.491.468.078,00	64,14	123.268.200,00
24	Belanja Barang dari Jasa Baku	15.848.384.000,00	15.574.804.377,00	98,28	16.234.888.000,00
25	Belanja Barang dari Jasa Baku	75.007.107.708,00	68.278.261.825,00	91,03	17.212.792.281,00
	<b>Jumlah</b>	<b>408.941.443.818,00</b>	<b>347.441.833.298,00</b>	<b>84,94</b>	<b>397.444.444.747,00</b>

**5.1.2.4.2.1.3. Belanja Subsidi Rp19.708.000,00**

Anggaran Belanja Subsidi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp19.708.000,00 atau 0,99% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD.

Belanja Subsidi untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebagaimana Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Hilah dan Bantuan Sosial Yang Berwujud Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara memfasilitasi baik kepada Anggota Masyarakat dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dengan tujuan sebagai berikut:

**Tabel 5.27**  
**Belanja Subsidi**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah	2.000.000.000,00	19.708.000,00	0,99	62.422.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>19.708.000,00</b>	<b>0,99</b>	<b>62.422.000,00</b>

**5.1.2.4.2.1.4. Belanja Hilah Rp13.186.872.821,00**

Anggaran Belanja Hilah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp17.111.879.280,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp13.186.872.821,00 atau 77,07% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.648.746.039,00 atau 10,98% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.538.126.782,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 merupakan Belanja Hibah yang terapan yang maupun terapan Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada badan lembaga organisasi secara administratif Pemerintah Daerah Barito Utara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 166, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.28**  
**Belanja Hibah**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	894.604.300,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Berwibawa, Sekolah dan Sosial yang Diwajibkan Perbaikan Fasilitas	22.048.204.000,00	22.225.245.000,00	99,97	19.246.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Hibah, Sekolah dan Sosial yang Telah Menerima Dana Hibah/Donasi	1.400.000.000,00	1.397.000.000,00	99,79	1.204.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Hibah, Dukungan Pemodal Sosial Komunitas/Relawan	1.010.000.000,00	1.000.000.000,00	99,00	1.000.701.400,00
5	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	4.000.000.000,00	3.999.202.000,00	99,98	4.000.000.000,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diawakui oleh Kabupaten	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	800.000.000,00
7	Belanja Hibah Bantuan Hibah/Donasi Kepada Partai Politik	700.000.000,00	697.204.000,00	99,60	697.204.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>30.918.204.000,00</b>	<b>30.108.851.000,00</b>	<b>97,37</b>	<b>28.696.000.700,00</b>

**5.1.2.4.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial**

**Rp2.499.332.875,00**

Anggaran Belanja Subsidy untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan sebesar Rp2.582.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.499.332.875,00 atau 97,21% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD.

**Tabel 5.29**  
**Belanja Bantuan Sosial**  
**Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Hibah	1.207.000.000,00	1.207.400.000,00	99,99	1.207.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Hibah/Donasi Masyarakat	400.000.000,00	340.000.000,00	85,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah Hibah/Donasi Pendidikan, Hibah/Donasi dan Dongeng Lainnya	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.407.000.000,00</b>	<b>2.347.400.000,00</b>	<b>97,51</b>	<b>1.207.000.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**5.1.2.4.2.2. Belanja Modal**

**Rp295.383.355.838,00**

Anggaran Belanja Modal untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp292.434.773.342,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp293.383.355.838,00 atau 100,99% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp109.198.983.741,00 atau 37,29% dari realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp184.184.390.098,00.

Akian ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan belanja dengan pengalihan barang dalam rangka pemeliharaan aset tetap daerah. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara meliputi pengalihan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 dan realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.20**  
**Belanja Modal**  
**Tahun Anggaran**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	1.028.000.184,00	102.000.120,00	10,00	100.000.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	75.000.017.342,00	88.470.700.000,00	117,95	88.000.000.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.400.000.000,00	112.000.000.000,00	95,40	75.000.000.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.000.000.000,00	112.000.000.000,00	112,00	94.000.000.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	490.432.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>292.434.773.342,00</b>	<b>293.383.355.838,00</b>	<b>100,99</b>	<b>184.184.390.098,00</b>

**5.1.2.4.2.2.1. Belanja Modal Tanah**

**Rp100.001.720,00**

Anggaran Belanja Modal Tanah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp2.000.000.154,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp100.001.720,00 atau 5,00% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp270.000.000,00 atau 100,11% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp100.000.000,00.

Realisasi belanja modal tanah Tahun 2022 meliputi pada satu SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perkotaan dan Perumahan, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan rincian berikut:

**Tabel 5.21**  
**Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan SKPD**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Nama SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERKOTAAN DAN PERUMAHAN	1.000.000.154,00	200.000.720,00	20,00	100.000.000,00
3	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.154,00</b>	<b>200.000.720,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100.000.000,00</b>

**5.1.2.4.2.2.3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

**Rp88.470.700.000,00**

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp75.000.017.342,00 dengan realisasi yang



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

dicapai sebesar Rp56.478.789.468,00 atau 87,91% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp27.173.263.587,00 atau 49,14% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.641.851.055,00.

Konsum Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3.33**  
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Nama OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DINAS PERKULIAHAN	2.811.041.000,00	2.147.751.000,00	76,38	22.807.000,00
2	DINAS PERKULIAHAN	25.344.000,00	17.490.700,00	68,90	8.000.000,00
3	KEPANTAIAN	4.783.000,00	3.492.870,00	73,03	206.770,00
4	DINAS PERKULIAHAN UMUM DAN PENYATAAN ISUASU	14.100.000,00	13.800.000,00	97,87	440.000,00
5	DINAS PERKULIAHAN UMUM DAN PENYATAAN ISUASU	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6	PELAJARAN DAN PEMERIKSAAN KETERANGAN	328.000,00	321.710,00	97,78	0,00
7	SALAH PENGUNCIAN DAN PENYATAAN ISUASU	18.741.000,00	18.887.000,00	100,83	4.000.000,00
8	KEPANTAIAN	38.000,00	38.000,00	100,00	4.000,00
9	TRANSKRIBSI, KOPERASI DAN USAHA	488.840.870,00	437.794.890,00	89,56	2.000,00
10	DINAS PERKULIAHAN PENYATAAN DAN PERKULIAHAN UMUM	43.400,00	43.470,00	99,93	0,00
11	DINAS PERKULIAHAN UMUM DAN PENYATAAN ISUASU	450.400,00	450.400,00	100,00	70.000,00
12	DINAS PERKULIAHAN UMUM DAN PENYATAAN ISUASU	2.702.190,00	2.043.234.140,00	75,59	500.000,00
13	DINAS PERKULIAHAN UMUM DAN PENYATAAN ISUASU	221.000,00	210.000,00	95,02	10.000,00
14	DINAS PERKULIAHAN UMUM DAN PENYATAAN ISUASU	380.000,00	380.000,00	100,00	170.000,00
15	KEPANTAIAN	200.000,00	200.000,00	100,00	10.000,00
16	DINAS PERKULIAHAN UMUM DAN PENYATAAN ISUASU	101.000,00	0,00	0,00	0,00
17	DINAS PERKULIAHAN UMUM DAN PENYATAAN ISUASU	794.000,00	692.877,00	87,26	17.000,00
18	TRANSKRIBSI, KOPERASI DAN USAHA	488.840.870,00	488.840.870,00	100,00	280.000,00
19	DINAS PERKULIAHAN UMUM DAN PENYATAAN ISUASU	380.000,00	380.000,00	100,00	30.000,00
20	DINAS PERKULIAHAN UMUM DAN PENYATAAN ISUASU	90.000,00	40.000,00	44,44	70.000,00
21	KEPANTAIAN	4.488.400,00	3.547.740,00	79,04	180.000,00
22	KEPANTAIAN	112.707.440,00	100.000.440,00	88,72	200.000,00
23	SALAH PENGUNCIAN DAN PENYATAAN ISUASU	740.000,00	700.000,00	94,59	0,00
24	SALAH PENGUNCIAN DAN PENYATAAN ISUASU	770.000,00	670.000,00	87,13	100.000,00
25	SALAH PENGUNCIAN DAN PENYATAAN ISUASU	180.000,00	180.000,00	100,00	0,00
26	SALAH PENGUNCIAN DAN PENYATAAN ISUASU	140.000,00	140.000,00	100,00	0,00









**PEMERINTAH KABUPATEN HARAU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR DI DESEMBER 2022 DAN 2021

No	Nama SPPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
11	BIAYA OPERASIONAL JANGKA MENENGAH PANGKALAN, PERUSAHA DAN GLAFERONG	4.411.000.000,00	4.431.488.118,00	100,24	701.794.888,00
12	BIAYA PERUSAHAAN	6.148.730.512,00	3.267.472.190,00	53,16	0,00
13	BIAYA PERUSAHAAN DAN PERINDUSTRIAN	191.000.000,00	190.244.880,00	99,60	1.788.214.000,00
14	SALAH PERSELESAI PENGAWATAN DAN PAM	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
15	BIAYA SANGKUT SPPD	784.000.000,00	875.000.000,00	111,61	1.277.171.320,00
16	KAC. TUNJUK TERANG	0,00	0,00	0,00	75.700.000,00
17	KAC. LAIN	100.450.000,00	99.804.000,00	99,42	92.800.000,00
18	KAC. MONTIRLET	0,00	0,00	0,00	498.117.400,00
19	KADAL KESEKUTAN BANGUNAN DAN POLTAN	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>110.488.220.421,00</b>	<b>110.487.781.218,00</b>	<b>99,99</b>	<b>78.788.780.388,00</b>

Selanjutnya realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Obyek belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.25**  
**Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Obyek**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung, Tempat Parkir	110.724.820.421,00	111.304.862.218,00	99,58	71.788.011.880,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung, Tempat Drogal	1.300.000.000,00	1.310.788.000,00	99,72	0,00
3	Belanja Modal Pembangunan Pemukiman Perkotaan	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Bangunan Tugu TBM Kantor Pusat	1.078.000.000,00	874.207.000,00	81,19	800.100.000,00
5	Belanja Modal Pembangunan Bangunan Pemukiman Lahan Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Bangunan Pemukiman Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>113.492.820.421,00</b>	<b>113.585.850.218,00</b>	<b>99,99</b>	<b>78.788.780.388,00</b>

**5.1.1.4.2.1.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp112.512.217.795,00**

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan sebesar Rp126.178.017.825,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp112.512.217.795,00 atau 89,17% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp47.749.021.280 atau 41,46% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp64.763.196.512,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 5.26**  
**Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SPPD**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Nama SPPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAKAS PT PERUSAHAAN	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	7.380.000,00
2	DAKAS KESEKUTAN DINAS PERUSAHAAN	4.880.000.000,00	4.847.000.000,00	99,32	2.277.500.000,00
3	LEMBAGA DAN PELAYANAN BUNDA DINAS PERUSAHAAN	120.000.000.000,00	121.100.171.380,00	100,92	88.881.241.000,00
4	DINAS PERUSAHAAN MANT. BANGUNAN	440.000.000,00	439.612.000,00	99,91	2.473.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARTO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DI DESEMBER 2022 DAN 2021

No	Nama DPP	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
	PERKAWASAN DAN KORTASMAS				
6	DANA LAKSUNGAN KORP	184.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	DANA PERTANIAN DANA	190.000.000,00	179.340.000,00	94,39	0,00
7	PERKAWASAN DAN KORTASMAS	17.000.000,00	11.000.000,00	64,71	43.830.000,00
8	LOKATAPSA, Jorong	90.000.000,00	84.780.400,00	94,31	25.150.000,00
9	KEC. TAYEH TAYEH	0,00	0,00	0,00	286.800.000,00
10	KEC. LAMP	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
11	KEC. MANTILAY	0,00	0,00	0,00	475.800.000,00
12	KEC. TAYEH BAKI	0,00	0,00	0,00	226.000.000,00
	Jumlah	129.170.000.000,00	112.871.270.780,00	87,41	84.740.180.000,00

Sebagian realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Irigasi per Objek belanja dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5.27**  
**Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Objek**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	26.320.812.400,00	26.307.100.170,00	99,95	24.707.907.100,00
2	Belanja Modal Jalan	27.277.800.100,00	26.000.700.000,00	95,32	17.710.407.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Air (Jalan Belanja Modal)	4.104.000.100,00	4.200.000.000,00	102,31	7.200.070.070,00
4	Bangunan Pengembangan Ruang dan Pagar Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bangunan Perumahan Zona Perkotaan dan Perkampungan Deserta, Kota Belanja Modal	12.000.000.000,00	4.400.000.000,00	36,67	1.000.000.000,00
6	Bangunan Pengembangan Ruang Air	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Bersih Kota	1.000.000.000,00	990.000.000,00	99,00	200.000.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Air Rukak Belanja Modal	1.170.400.000,00	1.171.200.000,00	100,00	2.400.000.000,00
9	Bangunan Air Bersih Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Instalasi Air Bersih Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah	0,00	0,00	0,00	10.070.070,00
13	Belanja Modal Instalasi Jalan Layu	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0.204.200.000,00	0.200.000.000,00	98,38	1.000.000.000,00
15	Belanja Modal Jaringan Lain	0.700.000.000,00	0.600.000.000,00	85,71	100.000.000,00
16	Belanja Modal Jaringan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0.000.000,00
17	Belanja Modal Instalasi Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Modal Pengembangan Instalasi Air Rukak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	129.170.000.000,00	112.871.270.780,00	87,41	84.740.180.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 TAHUN 2022 YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**5.1.1.1.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp486.432.620,00**

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menunjukkan sebesar Rp571.108.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp486.432.620,00 atau 85,17% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp206.113.880,00 atau 36,10% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp692.546.500,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 5.28**  
**Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SAKD**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Nama SKPS	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	UMK PANGKALAN	284.885.000,00	323.889.620,00	113,70	318.871.880,00
2	UMK LINGKUNGAN WADUK	118.000.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3	UMK BERSIHINGKUNGAN DAN PENYALUTANAN BERSIH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UMK PERKOTAAN	0,00	0,00	0,00	322.280.000,00
5	UMK KEMERAMAN DAN PENYALUTANAN	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00
6	UMK BERSUCIYAN, PANGKALAN, PERUSAHAAN DAN OLSHOUSE	131.203.000,00	123.983.000,00	94,50	21.810.000,00
7	RUANG PERUSAHAAN BERKAWAN DAN ASST	10.000.000,00	8.780.000,00	87,80	0,00
8	UMK TAWAN (UMK)	8.190.000,00	8.600.000,00	103,90	8.190.000,00
9	UMK LAIN	1.780.000,00	0,00	0,00	0.000.000,00
10	UMK TAWAN (UMK)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>671.008.000,00</b>	<b>486.432.620,00</b>	<b>72,49</b>	<b>692.546.500,00</b>

Selengkapnya realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.29**  
**Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Objek**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Urutan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Peralengkapan Turbidim	284.885.000,00	323.889.620,00	113,70	318.871.880,00
2	Belanja Modal Bahan Peralengkapan Turbidim (No. Benda Milik)	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3	Belanja Modal Peralengkapan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Belanja Bencana Alamiah	112.873.000,00	103.700.000,00	91,88	24.500.000,00
5	Belanja Modal alat Bencana Alamiah	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	8.780.000,00
6	Belanja Modal Lain-lain	0,00	0,00	0,00	8.210.000,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	440.000.000,00	8.700.000,00	1,98	198.280.000,00
8	Belanja Modal Peralengkapan (No. Benda Milik Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Peralengkapan (No. Benda Milik Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya APBD	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman dan/atau Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.1.2.4.2.3. Belanja Tak Terduga**

**Rp0,00**

Anggaran Belanja Tak Terduga untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp2.929.703.964,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami pemertanian sebesar Rp0,00 atau 100% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Tak Terduga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.40**  
**Belanja Tak Terduga**  
**Tahun Anggaran 2022**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tak Terduga	2.929.703.964,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.929.703.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.1.2.4.2.4. Belanja Transfer**

**Rp158.745.329.561,23**

Anggaran Belanja Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp160.573.097.861,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp158.745.329.561,23 atau 98,99% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami pemertanian sebesar Rp2.077.051.377,28 atau 1,31% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp158.822.381.138,81.

**5.1.2.4.2.4.1. Transfer Bagi Hasil**

**Rp2.441.566.961,23**

Anggaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp2.441.161.361,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp2.441.566.961,23 atau 99,97% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp188.881.623,23 atau 8,78% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.252.680.138,81.

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.41**  
**Transfer Bagi Hasil**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Retribusi Pemerintah Desa	2.150.087.072,00	1.888.746.864,01	87,80	1.896.277.046,01
2	Bagi Hasil Potensi Pajak Retribusi Pemerintah Desa	1.472.476.000,00	940.871.100,00	63,90	748.407.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.622.563.072,00</b>	<b>2.829.617.964,01</b>	<b>77,82</b>	<b>2.644.684.146,01</b>

Kerangka Realisasi Tahun Anggaran 2022 merupakan transfer atau perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**5.1.2.4.4.1. Transfer Bantuan Keuangan** **Rp156.383.762.000,00**

Anggaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp136.889.454.500,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp156.383.762.000,00 atau 99,61% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi belanja pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.263.813.400,00 atau 1,43% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp158.649.676.000,00.

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 terdiri Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42  
**Transfer Bantuan Keuangan**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bantuan Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota ke Provinsi	488.000.000,00	488.000.000,00	100	0,00
2	Bantuan Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota ke Desa	0,00	77.476.000.000,00	0,00	84.470.000.000,00
3	Bantuan Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota ke Desa	188.404.304.000,00	78.546.128.000,00	94,08	84.282.377.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>188.884.304.000,00</b>	<b>134.024.128.000,00</b>	<b>99,61</b>	<b>168.752.377.000,00</b>

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kalimantan Tengah diperuntukkan untuk transfer melalui (Televisi) Tahun Anggaran 2021 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188/49/2021 tanggal 8 Januari 2021.

**Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran** **Rp83.446.811.591,46**

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperoleh Surplus sebesar Rp83.446.811.591,46 yang diperoleh dari realisasi Pendapatan sebesar Rp1.303.277.777.898,69 dikurangi Belanja sebesar Rp1.110.086.436.746,00 dan Transfer sebesar Rp158.743.329.561,23.

**5.1.2.5. Pembelian** **Rp181.827.894.545,39**

Anggaran Pembelian untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan sebesar Rp373.876.677.393,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp181.827.894.545,39 atau 49,18% dari realisasi yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pembelian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp134.157.249.320,80 atau 34,17% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp207.669.847.224,59.

Pembelian adalah transaksi keuangan detail yang dilakukan untuk menunjang aktifitas atau Pelayanan dan Belanja. Pembelian Pemerintah Kabupaten Barito Utara meliputi Pemeliharaan Pembelian Daerah dan Pengadaan Pembelian Daerah, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BARIO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2021

**Tabel 5.43**  
**Pembayaran**  
**Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Pembayaran Pembayaran	284.878.877.305,00	284.827.098.545,39	99,99	287.888.847.224,99
Penggunaan Pembayaran	11.000.000.000,00	1.000.000.000,00	9,09	0,00
Jumlah	295.878.877.305,00	285.827.098.545,39	100,00	287.888.847.224,99

**5.1.1.1. Pemertinaan Pembayaran**

**Rp284.827.098.545,39**

Pemertinaan Pembayaran adalah berasal dari Sisa Lebih Pembayaran APBD (SLPA) tahun lalu sebesar Rp284.827.098.545,39 atau 99,99% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp284.878.877.305,39 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.44**  
**Pemertinaan Pembayaran**  
**Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
SLPA Tahun Lalu	284.878.877.305,00	284.827.098.545,39	99,99	287.888.847.224,99
Pencapaian Rata Cakupan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	284.878.877.305,00	284.827.098.545,39	99,99	287.888.847.224,99

**5.1.1.2. Pengeluaran Pembayaran**

**Rp3.000.000.000,00**

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Bario Utara melaksanakan pengeluaran pembayaran sebesar Rp3.000.000.000,00.

**5.1.1.3. Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SLPA)**

**Rp465.273.128.136,85**

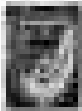
Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembayaran APBD (SLPA) atau Sisa Kurang Pembayaran APBD (SLPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan pemertinaan dibanding belanja dan pengeluaran dasar, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.45**  
**Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SLPA)**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	1.387.271.737.888,00	1.387.271.737.888,00	100,00	1.387.271.737.888,00
2	Belanja	1.382.841.859.305,00	1.192.098.438.748,00	86,29	1.384.201.378.782,99
3	Transfer	180.622.887.887,00	180.748.228.287,25	100,05	180.622.887.138,00
4	Sisa Lebih (Kurang)	(196.273.499.712,00)	328.228.528.427,25	(179,18)	137.209.828.288,99
5	Pembayaran Pembayaran	284.878.877.305,00	284.827.098.545,39	99,99	287.888.847.224,99
6	Penggunaan Pembayaran	11.000.000.000,00	1.000.000.000,00	9,09	0,00
7	Pembayaran Rata - Rata	295.878.877.305,00	285.827.098.545,39	100,00	287.888.847.224,99
	SLPA (SLPA) akhir	187.943.788.883,00	465.273.128.136,85	248,04	284.878.877.305,39

Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp187.943.788.883,00 terselasa Rp465.273.128.136,85 atau 248,04% mengahiri kasalan sebesar Rp80.298.438.831,46 atau sebesar 20,89% dari SLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp284.878.877.305,39.





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LISTRIK TARIK YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 (DAN 2021)

**5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Pertubuhan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

**5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal**

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SELPA tahun-tahun anggaran sebelum dan tahun berjalan serta penyusutan lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp465.271.128.136,83 Selangkar tahun 2021 sebesar Rp384.876.677.365,39.

**5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Pemertamaan Pembayaran Tahun Berjalan**

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Awal Tahun 2022 adalah saldo yang berasal dari akumulasi SELPA tahun-tahun anggaran sebelum dan tahun berjalan serta penyusutan lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp465.271.128.136,83 berasal dari Nilai SAL per 31 desember 2022 setelah dikurangi koreksi kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya TA 2022 tahun berjalan sebesar Rp(49.588.760.00) dan Tahun Penggunaan Sel sebagai pemertamaan pembayaran tahun berjalan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp384.876.677.365,39.

**5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Anggaran (SELPA/SIKPA)**

Sisa Lebih/Kurang Pembayaran Anggaran (SELPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta pemertaman dan penghapusan pembayaran dalam APBD selama 1 (satu) tahun periode pelaporan.

Sisa lebih/kurang tahun 2022 sebesar Rp465.271.128.136,83 selangkar tahun 2021 sebesar Rp384.876.677.365,39 merupakan SELPA pada LRA dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.48  
**Perhitungan SELPA pada LRA  
 Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan	1.202.277.787.888,00	1.210.128.028.813,01
2	Belanja	1.715.385.438.745,20	1.665.501.274.762,82
3	Saldo	148.144.219.847,20	180.606.754.050,19
4	Pembayaran (Sisa) 2021	83.248.227.321,48	117.208.830.260,48
5	Pemertamaan Pembayaran	391.817.089.845,39	347.808.174.054,39
6	Pemertamaan Pembayaran	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
7	Pembayaran tahun 12 - 9	361.827.046.545,39	347.808.174.054,39
	<b>SELPA (SELPA) 12-9</b>	<b>465.271.128.136,83</b>	<b>384.876.677.365,39</b>

**5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp(49.588.760.00)**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi kurang atau kesalahan pembukuan yang bertentangan dengan periode sebelumnya pada Tahun 2022 sebesar Rp(49.588.760.00) selangkar untuk tahun 2021 koreksi kesalahan pembukuan sebesar Rp0,00. Saldo Anggaran Lebih Akhir Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp465.271.128.136,83 selangkar Tahun 2021 sebesar Rp384.876.677.365,39.

**5.3. Neraca**

Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Utara terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atas Aset TA 2022 sebesar Rp5.790.111.800.044,31 Kewajiban sebesar Rp7.850.550.332,80 dan Ekuitas sebesar Rp3.782.265.309.822,31 Selangkar Aset TA 2021 sebesar Rp3.342.694.431.117,38 Kewajiban sebesar Rp43.061.689.554,64 dan Ekuitas sebesar Rp3.295.368.765.762,88.



**PEMERINTAH KABUPATEN BAHITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**5.3.1. Aset**

**31 Desember 2022**  
**Rp1.790.110.869.044,01**

**31 Desember 2021**  
**Rp1.342.636.459.737,00**

**Tabel 5.47**  
**Revisi Aset**  
**31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Nasib/Tumbuh	
			(%)	(Rp)
Aset Lancar	147.441.191.745,00	400.889.342.183,25	10,00	253.448.150.438,25
Investasi Jangka Panjang	718.024.945.299,00	735.391.892.170,00	0,00	167.211.424,00
Aset Tetap	3.397.467.333.499,00	3.797.498.271.200,00	4,00	132.437.333.400,00
Debit Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	245.198.745,00	2.542.358.786,75	44,00	2.297.160.041,75
<b>Jumlah</b>	<b>5.798.132.368.544,01</b>	<b>5.346.638.464.150,00</b>	<b>11,00</b>	<b>441.493.884.393,01</b>

**5.3.1.1. Aset Lancar**

**31 Desember 2022**  
**Rp147.441.191.745,00**

**31 Desember 2021**  
**Rp400.889.342.183,25**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset tidak kas yang diharapkan segera dapat dicairkan/dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp147.441.191.745,00 atau naik sebesar Rp83.544.819.543,17 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp63.896.342.183,25 dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5.48**  
**Revisi Aset Lancar**  
**31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Nasib/Tumbuh	
			(%)	(Rp)
Kas dan Setoran	478.195.395.141,00	308.004.294.247,50	27,00	170.191.090.893,50
Kas di Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BUKU	40.332.400.000,00	48.388.394.479,00	(18,00)	(7.755.994.479,00)
Kas yang DITR	1.399.658,00	453.893.270,00	29,77	(444.234.612,00)
Kas di Dana Investasi yang DITR	6.044.268.848,00	6.003.893.286,00	0,00	(40.375.562,00)
Kas Lainnya	1.972.488,00	4.104.811,00	64,28	(2.132.323,00)
Saldo Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisi Kas dan Setoran	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisi Kas di Bank	18.876.164.848,00	18.878.338.311,00	1,00	(2.172.163.463,00)
Revisi Kas yang DITR	608.857.748,00	18.232.941.440,00	29,00	(17.624.083.692,00)
Revisi Kas dan Setoran yang DITR	798.491.896,00	181.429.940,00	9,00	617.061.956,00
Revisi Kas Lainnya	1.101.198.860,00	873.879.000,00	27,00	227.319.860,00
Revisi Kas di Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisi Kas dan Setoran Lainnya	20.938.234.454,11	22.795.142.098,00	19,00	(1.856.907.643,89)
Revisi Lainnya	18.081.888,00	18.081.000,00	0,00	(88,00)
Revisi Kas yang DITR	31.993.441.800,00	4.268.393.600,00	6,00	27.725.048.200,00
Revisi Kas dan Setoran Lainnya	194.128.840,00	553.393.480,00	26,04	(359.264.640,00)
Revisi Lainnya	37.442.000.000,00	37.136.771.100,00	0,00	305.228.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>147.441.191.745,00</b>	<b>400.889.342.183,25</b>	<b>10,00</b>	<b>7.551.849.561,75</b>

**5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah**

**31 Desember 2022**  
**Rp18.558.385.141,00**

**31 Desember 2021**  
**Rp229.898.299.888,75**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kabupaten Bahrto Utara per 31 Desember 2022 pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, BNI Cabang Muara Treh.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 (SMP 2022)**

Bank BNI Cabang Muara Tumbuh dengan dan di rekening giro dan di rekening deposito.

**Tabel 5.48**  
**Kas di Kas Daerah**  
**31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Rasio (%)	
			2022	2021
Rekening Giro	418.008.388.141,00	338.004.388.347,00	27,81	90.004.000.000,00
- Kas di Kas BNI Muara Tumbuh	418.008.388.141,00	338.004.388.347,00	27,81	90.004.000.000,00
<b>Jumlah</b>				
Rekening Deposito				
50001010014001Rekening Kas Umum Daerah (RUD)	363.688.304.843,00	245.014.280.171,00	81,20	123.473.874.880,00
<b>Jumlah</b>				
500101000001Rekening Kasier (KAS) DAERAH	54.876.123.000,00	67.529.961.879,00	127,84	130.808.797.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>418.008.388.141,00</b>	<b>338.004.388.347,00</b>	<b>27,81</b>	<b>90.004.000.000,00</b>

Terjadi selisih pencatatan antara saldo bank dan saldo buku sebesar Rp 1.723,- merupakan kelebihan pengembalian belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika atas belanja bahan bakar minyak dan pelumas. Serta ada pengembalian dan dana BOS TA. 2011 sebesar Rp 38.145.000,- ke Rekening KAS Umum Negara.

**5.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pemertuan** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**  
**Rp 0,00** **Rp0,00**  
 Saldo kas di bendahara pemertuan per 31 Desember 2022 sebesar Rp selangit  
 Saldo kas di bendahara pemertuan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

**5.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**  
**Rp0,00** **Rp0,00**  
 Saldo kas di tingkat bendahara pengeluaran TA.2022 sebesar Rp0,00 selangit untuk tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

**5.1.1.1.4. Kas di BLUD** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**  
**Rp40.692.488.611,00** **Rp48.488.648.478,00**  
 Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan saldo kas BLUD RSUD Muara Tumbuh per 31 Desember 2022 pada 1 rekening Bank atas nama BLUD RSUD Muara Tumbuh dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.50**  
**Rekening BLUD RSUD Muara Tumbuh**  
**31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Rasio (%)	
			2022	2021
BNI Cabang Muara Tumbuh (Rea. 211218001)	40.692.488.611,00	48.488.648.478,00	100,00	17.796.248.487,00
<b>Jumlah</b>	<b>40.692.488.611,00</b>	<b>48.488.648.478,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.796.248.487,00</b>

Saldo rekening 1107282191 pada Bank BNI adalah rekening tambahan pemertuan BLUD yang mengalami pemertaan sebesar Rp17.796.248.487,- terdiri atas saldo Bank BLUD sebesar Rp19.993.948.766,00 merupakan saldo pada BNI. Kas di Bendahara (Tunai) Rp(1)671.412,00 Talangan Honor Karyawan sebesar Rp18.200.000,00. Kas di bendahara Dinkes yang telah di transfer ke Sak BLUD sebesar Rp003.828.818,00. Kelebihan pengembalian talangan Petri Rp1.308.819,-.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Saldo kas di BLUD TA 2022 sebesar Rp61.692.400.011,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp48.488.648.478,00 Adapun rekapitulasi saldo kas BLUD TA 2022 adalah sebagai berikut:

TRIMESTER	NO. BUNTI	URAIAN	NILAI PERSEKUTUAN	NILAI BELANJA	SALDO
01 Des 22		Saldo Awal	61.677.212.718		61.677.212.718
02 Des 22	00000000000000000000	Perimbangan Jasa Layanan Umum BLUD	4.240.207.887		65.917.420.605
03 Des 22	00000000000000000000	Saldo Simpanan dan Jasa BLUD		4.130.870.130	61.786.550.475
04 Des 22	00000000000000000000	Surplus Muti BLUD		100.782.800	61.887.333.275
01 Des 22	00000000000000000000	Perimbangan Jasa Layanan Umum BLUD	10.107.308.884		71.994.642.159
02 Des 22	00000000000000000000	Saldo Simpanan BLUD		107.790.800	72.102.432.959
03 Des 22	00000000000000000000	Saldo Simpanan dan Jasa BLUD		1.741.740.300	73.844.173.259
04 Des 22	00000000000000000000	Surplus Muti BLUD		10.270.800	74.914.974.059
01 Des 22	00000000000000000000	Perimbangan Jasa Layanan Umum BLUD	8.080.417.000		82.995.391.059
02 Des 22	00000000000000000000	Saldo Simpanan BLUD		11.480.000	94.475.391.059
03 Des 22	00000000000000000000	Saldo Simpanan dan Jasa BLUD		1.000.974.800	95.476.365.859
04 Des 22	00000000000000000000	Surplus Muti BLUD		100.000.000	95.576.365.859
01 Des 22	00000000000000000000	Perimbangan Jasa Layanan Umum BLUD	7.440.270.000		103.016.635.859
02 Des 22	00000000000000000000	Saldo Simpanan BLUD		100.000.000	103.116.635.859
03 Des 22	00000000000000000000	Saldo Simpanan dan Jasa BLUD		60.070.101.700	43.046.534.159
04 Des 22	00000000000000000000	Surplus Muti BLUD		1.000.000.000	44.046.534.159
			107.640.687	87.101.030.000	61.692.400.011

**3.3.1.1.1.1. Kas di Bendahara FKTP dan Kas Lainnya**

**31 Desember 2022**  
**Rp6.022.179.884,00**

**31 Desember 2021**  
**Rp4.057.484.781,00**

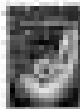
Kas di Bendahara FKTP dan Kas lainnya merupakan saldo kas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Kas Dana Prokosta Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.81**  
**Kas di Bendahara FKTP dan Kas Lainnya**  
**31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Persentase	
			(%)	(%)
Kas di Bendahara FKTP	6.022.179.884,00	6.022.179.884,00	100,00	(6.022.179.884,00)
Kas Lainnya	1.000.000,00	4.057.484,78	66,70	1.000.000,00
Jumlah	6.022.179.884,00	6.027.664.781,00	100,00	(6.023.179.884,00)

Saldo Kas di Bendahara FKTP dan Kas lainnya per 31 Desember 2022 pada rencana sebesar Rp6.022.179.884,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.057.484.781,00 ada pemerintah sebesar Rp2.035.104.777,00). Saldo Kas di Bendahara FKTP TA 2022 sebesar Rp6.014.204.535,00 merupakan akumulasi saldo Dana Kapitasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.053.380.286,00. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perombakan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, bahwa dana kapitasi tahun anggaran sebelumnya (dalam tahun anggaran 2021) dapat digunakan pada tahun berikutnya (dalam hal ini tahun anggaran 2022) sehingga saldo dana kapitasi terakumulasi tahun berikutnya. Adapun saldo dana kapitasi tahun anggaran 2022 rekapitulasi jumlah transfer belanja dan saldo masing-masing FKTP berdasarkan Rekening Koran Tahun Anggaran 2022 (rekening Koran terlampir) dan SP2D masing-masing Perekutan adalah sebagai berikut:

NO	Penerimaan	Saldo Awal 2022	Partisipasi Th. 2022	Rencana Th. 2022	Saldo Akhir 2022	Nilai per FKTP Rata-rata
1	DAU BARITA	272.275.275	1.700.000	50.000.000	224.975.275	6.000.000.000.000
2	Saldo	175.494.000	18.271.000	200.000.000	453.765.000	6.000.000.000.000
3	JASSRI	422.878.000	1.000.000	100.000.000	323.878.000	6.000.000.000.000
4	JASSRI	100.000.000	1.000.000	71.000.000	29.000.000	6.000.000.000.000
5	SP2D	100.000.000	4.770.000	101.000.000	193.230.000	6.000.000.000.000



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	Pendapatan	Saldo Awal 2022	Pendapatan Per 2022	Belanja Per 2022	Saldo Akhir 2022	Saldo Awal 2021
6	MAJLIS PERDEBATAN	1.294.984.120	24.292.500	407.879.200	1.111.407.420	8.194.100.000.000
7	LAPANGAN	1.260.777.120	4.314.100	402.817.800	1.178.273.420	8.200.100.000.000
8	PERKAWASAN	444.701.800	2.017.000	41.874.000	104.844.800	8.200.100.000.000
9	LEMBU	177.201.000	4.264.000	85.782.070	95.682.930	8.200.100.000.000
10	PUS. BUKITING	875.781.000	12.600.000	101.982.000	786.409.000	8.200.100.000.000
11	TERANGGALAN	100.000	46.310.000	46.304.770	53.705	8.200.100.000.000
12	REKREASIKAN	200.780.000	2.700.000	88.740.000	114.740.000	8.200.100.000.000
13	KEBERSIHAN	185.120.170	2.400.000	40.243.100	147.277.070	8.200.100.000.000
14	TERANGGALAN	875.181.000	2.000.000	107.000.000	100.181.000	8.200.100.000.000
15	REKREASIKAN	218.100.000	1.000.000	21.000.000	198.100.000	8.200.100.000.000
16	KEBERSIHAN	280.200.000	4.264.000	70.000.000	194.464.000	8.200.100.000.000
17	LEMBU/CIKAS	171.704.000	2.401.000	82.000.000	112.105.000	8.200.100.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>8.902.890.290</b>	<b>182.894.600</b>	<b>2.211.798.790</b>	<b>6.874.086.100</b>	

Saldo Kas lainnya merupakan saldo kas produktif di Pemerintahan. Adapun saldo akhir produktif untuk pemerintahan sebesar Rp.7.973.449,00 merupakan akumulasi saldo kas dari Pemerintahan yang ada di Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2022. Berikut ini perbandingan rinci per 31 Desember 2022.

NO	Pendapatan	Saldo Awal 2022	Pendapatan Per 2022	Belanja Per 2022	Saldo Akhir 2022
1	UMUM	-	21.004.000	15.004.000	-
2	UMUM 1	22.200	978.000	600.000	390.200
3	UMUM 2	24.800	8.108.000	44.000	8.128.800
4	MAJLIS PERDEBATAN	26.200	8.202.000	8.144.000	64.200
5	LAPANGAN	12.800	617.100	978.000	46.900
6	PERKAWASAN	1.280.000	1.280.000	15.400.000	96.800
7	LEMBU	1.000.000	-	44.000	1.000.000
8	MAJLIS	11.000	11.000.000	11.100.000	90.000
	<b>TOTAL</b>	<b>4.564.000</b>	<b>34.191.100</b>	<b>30.770.000</b>	<b>7.973.100</b>

**3.3.1.1.14. Kas Dana BOS 31 Desember 2022 31 Desember 2021**  
**Rp163.000,00 Rp452.819.010,64**

Kas Dana BOS merupakan saldo kas Dana BOS Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Kas Dana BOS**  
**31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Nilai Teror	
			Rp	Rp
Kas Dana BOS	163.000,00	452.819.010,64	(86,00)	163.000.010,64
Jumlah	163.000,00	452.819.010,64	(86,00)	163.000.010,64

Saldo Kas Dana BOS Per 31 Desember 2022 sebesar Rp163.000,00 selanghkan dari Kas Dana BOS per 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp452.819.010,64

Saldo Kas di bendahara dana BOS pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar Rp452.819.010,64 penurunan ini disebabkan realisasi belanja BOS pada tahun 2022 maksimal dalam pemenuhan dana tersebut.

Jumlah penerimaan Dana BOS untuk kabupaten Barito utara TA 2022 sebesar Rp20.113.771.837,- penerimaan dari BOS Reguler sebesar Rp19.073.771.837,00 terdiri dari Pendapatan Dana BOS SD sebesar Rp12.283.761.837,00 dan SMP sebesar Rp6.789.970.000,00. Penerimaan dari Dana BOS Kinerja sebesar Rp1.040.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Dana BOS Kinerja SD sebesar Rp816.349.465,00 dan SMP sebesar Rp223.750.535,00

Jumlah Belanja Dana BOS untuk kabupaten Barito utara TA 2022 sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**LITUS, TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Rp20.439.814.833.- Belanja dari BOS Reguler sebesar Rp19.399.814.837.00 terdiri dari Belanja Dana BOS SD sebesar Rp12.508.796.837.00 dan SMP sebesar Rp6.891.018.000.00, Belanja dari Dana BOS Kinerja sebesar Rp1.040.000.000.00 terdiri dari Belanja Dana BOS Kinerja SD sebesar Rp814.349.465.00 dan SMP sebesar Rp225.750.535.00.

**Informasi Tambahan terkait Saldo BOSDA dan BOP PAUD**

Saldo awal BOSDA Jenjang Sekolah Dasar TA 2022 sebesar Rp195.848.831.00, Jumlah Pendapatan BOSDA Jenjang SD selama TA 2022 sebesar Rp2.029.106.500.00, sedangkan Jumlah Belanja BOSDA Jenjang SD selama TA 2022 sebesar Rp2.157.587.730.00 (Belanja Pegawai sebesar Rp739.554.000.00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.418.033.730.00) Saldo Akhir per 31 Desember 2022 BOSDA Jenjang SD sebesar Rp68.261.101.00.

Saldo awal BOSDA Jenjang SMP TA 2022 sebesar Rp44.517.500.00, Jumlah Pendapatan BOSDA Jenjang SMP selama TA 2022 sebesar Rp2.348.212.500.00, sedangkan jumlah Belanja BOSDA Jenjang SMP selama TA 2022 sebesar Rp2.372.962.500.00 (Belanja Pegawai sebesar Rp1.205.866.500.00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.167.096.000.00) Saldo Akhir per 31 Desember 2022 BOSDA Jenjang SMP sebesar Rp19.267.500.00.

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 24/P/2022 tentang Prioritas Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022.

Untuk TK Negeri dan Swasta yang menerima BOP PAUD sebanyak 190 Lembaga dengan jumlah sebesar Rp2.871.613.000.- dan Realisasi Belanja sebesar Rp2.857.126.000.- terdapat Sisa sebesar Rp14.487.000.-.

Lembaga Penyelenggaraan layanan Pendidikan Informal penerima BOP keistimewaan TA 2022 sebanyak 3 sekolah menerima sejumlah Rp573.660.000.-, sedangkan yang dengan realisasi sebesar Rp573.660.000.-.

<b>5.1.1.1.7. Piutang Pendapatan</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>Rp49.168.854.068,61</b>	<b>31 Desember 2021</b> <b>Rp56.499.602.962,99</b>
--------------------------------------	---	---

Piutang pendapatan merupakan hak pemerintah Kabupaten Barito Utara terhadap pemerintah lain, baik yang berasal dari pendapatan pajak, pendapatan non pajak dan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah keluar Surat Keputusan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dekretan yang dipertanyakan sehingga timbul tagihan atau hak Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dan SK Dekretan terkait Bagi Hasil. Rincian disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5-53**  
**Piutang Pendapatan**  
**31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Perubahan/Pertambahan
Piutang Pajak Daerah	15.071.067.000,00	14.879.898.021,00	1.912.168.979,00
Piutang Retribusi Daerah	339.463.760,00	14.732.891.400,00	(13.393.427.640,00)
Piutang Hasil Pengembalian Kemudahan Daerah ke Daerah	390.467.000,00	807.426.040,00	(416.959.040,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Bel	1.301.158.800,00	871.879.500,00	429.279.300,00
Piutang Transfer	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Persepsi Pajak			
Potensi Tahun			
Apa Persepsi	Rp 333.254.408,17	Rp 795.142.800,00	- 4.691.007.400,12
Dampak Lainnya			
Jumlah	Rp 333.254.408,17	Rp 795.142.800,00	Rp 2.296.198.274,00

Potensi Pajak Daerah adalah tagihan pajak daerah yang menjadi hak pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp15.678.363.589,00 sedangkan TA 2021
- sebesar Rp14.618.658.021,00 berada pada Daftar Pengadaun Pendapatan Daerah merupakan tagihan atas Mutasi Potensi PBB P2 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Penambahan potensi PBB Tahun 2022 karena adanya pengalihan atas potensi daerah pemukiman PBB P2 serta penastribahan dari sisi penetapan pajak tahun 2022, sedangkan pengurangan potensi berasal dari pembayaran wajib pajak tahun 2021 sebesar Rp22.253.549,54 dan Potensi Pajak Penurunan Jalan TA 2019 yang dibayarkan pada Tahun 2020 sebesar Rp424.897.120,00. Adapun Rincian Potensi Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	URAIAN	Potensi Pajak	Saldo	Jumlah
1	Saldo Awal Potensi per 31 Desember 2021	10.272.194.800,00	4.708.462.000,00	14.980.656.800,00
2	Kebijakan PBB-Daftar Baru, Periode 31 Desember 2022	2.211.832.000,00	0,00	2.211.832.000,00
3	Penurunan Potensi - 2021 sebagai Tahun 2022	- 218.467.138,00	79.708.700,00	138.758.438,00
4	Kebijakan Penurunan 2022 dan Daftar Baru Tahun 2022	1.208.298.648,00	879.000,00	1.209.177.648,00
5	Potensi per 31 Desember 2022 + Perubahan Saldo	11.263.858.310,00	4.688.241.700,00	15.952.099.999,00

- Potensi Retribusi Daerah sebesar Rp929.643.798,00 adalah Potensi Retribusi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp862.351.009,00 dan Potensi Retribusi Pada Dinas Kesehatan dan Informatika sebesar Rp67.292.729,00. Adapun Rincian Potensi Retribusi dapat dilihat sebagai berikut:

- Potensi Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rincian Potensi Retribusi Diperinci sebagai berikut:

<b>Pasar Protopo</b>	
Sisa Potensi Tahun 2012	Rp0,00
Sisa Potensi Tahun 2013	Rp9.687.000,00
Sisa Potensi Tahun 2014	Rp23.419.000,00
Sisa Potensi Tahun 2015	Rp24.879.000,00
Sisa Potensi Tahun 2017	Rp48.348.000,00
Sisa Potensi Tahun 2018	Rp79.999.361,00
Sisa Potensi Tahun 2019	Rp0,00
Sisa Potensi Tahun 2020	Rp147.234.000,00
Sisa Potensi Tahun 2021	Rp999.000,00
Sisa Potensi Tahun 2022	Rp17.494.000,00
<b>Total sisa Potensi Pasar Protopo Tha 2012 s/d 2022</b>	<b>Rp354.430.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

<b>Pasar Darah Formal</b>	
Sisa Piutang Tahun 2013	Rp8.326.000,00
Sisa Piutang Tahun 2014	Rp22.770.000,00
Sisa Piutang Tahun 2015	Rp28.920.000,00
Sisa Piutang Tahun 2016	Rp21.170.000,00
Sisa Piutang Tahun 2017	Rp13.090.000,00
Sisa Piutang Tahun 2018	Rp16.780.000,00
Sisa Piutang Tahun 2019	Rp6.200.000,00
Sisa Piutang Tahun 2020	Rp27.942.000,00
Sisa Piutang Tahun 2021	Rp10.510.000,00
Sisa Piutang Tahun 2022	Rp 29.100.000,00
<b>Total sisa Piutang Pasar Darah Formal Thn 2013 s.d 2021</b>	<b>Rp214.702.000,00</b>
<b>Pasar Bebas Basjah</b>	
Sisa Piutang Tahun 2013	Rp1.870.000,00
Sisa Piutang Tahun 2014	Rp2.263.000,00
Sisa Piutang Tahun 2015	Rp6.126.000,00
Sisa Piutang Tahun 2017	Rp23.244.000,00
Sisa Piutang Tahun 2018	Rp17.160.000,00
Sisa Piutang Tahun 2019	Rp12.311.000,00
Sisa Piutang Tahun 2020	Rp16.842.000,00
Sisa Piutang Tahun 2021	Rp12.374.000,00
Sisa Piutang Tahun 2022	Rp29.901.000,00
<b>Total sisa Piutang Pasar Bebas Basjah Thn 2013-2021</b>	<b>Rp112.648.000,00</b>
<b>Pasar Dermaga</b>	
Sisa Piutang Tahun 2013	Rp3.330.000,00
Sisa Piutang Tahun 2014	Rp11.844.000,00
Sisa Piutang Tahun 2015	Rp18.684.000,00
Sisa Piutang Tahun 2016	Rp11.609.000,00
Sisa Piutang Tahun 2017	Rp18.548.000,00
Sisa Piutang Tahun 2018	Rp2.995.000,00
Sisa Piutang Tahun 2019	Rp0,00
Sisa Piutang Tahun 2020	Rp8.980.000,00
Sisa Piutang Tahun 2021	Rp29.604.000,00
Sisa Piutang Tahun 2022	Rp26.604.000,00
<b>Total sisaPiutang Pasar Dermaga Thn 2013 s.d 2021</b>	<b>Rp142.781.000,00</b>
<b>Pasar Gembris</b>	
Sisa Piutang Tahun 2020	Rp1.320.000,00
Sisa Piutang Tahun 2021	Rp8.180.000,00
Sisa Piutang Tahun 2022	Rp14.270.000,00
<b>Total sisa Piutang Pasar Gembris Tahun 2020 s/d 2022</b>	<b>Rp23.770.000,00</b>
<b>Total Piutang Diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022</b>	<b>Rp462.251.000,00</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**2. Piutang Retribusi Deras Kontan/asi Deras Informan/asi**  
**Berjenis Piutang Retribusi Minera**

No	URAIAN	PENILAIK MINERA	JUMLAH (Rp)
1	Piutang Yang Masih Dalam Tahap (berdasarkan rencana untuk Serpis/asi tenaga)	PT. Triview Gunung Mandiri (UGM)	3.539.104,00
2	Piutang Yang Masih Dalam Tahap	PT. Daya Mitra Tambang/asi (Mitrani)	0,00
3	Piutang Yang Masih Dalam Tahap	PT. XL Anam Tbk	16.130.245,00
4	Piutang Yang Masih Dalam Tahap	PT. Tera Berama Grup (TRG)	14.583.340,00
5	Piutang Yang Masih Dalam Tahap	PT. Indram Tbk	23.640.0700,00
6	Piutang Yang Masih Dalam Tahap	PT. Protindo dan PT. STP	6.817.432,00
7	Piutang Yang Masih Dalam Tahap	PT. Talkamal Tbk	1.999.712,00
8	Selisihan Bayar	PT. Protindo	-1.446.105,00
	<b>Jumlah</b>		<b>67.215.729,00</b>

- a. Piutang Hasil Pengolahan Keluayan Deras yang dipisahkan adalah tagihan atas tagg hasil laba Perusa Dalam Manahan untuk Tahun Buku 2021 sesuai Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Drs. Agus Noman, SAKSI (JAL) BE 0082-2 (SI) 2021 tanggal 2 Februari 2022 sebesar 30% dari Laba Rugi Tahun Berjalan yang akan dibayarkan ke kasda setelah ada SK persetujuan dari Kepala Dinas (Deras adalah sebesar Rp736.451.645,00.
- c. Untuk Piutang Lain-lain PAD Yang Sub pada Tahun 2022 sebesar Rp1.457.214.927,00 yang berasal berasal dari Denda Keterlambatan Pelaporan pada Dinas PUPR yang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp338.751.000,00 belum diterima dalam rekening Kas Daerah. Dns berasal dari Akun Piutang Retribusi yang dialokasikan ke Akun Piutang Lain-lain PAD Yang Sub dikurangkan pada LRA HLUK RSUD Minera Terakal Terakal sebagai Akun Piutang Lain-lain PAD Yang Sub sebesar Rp1.118.463.927,00 yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**1. Deras PU**

No	URAIAN	JUMLAH DENDA (Rp)	JUMLAH DERA (Rp)
1	PT SITA DERA ADONG PROGRES Pd Karya Deras Kotabaru/asi atau Pelayanan Pelayanan Perumahan Jalan Negara No. 10 Deras. 10-0000 (2022)	872.004.922,74	100.000.000,00
2	PT SITA TR. JAYA BERKATAAN Denda Keterlambatan atau Pelayanan Perumahan Jalan Kerdul- Tiga (Mali year) Tahun 2019-2021	585.209.922,74	400.701.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.457.214.845,48</b>	<b>500.701.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LAMP. DAHJ YANG BERACHEK 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**2. Piutang BLUD RSUD**

**a) Piutang Usaha**

No	Urutan Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
1	PT. Jasa Duga Indonesia	11.105.000,00
2	PT. Saatchi M&B Retail	1.548.000,00
3	Metindo Liana Indah	571.000,00
4	PT. Anzani Lianan Mega Health	2.745.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.969.500,00</b>

**b) Piutang Klaim BPJS**

No	Urutan Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
1	SUMILAN RTT. MARET 2022	6.389.500,00
2	SUMILAN RTT. APRIL 2022	4.387.021,00
3	SUMILAN RTT. JUNI 2022	312.800,00
4	SUMILAN RTT. AGUSTUS 2022	12.413.500,00
5	SUMILAN RTT. AGUSTUS 2022	344.500,00
6	SUMILAN RTT. SEPTEMBER 2022	19.919.600,00
7	SUMILAN RTT. SEPTEMBER 2022	2.800.800,00
8	SUMILAN RTT. OKTOBER 2022	252.649.750,00
9	SUMILAN RTT. OKTOBER 2022	17.013.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>354.778.771,00</b>

**c) Piutang Klaim Covid**

No	Urutan Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
1	BUPEL AGUSTUS-SEPTEMBER 2022 DISPUTI	11.703.180,00
2	BUPEL OKTOBER 2022	145.804.000,00
3	BUPEL OKTOBER 2022 DISPUTE KEMKES	18.438.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>175.945.180,00</b>

**d) Piutang Klaim Jasa Pelaya**

No	Urutan Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
1	BUPEL DESEMBER 2022	18.758.571,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.758.571,00</b>
	<b>TOTAL JUMLAH (A+B+C+D)</b>	<b>637.463.927,00</b>

- e) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebesar Rp25.783.142.835,59 merupakan Piutang atas Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun III dan Bagi Hasil Pajak Rekrut dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Se Kalimantan Tengah Tahunan IV TA. 2021 sesuai SK Gubernur Kalimantan Tengah No.188/44/115/2022 tanggal 22 April 2022 dan SK Gubernur Kalimantan Tengah No.188/44/75/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan pada Tahun 2022 piutang tersebut sudah dibayar.**

**3.3.1.1.8. Piutang Lainnya 31 Desember 2022 31 Desember 2021**  
**Rp 103.551.554,00 Rp 18.000.000,00**

Piutang lainnya merupakan nilai dari Tagihan Lunas IPTGR pada BLUD

**Piutang BLUD RSUD**

No	Urutan Piutang Usaha	Jumlah (Rp)
1	Piutang IPTGR berdasarkan SKTM dan CTRM DPAK Tahun 2022	132.331.334,00
	<b>Jumlah</b>	<b>132.331.334,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**5.1.1.1.9. Penyisihan Piutang** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
 (5.350.983.507,00) (4.504.385.001,00)

Penyisihan Piutang atas tagihan muncul tidak lancar dan merugikan Ditribusi pada tahun 2022 pada Diklatgrin selangka penyisihan piutang untuk tagihan atas piutang pajak PBB P2 pada HPPD.

**5.1.1.1.10. Debit Dibayar Dimasa** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
 Rp200.126.507,00 Rp193.203.443,00

Debit dibayar dimasa tahun 2021 sebesar Rp 193.203.443,00-selangka tahun 2022 sebesar Rp 200.126.507,00 merupakan beban atas pemeliharaan kendaraan bermotor khususnya Pajak Kendaraan Bermotor baik Roda 2 maupun Roda 4 pada seluruh Perangkat Daerah selama TA 2022 serta Gering Perkantoran Pada Dinas Kesehatan serta Debit dibayar dimasa pengisian pengisian Tabung O2gas pada RSUD Misa Tumbuh pada Tahun 2022.

**5.1.1.1.11. Persediaan** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
 Rp37.952.092.303,00 Rp27.199.271.122,00

Saldo persediaan sebesar Rp 37.952.092.303,00 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2022 berdasarkan hasil stock opname atas hasil inventarisasi fisik dan menggunakan nilai persediaan terakhir. Persediaan per 31 Desember 2022 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.04  
 Persediaan  
 31 Desember 2022

No	PERSAHLAHT DAERAH	MUTASI PERSAHLAHT TAHUN 2022			
		SALDO AWAL	Masuk	Reluar	SALDO AKHIR
1	SEKRETARIAT DAERAH	10.400.000,00	4.045.000.000,00	4.120.270.000,00	0,00
2	SEKRETARIAT DPRD	2.213.700,00	1.207.181.000,00	1.208.490.000,00	0,00
3	KEPANTARAN KAB. BARITO UTARA	3.580.000,00	207.004.000,00	520.274.000,00	4.262.000,00
4	DINAS PERSEKUTAN KAB. BARITO UTARA	0,00	004.004.004,00	000.000.004,00	0.000.000,00
5	DINAS PERSEKUTAN KAB. BARITO UTARA	13.780.000.000,00	27.427.000.000,00	20.847.011.700,00	14.359.988.300,00
6	POLSI	0,00	10.001.240.700,00	0,00	10.001.240.700,00
7	DINAS PERSEKUTAN LUMBU DAN PERTANIAN UMUM KAB. BARITO UTARA	0,00	17.340.000.000,00	0,00	17.340.000.000,00
8	DINAS PERSEKUTAN KANTAN KAWASAN PERSEKUTAN DAN PERTANIAN KAB. BARIT	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
9	DINAS SOSIAL, PEMERIKSAAN MADYASAKAT DAN DESA KAN BARIT	207.000.000,00	240.000.000,00	422.144.000,00	124.856.000,00
10	DINAS KANTAN DAN P. LUMBU KAB. BARIT	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LAMPIRAN TABEL YANG BERURUTAN 11 DESEMBER 2022 DAN 2023

No.	PRASABDIT DAERAH	RUTAN PERSEDIAAN TAHUN 2022			
		BALIK AWAL	Masa	Tetap	BALIK AKHIR
11	DINAS DAN KR DAN POK KAS BARUT	187.360.110,00	888.340.848,00	887.878.824,00	88.370.190,00
12	DINAS PERTANAHAN PANGRAH DAN PERUMAHAN KAS BARUT	78.818.000,00	1.277.382.883,00	1.277.382.883,00	78.788.000,00
13	DINAS LINDUNG DAN HOUP KAS BARUT	321.890.800,00	1.888.911.008,00	882.198.878,00	1.021.338.880,00
14	DINAS KEPERUSAHAAN DAN PENGAYATAN GPTL KAS BARITO UTARA	0,00	482.887.887,00	482.887.887,00	0,00
15	DINAS PERUBAHAN KAS BARUT	25.490.000,00	570.588.878,00	558.878.870,00	8.888.888,00
16	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERGAMBARAN	0,00	224.277.888,00	224.277.888,00	0,00
17	DINAS PERUMAHAN SOKAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	347.871.888,00	347.871.888,00	0,00
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPERUSAHAAN DAN OLAMPIKA KAS BARUT	0,00	1.882.888.780,00	1.882.888.780,00	0,00
19	DINAS KEARIFAN DAN PERPUSTAKAAN KAS BARUT	488.888,00	788.870.488,00	788.888.888,00	0,00
20	DINAS PERTANAHAN KAS BARUT	788.888.888,00	13.888.888.888,00	13.788.888.888,00	218.888.888,00
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAS BARUT	0,00	1.088.188.780,00	1.088.188.780,00	0,00
22	SATUAN POLICE RANGKAI PRALIA DAN HIMPADAN KEMAMAHAN KAS BARUT	0,00	388.781.270,00	388.781.270,00	0,00
23	SARWEDA LINDUNG KAS BARUT	1.882.888,00	482.781.488,00	482.208.480,00	4.887.888,00
24	PADAN PENGELOLA PADAN PENGELOLA				
25	PENGAYATAN DAERAH KAS BARUT	0,00	488.888.888,00	488.888.888,00	0,00

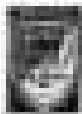


**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

No	PERANGKAT DAERAH	MUTASI PERSEDIAAN TAHUN 2022			
		SALDO AWAL	MASUK	PANGGIL	SALDO AKHIR
20	BAHAGI PENGELOLAAN KEKAWANAN DAN KESETIAWAJAN DAERAH	2.000.000,00	107.885.244,00	105.885.244,00	1.821.959,00
21	BAHAGI KEPERAWANAN DAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN	1.000.000,00	107.845.797,00	109.495.797,00	0,00
22	BAHAGI KEKAWANBANGSA DAN POLITIK	0,00	107.490.000,00	107.490.000,00	0,00
23	BAHAGI PENANGKULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	2.432.142.884,00	1.154.371.884,00	1.287.771.000,00
24	KECAMATAN BULUNG TOMBANG	0,00	342.182.750,00	342.182.750,00	0,00
25	KECAMATAN TENJEM TENGAH	0,00	720.552.825,00	720.552.825,00	0,00
26	KECAMATAN LAHEH	0,00	187.298.975,00	187.298.975,00	0,00
27	KECAMATAN BULUNG PULUH	0,00	129.491.750,00	129.491.750,00	0,00
28	KECAMATAN TENJEM TIMUR	0,00	59.548.000,00	59.548.000,00	0,00
29	KECAMATAN MONTALLET	0,00	378.719.750,00	378.719.750,00	0,00
30	KECAMATAN TENJEM BARU	0,00	448.798.425,00	448.798.425,00	0,00
31	KECAMATAN LAHEH BARAT	0,00	378.880.000,00	378.880.000,00	0,00
32	KECAMATAN TENJEM SELATAN	0,00	324.308.000,00	324.308.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.184.371.102,00</b>	<b>90.299.949.200,00</b>	<b>73.999.120.115,00</b>	<b>17.485.250.187,00</b>

**TOTAL URaian OBIEK PERSEDIAAN SKPD DI KABUPATEN BARITO UTARA TA 2022**

NO	URAIAN BELAJAR	PERSEDIAAN			
		SALDO AWAL	MASUK	KELUAR	SALDO AKHIR
1	Biaya Hibah Barang Kecamatan Lanting Dinas Kesejahteraan Pemukiman	0.041.977.000,00	0.214.840.000,00	0,00	16.000.000.000,00
2	Biaya Hibah Barang Kecamatan Lanting Dinas Pangan dan Kesejahteraan	14.828.400,00	0,00	14.828.400,00	0,00
3	Biaya Belanja-Belanja Kecamatan Kumpang	0,00	875.754.750,00	875.754.750,00	0,00
4	Biaya Belanja-Belanja Kecamatan Kumpang	1.278.287.180,00	1.874.588.900,00	875.591.820,00	2.277.684.260,00
5	Biaya Belanja-Belanja Kecamatan Kumpang	22.890.000,00	4.825.097.750,00	4.841.828.000,00	28.475.070,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BAHU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR DI DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN BELAJAR	PERSEKUTUAN			
		BALDO AMPIL	MAJUH	RELAMAH	BALDO AMPIL
	Batas dan Pelatuk				
6	Belanja Bahan- Bahan/BBM/Transportasi	330.313.000,00	1.179.403.000,00	1.079.090.000,00	407.000.000,00
7	Belanja Bahan- Tali/RS/BBM	61.600.000,00	2.200.072.000,00	2.200.071.000,00	66.000.000,00
8	Belanja Bahan- Bahan/BBM/Transportasi BBM Lain	60.042.000,00	1.708.019.000,00	1.707.000.000,00	66.000.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	650.473.000,00	2.200.000.000,00	21.270.000.000,00	1.407.313.000,00
10	Belanja Bahan-Campeng Buku-Catung, Alat Angkut	0,00	1.241.000.000,00	1.241.000.000,00	0,00
11	Belanja Bahan-Catung Buku-Catung, Alat Laboratorium	0,00	16.000.000,00	16.200.000,00	0,00
12	Belanja Bahan-Campeng Buku-Catung, Lainnya	0,00	1.400.000,00	300.000,00	1.000.000,00
13	Belanja Asisten- Asst Tdk Tetap	67.000.000,00	2.000.740.000,00	2.070.042.770,00	100.000.000,00
14	Belanja Asisten- Kekawatiran Umum	16.000.000,00	2.470.700.000,00	2.407.740.000,00	6.200.000,00
15	Belanja Asisten- Kawatir Detail	60.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00	16.000.000,00
16	Belanja Asisten- Bantu Pjw	1.070.000,00	200.070.000,00	200.004.000,00	607.000,00
17	Belanja Asisten- Pencetakan Dokumen/Informasi Tertulis	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
18	Belanja Asisten- Kawatir Komputer	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
19	Belanja Asisten- Pencatatan	0,00	14.070.000,00	14.070.000,00	0,00
20	Belanja Asisten- Alat Lain	8.170.000,00	1.700.070.000,00	1.740.070.000,00	6.470.000,00
21	Belanja Asisten- Peningkatan Umum	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
22	Belanja Asisten- Peningkatan Pencatung Catung	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
23	Belanja Asisten- Bantuan-Campeng Masi	0,00	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00
24	Belanja Asisten untuk Angkut Aksesories untuk Kendaraan Motor Lainnya	14.070.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.700,00	14.000.000,00
25	Belanja Obat-Obatan Obat	6.100.000.000,00	27.100.000.000,00	24.000.000.000,00	6.000.000.000,00
26	Belanja Obat-Obatan	6.070.000.000,00	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LEMBAG TAJUK YANG BERAKTIF 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

KODE	URAIAN BELANJA	PERSEKUTUHAN			
		REALISASI AWAL	REVISI	VALUASI	SALDO AKHIR
	Salah Satu Lain-lain				
27	Biaya barang untuk Dinas/Divisi/unit kepada Masyarakat	0,00	14.821.703.200,00	12.717.026.500,00	1.808.940.870,00
28	Biaya barang untuk Dinas/Divisi/unit kepada Pihak Kelembagaan Lain	0,00	75.885.804,00	75.885.000,00	0,00
29	Biaya Perencanaan untuk Tujuan Strategis Lain-lain	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
30	Biaya Sewa dan Pembelian		220.303.800,00	220.303.800,00	0,00
31	Biaya Bahan Mula-mula Perencanaan		1.248.812.700,00	1.248.812.700,00	0,00
32	Pembelian Barang Baja permanen	873.873.800,00	0,00	873.873.212,07	880.400.000,00
33	Pembelian Tangkapan Perang	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>27.704.271.100,00</b>	<b>18.426.826.804,00</b>	<b>17.828.945.700,07</b>	<b>17.852.992.262,00</b>

**5.3.1.1.3. Investasi  
Jangka Panjang**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp104.824.869.289,00**

**Rp105.760.820.715,00**

Investasi jangka panjang tahun 2022 sebesar Rp104.824.869.289,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp105.760.820.715,00 terdiri dari investasi non permanen sebesar Rp0,00 dan investasi permanen sebesar Rp104.824.869.289,00. Apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp105.760.820.715,00 terdapat penurunan sebesar Rp935.951.426,00. Adapun rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.55**  
**Investasi Jangka Panjang**  
**31 Desember 2022**

Uraian	Saldo Tahun			
	31 Desember 2020	31 Desember 2021	%	(Rp)
Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	104.824.869.289,00	105.760.820.715,00	10,00	(935.951.426,00)
<b>Jumlah</b>	<b>104.824.869.289,00</b>	<b>105.760.820.715,00</b>	<b>10,00</b>	<b>(935.951.426,00)</b>

**5.3.1.1.3.1. Investasi Non  
Permanen**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp0,00**

**Rp0,00**

Saldo Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN HARAU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DI DESEMBER 2022 DAN 2021

**5.3.1.1.2. Investasi** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**  
**Permanen** **Rp194.824.849.289,00** **Rp194.792.826.714,00**

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Rp	%	Rp	%
Investasi Permanen	194.824.849.289,00	100,00	194.792.826.714,00	100,00
Jumlah	194.824.849.289,00	100,00	194.792.826.714,00	100,00

Untuk presentasi dan pengapungan Investasi Permanen Peroda Kabupaten Harau Utara per Periode tahun selanjut Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	PT. Harau Pembangunan & Rukong	43.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	46.000.000.000,00
2	PDAM Kabupaten Harau Utara	42.185.728.846,00	3.000.000,00	3.298.718.873,00	38.887.010.043,00
3	PT. JAWARA Rukong	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
4	Persepsi Rukong Membangun	17.607.081.799,00	1.282.787.447,00	0,00	18.889.869.246,00
	Jumlah	105.792.810.645,00	7.282.787.447,00	3.298.718.873,00	109.776.879.219,00

Saldo Investasi Permanen Peroda Kabupaten Harau Utara per Periode tahun selanjut Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut (dalam rupiah):  
 Saldo Pembangunan Rukong (cost method)

- Saldo awal	43.000.000.000,00	37.750.000.000,00
- Penambahan tahun berjalan	3.000.000.000,00	2.250.000.000,00
- Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	46.000.000.000,00	40.000.000.000,00

B. PDAM Kabupaten Harau Utara ( equity method)

- Penyusutan PMP dari Akuntansi Laba/Rugi PDAM		
- Saldo Awal PMP	39.872.136.783,00	39.872.136.783,00
- Akumulasi saldo laba/rugi tahun lalu	(71.010.083.043,00)	(63.075.372.340,00)
- Laba/Rugi tahun berjalan TA. 2021	5.835.282.809,00	3.275.442.871,00
- Koreksi Penyusutan Pemerintah Pusat	72.076.999.783,00	72.076.999.783,00
- Modal Hibah	23.247.753,00	23.247.753,00
- Laba/Rugi tahun berjalan TA. 2022	3.899.313.228,00	(3.613.383.832,00)
- Akumulasi Saldo Laba/rugi akhir Tahun berjalan	31.189.727.189,00	38.248.180.046,00
- Defisit rugi kegiatan operasional PDAM Nilai penyusutan modal di PDAM	71.010.061.043,00	65.073.372.548,00
- Nilai Penyusutan modal di PDAM Laba Harau Utara	38.825.010.047,00	42.133.738.838,00

Pembinaan dan bimbingan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Drs. ARSOM Nomor 000070/2014/AAU/2015/OTM2-011/01/2022 tanggal 19 Februari 2022 dengan Opini Wajar





**PEMERINTAH KABUPATEN BUKIT UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**PT.JAMKIDA KALTENG (over method)**

- Saldo awal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
- Penambahan tahun berjalan	0,00	0,00
- Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

**PERUSAHA BUKITA MEMBANGKUN (agrup method)**

- Saldo Awal	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
- Proyeksi PMP dari Akuntansi lab/rugi perbagian Dividen Laba/Rugi:		
Tahun 2014	987.937.884,00	
Tahun 2015	2.156.735.362,00	
Tahun 2016	2.328.866.215,00	
Tahun 2017	1.304.771.944,00	
Tahun 2018	1.658.383.191,00	
Tahun 2019	1.334.526.858,00	
Tahun 2020	1.837.336.499,00	
Tahun 2021	2.719.330.175,00	
Tahun 2022	2.884.672.968,00	

**Dividen ke Pemilik Bukit Utara**

Tahun 2014	(296.381.365,00)
Tahun 2015	(643.358.149,00)
Tahun 2016	(718.659.870,00)
Tahun 2017	(391.431.312,00)
Tahun 2018	(497.514.957,30)
Tahun 2019	(457.358.051,40)
Tahun 2020	(551.200.921,78)
Tahun 2021	(813.799.852,58)
Tahun 2022	(965.401.890,90)

**Perhitungan Investasi PMP Kab. Bukit Utara (Saldo awal Tahun 2021)**

17.437.891.795,00      16.986.621.189,00

- Saldo TA 2021 setelah Koreksi	0,00	0,00
- Perbagian Laba Tahun Lalu	0,00	0,00

**Pergerakan**

- Dana Perbagianan Daerah	0,00	0,00
- Sisa dan Penjualan	0,00	0,00
- Sisa Produksi	0,00	0,00
- L/R Tahun berjalan	0,00	0,00
- Pergerakan Tahun Berjalan	(1.521.905.331,00)	(1.168.839.548,00)

**Diasahukan**

- Penambahan Tahun Berjalan	2.884.672.968,00	2.719.330.175,00
- Saldo Investasi Proyeksi Modal Akhir	18.999.859.262,00	17.437.891.795,00

Perhitungan ini berdasarkan Hasil Audit Eksternal Akuntansi Publik Drs.ABDOH Nomor:00002/2020/AC/2.000/9762-4/01/2021 tanggal 6 Februari 2022 dengan opini wajar.



**PEMERINTAH KABUPATEN BAITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**3.3.1.3. Asat Tetap** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**  
**Rp2.887.891.825.498,00** **Rp3.747.433.211.896,23**

Selaku Asat Tetap Pemerintah Kabupaten Baito Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.887.891.825.498,00 mengalami kenaikan sebesar Rp120.437.823.948,04 atau 4,17% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 3.56  
 Asat Tetap

31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	581.495.442.975,40	579.495.442.975,40	2.000.000.000,00
2	Peralangan dan Mesin	890.823.400.404,33	577.700.521.704,33	313.122.878.700,00
3	Bangunan dan Peralangan	1.043.438.430.702,21	983.887.538.935,21	59.550.892.767,00
4	Akiva Jangka dan Bekas	1.043.823.237.874,79	1.542.833.379.874,79	(499.010.142.000,00)
5	Asat Tetap Lainnya	11.000.422.364,19	11.197.438.912,19	(197.016.548,00)
6	Permodalan Dalam Perusahaan	982.791.238.819,87	571.422.178.945,87	411.369.059.874,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.043.795.796.218,94)	(1.109.881.427.298,94)	66.085.631.079,99
	<b>Jumlah Awal Tahun</b>	<b>2.887.891.825.498,00</b>	<b>2.767.433.211.896,23</b>	<b>120.458.613.601,77</b>

Rincian saldo awal masing-masing Asat Tetap Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama (14/11/2022)	Masa Tahun 2022		Saldo (1-12/2022)
		Tanah	Bangunan	
1	579.495.442.975,40	579.495.442.975,40	579.495.442.975,40	579.495.442.975,40
2	577.700.521.704,33	75.000.000.000,00	7.427.000.000,00	540.000.000.000,00
3	983.887.538.935,21	104.210.100.000,00	48.799.000.000,00	1.043.438.430.702,21
4	1.542.833.379.874,79	115.805.445.230,00	92.028.779.027,00	1.043.823.237.874,79
5	11.197.438.912,19	879.895.190,00	379.198.038,00	11.000.422.364,19
6	571.422.178.945,87	62.845.000.190,00	33.000.438.495,00	569.791.238.819,87
	<b>4.279.264.898.898,40</b>	<b>634.405.775.475,40</b>	<b>182.891.475.691,40</b>	<b>4.067.048.648.717,40</b>

Tabel 3.57 Perincian Saldo Awal Gedung dan Peralangan di Masa Awal dan Saldo 31 Asat Tetap Lainnya di Permodalan Dalam Perusahaan

Nilai Asat Tetap Pemerintah Kabupaten Baito Utara per 31 Desember 2022 Rp4.567.848.812.117,40 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.099.630.976.084,91 terjadi kenaikan sebesar Rp468.217.836.112,49 atau 11,42%. Perincian saldo masing-masing Asat Tetap adalah sebagai berikut:

**3.3.1.3.1. Tanah** **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**  
**Rp581.554.985.193,40** **Rp579.444.942.975,40**

Selaku Asat Tetap Tanah pemerintah Kabupaten Baito Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp581.554.985.193,40 mengalami kenaikan sebesar Rp2.109.542.220,00 atau 0,36% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 3.57  
 Asat Tetap Tanah  
 31 Desember 2022

No	Nama (14/11/2022)	Masa Perhitungan Masa Tahun 2022		Saldo (1-12/2022)	Saldo(Tanah)
		Pembelian	Pergerakan		
1	579.444.942.975,40	579.444.942.975,40	21.147.000,00	581.554.985.193,40	579.444.942.975,40



**PEMERINTAH KABUPATEN BAHU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

<b>I. Total</b>	<b>(dalam Rupiah)</b>
a. <b>Mutasi Tambah</b>	<b><u>2.459.489.729.00</u></b>
Belanja Modal Tahun 2022:	
- Dinas PKKPP	221.976.720.00
- Dinas Disparipera	148.083.000.00
Hibah,	
- Dinas PUPB	1.279.624.000.00
b. <b>Mutasi Kurang</b>	<b><u>181.147.590.00</u></b>
Reklasifikasi	
- Dinas PKKPP pindah ke KDP	181.147.590.00

**5.3.1.1.1. Perubahan dan Mutasi    31 Desember 2022    31 Desember 2021**  
**Rp44.623.499.404,33    Rp277.709.521.164,33**

Saldo Awal Tetap Perubahan dan Mutasi pemerintah Kabupaten Bahu Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp44.623.499.404,33 mengalami kenaikan sebesar Rp233.086.028.760,00 atau 5,23% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

**Tabel 5.33**  
**Aset Tetap Perubahan dan Mutasi**  
**31 Desember 2022**

No.	Batas 01-01-2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Batas 31-12-2022	Kenaik/Turun)
		Pembelian	Penghapusan		
1	277.709.521.164,33	79.084.13.900,00	7.427.020.320,00	849.023.434.004,33	57.313.912.840,00

<b>Perubahan dan Mutasi:</b>	<b>(dalam Rupiah)</b>
a. <b>Mutasi Tambah</b>	<b><u>78.380.813.900.00</u></b>
Belanja Modal Tahun 2022:	
- Sekretaris DPRD	872.979.000.00
- Sekretaris Daerah	1.891.340.581.00
- Kecamatan Terewi Tengah	140842000.00
- Kecamatan Muntali	264.137.000.00
- Kecamatan Laloi	71.230.000.00
- Kecamatan Terewi Timur	11.110.000.00
- Kecamatan Gunung Poni	49.458.750.00
- Kecamatan Terewi Barat	180.344.375.00
- Kecamatan Terewi Selatan	30.888.000.00
- Dinas PUPB	13.993.227.000.00
- Dinas Perhubungan	780.108.000.00
- Dinas Kesehatan	13.462.179.743.00
- Dinas Kerebuan (Dana Kapuas)	194.138.375.00
- Rumah Sakit Uman Daerah	4.034.991.263.00
- Rumah Sakit Uman Daerah (Dana BLUD)	3.442.847.575.00
- Dinas Tekdiklatpp	43.420.000.00
- Dinas Pendidikan	3.827.228.725.00
- Dinas Pendidikan (DRAF PALID)	78.713.000.00
- Dinas Pendidikan (Dana BOS)	1.264.968.435.00
- Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.000.000.00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2021

- Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi & UKM	437.734.890,00
- Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	13.887.208.180,00
- Dinas Kependidikan dan Penertatan Sipil	213.623.000,00
- Dinas Pertanian	583.275.700,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	455.400.000,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	49.506.000,00
- Badan Pengkajian Penyelamatan Daerah	189.130.000,00
- Badan Pengkajian Keuangan dan Aset	476.886.830,00
- Inspektorat	109.522.448,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Litbang	725.688.786,00
- Dinas Lingkungan Hidup	2.983.234.199,00
- Dinas Budidaya	448.894.200,00
- Badan Kemitraan Bangsa dan Politik	17.937.500,00
- Badan Politik PP dan Daerah	321.710.500,00
- Badan Kepegawaian Pengembangan SDM	145.970.000,00
- Diskominfo awal	302.000.000,00
- Dinas Perencanaan dan Kemitraan	782.317.880,00
<b>Bekasifkasi:</b>	
- Sekretariat DPRD dan KDI-I	8.888.000,00
- Dinas Pendidikan dan KID-C	1.849.484.718,00
	0
- Dinas Pertanian dan KTI-C	1.030.965.250,00
	0
<b>Tilaki:</b>	
- RSHD	82.250.000,00
- Badan Pengkajian Penyelamatan Daerah	243.700.000,00
<b>Belanja Barang/Awal:</b>	
- Kecamatan Teweh Tengah	61.876.000,00
- Kecamatan Sekel Uluen Daerah	311.762.451,00
- Dinas Diklatkbbp	17.900.000,00
- Diskominfo awal	18.684.167,00
- Badan Pengkajian Penyelamatan Daerah	11.500.000,00
<b>b. Modal Kering</b>	<b>7.427.928.129,00</b>
<b>Bekasifkasi:</b>	
- Kecamatan Teweh Tengah Rarak Barak	130.869.200,00
- Dinas Perdagangan Rarak Barak	319.869.000,00
- Kecamatan Teweh Tengah Barang Pokok Habis	30.805.000,00
- Dinas Diklatkbbp Rarak Barak	535.313.900,00
- Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah Rarak Barak	293.495.250,00
- Dinas Pertanian Rarak Barak	216.240.000,00
- Diskominfo Rarak Barak	39.875.000,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rarak Barak	78.370.540,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rarak Barak	188.542.000,00
- Badan Pengkajian Penyelamatan Daerah Rarak Barak	107.857.500,00
- Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Rarak Barak	40.527.000,00
- Dinas Perencanaan Modal dan PTSP	110.119.500,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian	



**PEMERINTAH KABUPATEN HARAU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- dan Pengembangan Ruang Dasar	773.434.100,00
- Dinas Lingkungan Hidup Ruang Dasar	346.613.900,00
- Satuan Polisi PP dan Damkar Ruang Dasar	144.898.950,00
- Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Ruang Dasar	23.422.500,00
- Dinas Perencanaan dan Keuangan Ruang Dasar	22.333.000,00
- Kecamatan Lahat Ruang Pokok Habitat	12.673.000,00
- Kecamatan Tebuk Hari Ruang Pokok Habitat	3.000.000,00
- Dinas Kesehatan Ruang Pokok Habitat	2.304.634.338,00
- Rumah Sakit Umum Daerah Ruang Pokok Habitat	578.389.677,00
- Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UKM Ruang Pokok Habitat	42.457.500,00
- Dinas Sosial/Perberdayaan Masyarakat Desa Ruang Pokok Habitat	25.000.000,00
- Dinas Pendidikan relatif ke KIB-E	87.220.191,00
- Dinas Pertanian Ruang Pokok Habitat	2.134.330,00
- Dinas Lingkungan Hidup Ruang Pokok Habitat	10.830.000,00
- Badan Kelembagaan Hukum dan Politik Ruang Pokok Habitat	1.380.000,00
- Satuan Polisi PP dan Damkar Ruang Pokok Habitat	58.783.000,00
<b>Ekterskomputabel</b>	<b>12.640.000,00</b>
- Sekretariat DPRD	10.000.000,00
- Kecamatan Mantabai	900.000,00
- Kecamatan Tebuk Hari	900.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.000.000,00
- Dinas Kesehatan	22.024.000,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	7.891.943,00
- Dinas Pendidikan	881.383.868,00
- Diskominfo	1.437.500,00
- Inspektori	9.350.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup	1.134.500,00
- Dinas Disparitas	550.000,00

**A.3.1.1.A.3. Gedung dan Bangunan** 31 Desember 2022 Rp1.001.438.430.702,81 31 Desember 2021 Rp953.997.839.826,81

Saldo Awal Tetap Gedung dan Bangunan pemerintah Kabupaten Harau Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.043.478.430.702,81 merupakan kenaikan sebesar Rp94.441.890.867,00 atau 8,57% dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.

Tabel 3.29  
 Awal Tetap Gedung dan Bangunan  
 31 Desember 2022

No	Saldo 01-01-2022	Mutasi Pergerakan Saldo 2022		Saldo 31-12-2022	Sisa/Perolehan
		Pembelian	Penghapusan		
1	Rp1.043.478.430.702,81	108.718.326.000,24	48.794.000.000,00	1.103.412.756.702,81	Rp 59.644.080.867,24

3. Gedung dan Bangunan	(Saldo Rp2022)
a. Mutasi Tahunan	<b>120.218.199.696,00</b>
Detail Mutasi Tahun 2022,	
- Sekretariat DPRD	871.828.170,00
- Kecamatan Lahat	99.964.000,00
- Dinas PUPR	61.844.023.609,00



**PEMERINTAH KABUPATEN HARAU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LEMBUR TABEL 1 YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 (SAM 2021)

- Dinas Perhubungan	641.167.500,00
- Dinas Kesehatan	18.774.863.049,00
- Dinas Pendidikan	24.720.814.047,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.974.757.403,00
- Dinas Pertanian	3.097.412.199,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.603.344.000,00
- Badan Pengolahan Pangan Daerah	35.000.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup	209.962.750,00
- Dinas Pariwisata	4.431.453.118,00
- Badan Pil PP dan Daerah	49.779.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	1.831.837.500,00
<b>Rachantika:</b>	
- Dinas PUPH dari KDP	19.467.333.000,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari KDP	1.563.519.597,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsifan dari KDP	2.304.318.500,00
- Badan Kelembagaan Bangsa dan Politik dari KID-B	299.000.000,00
<b>Bidang Barang/Jasa:</b>	
- Sekretariat Daerah	400.850.000,00
- Dinas Kesehatan	219.130.000,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	67.864.123,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	289.390.000,00
- Inspektoral	61.118.500,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Labang	32.996.730,00

**b. Misi Kurang**

**48.769.205.819,00**

**Rachantika:**

- Sekretariat DPRD ke KDP	26.529.000,00
- Dinas PUPH ke KDP	40.613.343.209,00
- Dinas Perhubungan ke KDP	99.214.000,00
- Dinas Perhubungan ke KID-D	194.880.000,00
- Dinas Perhubungan ke Rumah Sakit	126.717.300,00
- Dinas Pendidikan ke KID-B	1.849.684.718,00
- Dinas Pertanian ke KID-B	1.030.903.250,00
- Dinas Perikanan KDP	644.660.600,00
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke Rumah	148.322.730,00

**Berat**

- Dinas Pariwisata Berangku KID-B	685.282.142,00
-----------------------------------	----------------

**Elektronik/pasah:**

- Kecamatan Labang	13.606.500,00
- Dinas Lingkungan Hidup	8.150.000,00

**Penghapusan:**

- Dinas Kesehatan	2.236.441.367,00
- Rumah Sakit Umum Daerah	62.340.000,00
- Dinas Pendidikan	583.299.807,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	99.720.376,00

**Barang Pakai Mabis:**

- Dinas Pertanian	29.720.250,00
-------------------	---------------



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LEMBER TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga:

- Dinas PUPB 716.633.400,00

**4.3.1.3.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
Rp1.909.818.267.835,79 Rp1.845.802.379.674,79

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan *(Saldo Awal)*  
a. Mutasi Tambah **116.865.662.328,00**

Balasan Modal Tahun 2022:

- Sekretariat DPRD 10.785.433,00
- Dinas PUPB 107.130.773.243,00
- Dinas PUSPP 420.512.000,00
- Dinas Kesehatan 6.647.400.000,00
- Dinas Pendidikan 50.000.000,00
- Dinas Pertanian 179.349.000,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian 11.000.000,00

Rakus/Ruas:

- Dinas Perhubungan dari KIB-C 194.880.000,00
- Dinas Kesehatan Pangan dan Perikanan dari KIB-B 13.243.410,00
- Dinas BUDIPARPCMA dari KIB-C 693.557.993,00

Hibah:

- Dinas PUPB 3.451.464.000,00

b. Mutasi Kurang **52.509.775.877,00**

Rakus/Ruas:

- Dinas PUPB ke KIB 11.887.724.840,00

Konsumsi/persediaan:

- Sekretariat DPRD 13.764.000,00
- Dinas Kesehatan 90.000.000,00
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian 11.000.000,00

Penghapusan:

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian 276.004.417,00

Barang Pokok Habis:

- Dinas PUPB 101.900.000,00

Barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga:

- Dinas Pertanian 140.350.000,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.909.818.267.835,79 melebihi jumlah sebesar Rp14.333.888.161,00 atau 1,27% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 9.89

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
31 Desember 2022

No.	Saldo 31-12-2021	Mutasi Perubahan Saldo Tahun 2022		Saldo 31-12-2022	Revisi/Urut
		Penerimaan	Penghapusan		
1.	1.845.802.379.674,79	116.865.662.328,00	52.509.775.877,00	1.909.818.267.835,79	94.333.888.161,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**5.3.1.1.5.5. Aset Tetap Lainnya****31 Desember 2022****31 Desember 2021****Rp11.398.422.744,10****Rp11.195.638.512,10**

Saldo Aset Tetap Lainnya pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.398.422.744,10 mengalami kenaikan sebesar Rp104.784.232,00 atau 0,94% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.51  
Aset Tetap Lainnya  
31 Desember 2022

No	Saldo 01-01-2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo 31-12-2022	Materi/Unit
		Pembelian	Penghapusan		
1	11.195.638.512,10	474.966.628,00	479.156.496,00	11.398.422.744,10	104.784.232,00
<b>5. Aset Tetap Lainnya:</b>					<i>(dalam Rupiah)</i>
<b>a. Mutasi Tambah</b>					<b>474.966.628,00</b>
<b>Belanja Modal Tahun 2022:</b>					
-					
-					Sekretariat DPRD 8.800.000,00
-					Bahan Pengolahan Kawasan dan Aset 9.700.000,00
-					Dinas PASPORA 121.963.000,00
-					Dinas Pendidikan (DPS) 323.949.628,00
<b>Reklasifikasi:</b>					
-					Dinas Pendidikan dari KIB-B 87.228.191,00
<b>Konversi dari Bayan:</b>					
-					RSUD 321.216.879,00
<b>b. Mutasi Kurang</b>					<b>479.156.496,00</b>
<b>Reklasifikasi:</b>					
-					Sekretariat DPRD ke KIB-B 8.800.000,00
-					Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Bauk-Bauk) 26.790.000,00
-					Bahan Pengolahan Kawasan dan Aset ke KIB-B 9.700.000,00
-					Bahan Kelembagaan Bangun dan Politik ke KIB-C 199.996.696,00
<b>Distribusi/pelepas:</b>					
-					Dinas Pendidikan (DPS) 324.349.638,00

**5.3.1.1.5.6. Konstruksi Dalam****31 Desember 2022****31 Desember 2021****Progres****Rp388.791.296.614,97****Rp311.452.176.945,97**

Saldo Aset Konstruksi Dalam Progres pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp388.791.296.614,97 mengalami kenaikan sebesar Rp69.338.109.671,00 atau 22,37% dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.52  
Konstruksi Dalam Progres  
31 Desember 2022

No	Saldo 01-01-2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo 31-12-2022	Materi/Unit
		Pembelian	Penghapusan		
1	311.452.176.945,97	62.940.026.119,00	33.303.406.449,00	388.791.296.614,97	69.338.109.671,00
<b>5. Konstruksi Dalam Progres</b>					<i>(dalam Rupiah)</i>
<b>a. Mutasi Tambah</b>					<b>62.940.026.119,00</b>
<b>Reklasifikasi:</b>					
-					Sekretariat DPRD dari KIB-C 26.529.000,00
-					Dinas PU/PR dari KIB-C 48.033.241.319,00
-					Dinas PU/PR dari KIB-D 11.887.725.800,00





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

- Dinas PRKPP dan KIB-A	151.147.100,00
- Dinas Perhubungan dari KIB-C	99.234.000,00
- Dinas Pertanian dari KIB-C	644.600.000,00
- Dinas BUDIPARPOKA dari KIB-D	8.315.401,00
<b>b. Misi Kurang</b>	<b>23.495.071.007,00</b>
<b>Reklasifikasi:</b>	
- Dinas PUPH ke KIB-C	19.807.315.000,00
- Badan Penyelenggaraan Distrik Daerah ke KIB-C	1.263.319.397,00
- Dinas Kesehatan dan Perseptakaan ke KIB-C	2.364.018.500,00
<b>Penghapusan:</b>	
- Dinas Pendidikan (PND)	111.000.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup (sialak dihapuskan)	49.299.000,00

**5.3.1.3.7. Akumulasi** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Prisyanan** Rp(1.480.895.766.418,54) Rp(1.588.863.487.854,08)

Saldo Awal Akumulasi Prisyanan Pemerintah Kabupaten Barito Utara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(1.588.863.487.854,08) mengalami kenaikan sebesar Rp(771.194.279.062,76) dibandingkan dengan saldo tahun 2021.

Tabel 5.82  
**Akumulasi Prisyanan**  
**31 Desember 2022**

No.	Saldo 31-12-2021	Misi Percepatan Kinerja Tahun 2022		Saldo 31-12-2022	Misi Percepatan
		Pembentukan	Pengurangan		
1.	388.139.000.000,00	91.903.968.120,00	3.300.000.000,00	484.811.968.120,00	388.139.000.000,00
2.	192.279.081.883,00	16.807.549.204,00	917.205.213,00	198.812.321.894,00	192.279.081.883,00
3.	640.182.339.500,00	64.702.668.137,00	342.711.508,00	1.042.864.470.217,00	640.182.339.500,00

**5.3.1.3.8.1. Tagihan** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Jangka Panjang** Rp297.545.792,00 Rp271.481.076,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp297.545.792,00 mengalami sebesar Rp25.944.716,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 271.481.076,00.

Tabel 5.84  
**Tagihan Jangka Panjang**  
**31 Desember 2022**

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Pembentukan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tagihan Tuntutan (sialak Rp)	271.481.076,00	25.944.716,00	0,00	297.545.792,00
Jumlah	271.481.076,00	25.944.716,00	0,00	297.545.792,00

**5.3.1.3.8.2. Aset** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
**Tidak Berwujud** Rp1.804.147.100,00 Rp1.722.847.100,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.804.147.100,00 merupakan saldo ATB. Mengalami kenaikan sebesar Rp81.300.000,00 adalah karena penambahan dengan tahun berjalan dari saldo tahun sebelumnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**Tabel 5.88**  
**Aset Tak Berwujud**  
**31 Desember 2022**

No	Saldo 01-01-2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo 31-12-2022	Merk/Tujuan
		Pembelian	Penghapusan		
1	1.202.891.700,00	0	0,00	1.202.891.700,00	0
<b>a. Mutasi Tambah</b>					<b>0</b>
<b>Belanja Barang-Jasa</b>					
- Dana Komersial					31.350.000,00
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM					48.950.000,00

**Tabel 5.89**  
**Amortisasi Aset Tak Berwujud**  
**31 Desember 2022**

No	Saldo 01-01-2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo 31-12-2022	Merk/Tujuan
		Pembelian	Penghapusan		
1	882.294.400,00	196.328.000,00	-	1.078.622.400,00	196.328.000,00

**5.3.1.3.3. Aset Lain-lain** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
Rp22.692.243.503,00 Rp22.976.107.112,00

Aset ini berlatar hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnya masuk ke dalam kelompok aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan seperti kondisi barang rusak berat. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.692.243.503,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.286.713.969,00 dari tahun sebelumnya akibat kondisi reklasifikasi aset yang telah dibebaskan kepada pihak ketiga. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan SKPD:

**Tabel 5.87**  
**Aset Lain-lain**  
**31 Desember 2022**

Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Saldo per 31 Desember 2021	Merk/Tujuan
Aset Lain-lain	22.692.243.503,00	22.976.107.112,00	10.286.713.969,00
Jumlah	22.692.243.503,00	22.976.107.112,00	10.286.713.969,00

**5.3.2. Kewajiban** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
Rp7.850.550.222,00 Rp43.061.689.954,64

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.850.550.222,00 mengalami penurunan sebesar Rp35.211.139.732,64 atau sebesar 81,77% dari saldo kewajiban tahun sebelumnya sebesar Rp43.061.689.954,64.

**Tabel 5.88**  
**Kewajiban**  
**31 Desember 2022**

Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Saldo per 31 Desember 2021	Merk/Tujuan
Kewajiban Jangka Pendek	7.850.550.222,00	43.061.689.954,64	35.211.139.732,64
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.850.550.222,00	43.061.689.954,64	35.211.139.732,64

**5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek** 31 Desember 2022 31 Desember 2021  
Rp7.850.550.222,00 Rp43.061.689.954,64

Saldo kewajiban jangka pendek yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.850.550.222,00 mengalami penurunan sebesar Rp35.211.139.732,64 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya sebesar Rp43.061.689.954,64.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Tabel 5.88  
**Revisi/Umum Jangka Pendek**

Uraian	Rendita per 31 Desember 2022	Rendita per 31 Desember 2021	Saldo (Tahun)
Utang PPK	1.392.903,00	128.873.313,44	(127.480.410,44)
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
Utang Piutang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Revisi Lancar Utang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Penurunan Utangima Direvisi	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	4.782.809.069,00	40.808.423.894,00	(36.025.614.825,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.082.298.350,00	3.082.813.260,00	(695.514.910,00)
<b>Jumlah</b>	<b>7.858.090.322,00</b>	<b>42.094.098.067,44</b>	<b>(34.211.139.710,44)</b>

Utang PPK sebesar Rp1.392.903,00 merupakan hutang atas Sdkd kas dengan berdasarkan Data BOS di Sekolah SD dan SMP pada TA 2022 Utang Belanja sebesar Rp4.782.809.069,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.082.298.350,00. Adapun Saldo Kewajiban Jangka Pendek dapat dirinci sebagai berikut:

**5.3.3.1.1. Utang PPK**

Jumlah Utang PPK Data BOS pada Sekolah Dasar TA 2022 sebesar Rp235.764.265,44 terdiri dari PPK Pasal 21 sebesar Rp PPK Pasal 22 sebesar Rp180.000.000,00 dan PPK sebesar Rp55.764.265,44 dan Jumlah Utang PPK Data Bos pada Sekolah Menengah Pertama Tahun 2022

Rincian utang PPK PPK Pasal 21 disajikan sebagai berikut:

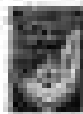
NO	NAMA SERTUAN	JENIS PAJAK	NILAI BAYAN PKK	TANGGAL SETOR
1	SD NEGERI 1 MELAYU TAMPE	PKK 21	20.000,00	24/12/2022
2	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	10.000,00	24/12/2022
3	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	50.000,00	24/12/2022
4	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	10.000,00	24/12/2022
5	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
6	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	200.000,00	24/12/2022
7	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
8	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
9	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	50.000,00	24/12/2022
10	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
11	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	50.000,00	24/12/2022
12	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	50.000,00	24/12/2022
13	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	50.000,00	24/12/2022
14	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	50.000,00	24/12/2022
15	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	400.000,00	24/12/2022
16	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
17	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
18	SD NEGERI 1 MELAYU TAMAP	PKK 21	400.000,00	24/12/2022
19	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	400.000,00	24/12/2022
20	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	40.000,00	24/12/2022
21	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
22	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	200.000,00	24/12/2022
23	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	150.000,00	24/12/2022
24	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	400.000,00	24/12/2022
25	SD NEGERI 2 SANGAI Tampak	PKK 21	400.000,00	24/12/2022
26	SD NEGERI 2 SANGAI Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
27	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
28	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
29	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	50.000,00	24/12/2022
30	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
31	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
32	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
33	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
34	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
35	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
36	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
37	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
38	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
39	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
40	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
41	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
42	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
43	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
44	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
45	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
46	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
47	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
48	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
49	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
50	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
51	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
52	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
53	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
54	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
55	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
56	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
57	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
58	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
59	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
60	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
61	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
62	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
63	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
64	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
65	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
66	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
67	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
68	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
69	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
70	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
71	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
72	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
73	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
74	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
75	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
76	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
77	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
78	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
79	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
80	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
81	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
82	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
83	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
84	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
85	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
86	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
87	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
88	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
89	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
90	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
91	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
92	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
93	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
94	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
95	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
96	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
97	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
98	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
99	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022
100	SD NEGERI 2 LAMPUR Tampak	PKK 21	100.000,00	24/12/2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BAHITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	NAMA REVENUE	JENIS PAJAK	NILAI BETON (Rp)	TANGGAL BETON
32	SDP 1 JAMBU TANGAP I	PPH 21	120.000,00	15/01/2022
33	SDP 1 JAMBU TANGAP I	PPH 21	120.000,00	15/01/2022
34	SDP 1 MELAYU TANGAP I	PPH 21	140.000,00	15/01/2022
35	SDP 1 MELAYU TANGAP I	PPH 21	80.000,00	15/01/2022
36	SDP 1 MELAYU TANGAP I	PPH 21	140.000,00	15/01/2022
37	SDP 1 MELAYU TANGAP I	PPH 21	80.000,00	15/01/2022
38	SDP 1 MELAYU TANGAP I	PPH 21	140.000,00	15/01/2022
39	SDP 1 MELAYU TANGAP I	PPH 21	80.000,00	15/01/2022
40	SDP 1 MELAYU TANGAP II	PPH 21	80.000,00	15/01/2022
41	SDP 2 TAMPARANG (ALAM) TANGAP II	PPH 21	80.000,00	15/01/2022
42	SDP 2 TAMPARANG (ALAM) TANGAP II	PPH 21	20.000,00	15/01/2022
43	SDP 4 MELAYU TANGAP I	PPH 21	290.750,00	04/01/2022
44	SDP 4 MELAYU TANGAP I	PPH 21	117.800,00	04/01/2022
45	SDP 4 MELAYU TANGAP I	PPH 21	117.500,00	04/01/2022
46	SDP 4 MELAYU TANGAP I	PPH 21	74.250,00	04/01/2022
47	SDP 4 MELAYU TANGAP I	PPH 21	294.000,00	04/01/2022
48	SDP 4 MELAYU TANGAP I	PPH 21	493.000,00	04/01/2022
49	SDP 4 MELAYU TANGAP I	PPH 21	100.000,00	04/01/2022
50	SDP 4 MELAYU TANGAP II	PPH 21	224.000,00	04/01/2022
51	SDP 4 MELAYU TANGAP II	PPH 21	337.000,00	04/01/2022
52	SDP 4 MELAYU TANGAP II	PPH 21	198.000,00	04/01/2022
53	SDP 4 MELAYU TANGAP II	PPH 21	187.200,00	04/01/2022
54	SDP 4 MELAYU TANGAP II	PPH 21	420.000,00	04/01/2022
55	SDP 4 MELAYU TANGAP II	PPH 21	100.000,00	04/01/2022
56	SDP 4 MELAYU TANGAP II	PPH 21	80.000,00	14/01/2022
57	SDP 4 MELAYU TANGAP II	PPH 21	50.000,00	14/01/2022
58	SDP 1 BUKITING TANGAP I	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
59	SDP 1 BUKITING TANGAP I	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
60	SDP 1 BUKITING TANGAP I	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
61	SDP 1 BUKITING TANGAP I	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
62	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
63	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
64	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
65	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
66	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
67	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
68	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
69	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
70	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
71	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
72	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
73	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
74	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
75	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
76	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
77	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
78	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
79	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
80	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
81	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
82	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
83	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
84	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
85	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
86	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
87	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
88	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
89	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
90	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
91	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
92	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
93	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
94	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
95	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
96	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
97	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
98	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
99	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022
100	SDP 1 BUKITING TANGAP II	PPH 21	20.000,00	14/01/2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BARTO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 (LAN 2021)

NO	NAMA BEROLAH	JENIS PELAKSANA	GLAI SETOR (Rp)	TANGGAL SETOR
100	SD Negeri 1 Jambu Tahun II	PPS 21	117.000,00	20040001
101	SD Negeri 1 KLU BARI Tahun I	PPS 21	60.000,00	20040002
102	SD Negeri 1 ALA BARI Tahun I	PPS 21	75.000,00	20040003
103	SD Negeri 1 ALA BARI Tahun II	PPS 21	180.000,00	20040004
104	SD Negeri 1 ALA BARI Tahun I	PPS 21	40.000,00	20040005
105	SD Negeri 1 ALA BARI Tahun I	PPS 21	170.700,00	20040006
106	SD Negeri 1 ALA BARI Tahun II	PPS 21	80.000,00	20040007
107	SD Negeri 1 LAHI 1 Tahun I	PPS 21	217.000,00	20040008
108	SD Negeri 1 LAHI 2 Tahun I	PPS 21	208.100,00	20040009
109	SD Negeri 1 LAHI 2 Tahun II	PPS 21	78.000,00	20040010
110	SD Negeri 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	270.700,00	20040011
111	SD Negeri 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	120.000,00	20040012
112	SD Negeri 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	180.000,00	20040013
113	SD Negeri 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	60.000,00	20040014
114	SD Negeri 1 MALAMAREN Tahun II	PPS 21	180.000,00	20040015
115	SD Negeri 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	180.000,00	20040016
116	SD Negeri 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	80.000,00	20040017
117	SD Negeri 1 MALAMAREN Tahun II	PPS 21	180.000,00	20040018
118	SD Negeri 2 HALAU Tahun I	PPS 21	81.000,00	20040019
119	SD Negeri 2 HALAU Tahun I	PPS 21	80.000,00	20040020
120	SD Negeri 2 HALAU Tahun I	PPS 21	207.000,00	20040021
121	SD Negeri 2 LAHI 2 Tahun I	PPS 21	120.000,00	20040022
122	SD Negeri 2 LAHI 2 Tahun II	PPS 21	20.000,00	20040023
123	SD Negeri 2 LAHI 2 Tahun II	PPS 21	120.000,00	20040024
124	SD Negeri 2 LAHI 2 Tahun II	PPS 21	180.000,00	20040025
125	SD Negeri 2 LAHANG Tahun I	PPS 21	217.000,00	20040026
126	SD Negeri 2 LAHANG Tahun I	PPS 21	90.000,00	20040027
127	SD Negeri 2 HALAU Tahun I	PPS 21	180.000,00	20040028
128	SD Negeri 2 HALAU Tahun II	PPS 21	180.000,00	20040029
129	SD Negeri 3 Jambu 1 1989	PPS 21	144.000,00	20040030
130	SD Negeri 3 Jambu 1 1989	PPS 21	20.000,00	20040031
131	SD Negeri 3 Jambu 1 1989	PPS 21	80.000,00	20040032
132	SD Negeri 3 Jambu 1 1989	PPS 21	10.000,00	20040033
133	SD Negeri 3 Jambu 1 1989	PPS 21	80.000,00	20040034
134	SD Negeri 3 Jambu 1 1989	PPS 21	70.000,00	20040035
135	SD Negeri 3 LAHI 1 Tahun I	PPS 21	120.000,00	20040036
136	SD Negeri 3 LAHI 1 Tahun II	PPS 21	120.000,00	20040037
137	SD Negeri 3 LAHI 1 Tahun I	PPS 21	120.000,00	20040038
138	SD Negeri 3 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	270.000,00	20040039
139	SD Negeri 3 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	280.000,00	20040040
140	SD Negeri 4 Jambu 1 1989	PPS 21	80.000,00	20040041
141	SD Negeri 4 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	180.000,00	20040042
142	SD Negeri 4 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	180.000,00	20040043
143	SD Negeri 4 MALAMAREN Tahun II	PPS 21	180.000,00	20040044
144	SDN 1 BARTO NAYA 1 Tahun I	PPS 21	80.000,00	20040045
145	SDN 1 BARTO NAYA 1 Tahun I	PPS 21	20.000,00	20040046
146	SDN 1 BARTO NAYA 1 Tahun I	PPS 21	20.000,00	20040047
147	SDN 1 BARTO NAYA 1 Tahun I	PPS 21	80.000,00	20040048
148	SDN 1 BARTO NAYA 1 Tahun I	PPS 21	40.000,00	20040049
149	SDN 1 BEMANGON Tahun I	PPS 21	100.000,00	20040050
150	SDN 1 BEMANGON Tahun II	PPS 21	80.000,00	20040051
151	SDN 1 BEMANGON Tahun II	PPS 21	100.000,00	20040052
152	SDN 1 BEMANGON Tahun I	PPS 21	20.000,00	20040053
153	SDN 1 BEMANGON Tahun I	PPS 21	80.000,00	20040054
154	SDN 1 BEMANGON Tahun II	PPS 21	80.000,00	20040055
155	SDN 1 KUTAPANAN Tahun I	PPS 21	100.000,00	20040056
156	SDN 1 KUTAPANAN Tahun I	PPS 21	20.000,00	20040057
157	SDN 1 KUTAPANAN Tahun I	PPS 21	100.000,00	20040058
158	SDN 1 KUTAPANAN Tahun I	PPS 21	80.000,00	20040059
159	SDN 1 KUTAPANAN Tahun II	PPS 21	40.000,00	20040060
160	SDN 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	2.000,00	20040061
161	SDN 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	2.000,00	20040062
162	SDN 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	100.000,00	20040063
163	SDN 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	20.000,00	20040064
164	SDN 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	20.000,00	20040065
165	SDN 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	80.000,00	20040066
166	SDN 1 MALAMAREN Tahun I	PPS 21	80.000,00	20040067
167	SDN 1 BEMANGON Tahun I	PPS 21	80.000,00	20040068



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

NO	NAMA SISWA	JENIS JAJARAN	NILAI RUB	TANGGAL BAYAR
167	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	75.000,00	20120101
168	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	75.000,00	20120101
169	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	87.500,00	20120101
170	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	100.000,00	20120101
171	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	40.000,00	20120101
172	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	10.000,00	20120101
173	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	10.000,00	20120101
174	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
175	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
176	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	80.000,00	20120101
177	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	40.000,00	20120101
178	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	80.000,00	20120101
179	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
180	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
181	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
182	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	20.000,00	20120101
183	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
184	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	20.000,00	20120101
185	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	20.000,00	20120101
186	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	75.000,00	20120101
187	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
188	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	40.000,00	20120101
189	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	100.000,00	20120101
190	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
191	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	75.000,00	20120101
192	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	100.000,00	20120101
193	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
194	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	75.000,00	20120101
195	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	100.000,00	20120101
196	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
197	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
198	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
199	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	20.000,00	20120101
200	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
201	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
202	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
203	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
204	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
205	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
206	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
207	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
208	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
209	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
210	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
211	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
212	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
213	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
214	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
215	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
216	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	20.000,00	20120101
217	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
218	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
219	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	20.000,00	20120101
220	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	20.000,00	20120101
221	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
222	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
223	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
224	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
225	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
226	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
227	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
228	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
229	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
230	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
231	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	20.000,00	20120101
232	KON I MANDAR I Tahun I	11/12/11	20.000,00	20120101
233	KON I MANDAR I Tahun II	11/12/11	20.000,00	20120101





**PEMERINTAH KABUPATEN BAHAU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2021

Rincian utang PPK PPh Pasal 22 disajikan sebagai berikut:

NO	NAMA BEROLAH	JENIS PAJAK	NILAI BEYOR (Rp)	TANGGAL BEYOR
1	SDN 1 LAMP HULU TAMAN I	PPH 22	139.000,00	16/01/2021
2	SDN 1 MAM HULU TAMAN II	PPH 22	30.000,00	23/01/2021
Jumlah			169.000,00	

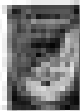
Rincian utang PPK PPh Pasal 22 disajikan sebagai berikut:

NO	NAMA BEROLAH	JENIS PAJAK	NILAI BEYOR (Rp)	TANGGAL BEYOR
1	SDN NEGARA 2 MELAYU TAMAN I	PPH 21	88.000,00	15/04/2021

Rincian utang PPK PPh disajikan sebagai berikut:

NO	NAMA BEROLAH	JENIS PAJAK	NILAI BEYOR (Rp)	TANGGAL BEYOR
1	SD NEGARA 1 BAMBANGKALU AIRAWATI	PPH	1.420.000,00	09/11/2021
2	SD NEGARA 1 BANGKONG TAMAN I	PPH	80.000,00	21/01/2021
3	SD NEGARA 1 BANGKONG TAMAN II	PPH	80.000,00	21/01/2021
4	SD NEGARA 1 BANGKONG TAMAN III	PPH	80.000,00	21/01/2021
5	SD NEGARA 1 MELAYU TAMAN I	PPH	278.000,00	24/01/2021
6	SD NEGARA 1 MELAYU TAMAN I	PPH	278.000,00	24/01/2021
7	SD NEGARA 1 MELAYU TAMAN I	PPH	747.000,00	24/01/2021
8	SD NEGARA 1 MELAYU TAMAN I	PPH	638.000,00	24/01/2021
9	SD NEGARA 1 MELAYU TAMAN I	PPH	392.000,00	24/01/2021
10	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN I	PPH	278.000,00	24/01/2021
11	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN I	PPH	378.000,00	24/01/2021
12	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN I	PPH	747.000,00	24/01/2021
13	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN I	PPH	638.000,00	24/01/2021
14	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN I	PPH	392.000,00	24/01/2021
15	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	278.000,00	24/01/2021
16	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	378.000,00	24/01/2021
17	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	747.000,00	24/01/2021
18	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	638.000,00	24/01/2021
19	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	392.000,00	24/01/2021
20	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	278.000,00	24/01/2021
21	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	378.000,00	24/01/2021
22	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	498.000,00	24/01/2021
23	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	673.000,00	24/01/2021
24	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	673.000,00	24/01/2021
25	SD NEGARA 10 MELAYU TAMAN II	PPH	838.000,00	24/01/2021
26	SD NEGARA 2 JAMBIL TAMAN II	PPH	40.000,00	13/01/2021
27	SD NEGARA 2 JAMBIL TAMAN II	PPH	718.000,00	13/01/2021
28	SD NEGARA 2 LAPANG TAMAN I	PPH	288.000,00	24/01/2021
29	SD NEGARA 2 LAPANG TAMAN I	PPH	288.000,00	24/01/2021
30	SD NEGARA 2 LAPANG TAMAN I	PPH	241.700,00	24/01/2021
31	SD NEGARA 2 LAPANG TAMAN I	PPH	188.000,00	24/01/2021
32	SD NEGARA 2 LAPANG TAMAN I	PPH	204.000,00	24/01/2021
33	SD NEGARA 2 LAPANG TAMAN I	PPH	204.000,00	24/01/2021
34	SD NEGARA 2 LAPANG TAMAN I	PPH	328.000,00	24/01/2021
35	SD NEGARA 2 LAPANG TAMAN II	PPH	288.000,00	24/01/2021
36	SDN 1 BAMBANGKALU TAMAN I	PPH	28.000,00	14/01/2021
37	SDN 1 BANGKONG TAMAN I	PPH	158.000,00	15/01/2021
38	SDN 1 Mambak II TAMAN I	PPH	278.000,00	16/01/2021





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	NAMA REGLERAN	JENIS PAJAK	NILAI RETOR (Rp)	TANGGAL RETOR
35	SDN 1 MENDAH II Tahap I	PPN	175.400,00	19030000
36	SDN 1 MENDAH II Tahap I	PPN	115.000,00	19030000
37	SDN 1 MENDAH II Tahap II	PPN	400.000,00	19030000
38	SDN 1 MENDAH II Tahap II	PPN	324.000,00	19030000
39	SDN 2 TUMPLANG LAUNG I Tahap III	PPN	204.800,00	19030000
40	SDN 4 MELAYU Tahap I	PPN	700.400,00	19030000
41	SDN 4 MELAYU Tahap I	PPN	581.800,00	19030000
42	SDN 4 MELAYU Tahap I	PPN	620.700,00	19030000
43	SDN 4 MELAYU Tahap I	PPN	480.000,00	19030000
44	SDN 4 MELAYU Tahap I	PPN	400.000,00	19030000
45	SDN 4 MELAYU Tahap I	PPN	447.200,00	19030000
46	SDN 4 MELAYU Tahap II	PPN	300.000,00	19030000
47	SDN 4 MELAYU Tahap II	PPN	270.000,00	19030000
48	SDN 4 MELAYU Tahap II	PPN	274.000,00	19030000
49	SDN 4 MELAYU Tahap II	PPN	570.000,00	19030000
50	SDN BENDANG PULI TAHAP II	PPN	804.000,00	19030000
51	SDN 1 BUKIT SAKIT TAHAP I	PPN	1.200.000,00	17040000
52	SDN 1 BUKIT SAKIT TAHAP II	PPN	1.004.000,00	18030000
53	SDN 1 MENDAH PULI TAHAP II	PPN	300.000,00	20030000
54	SDN 1 MENDAH PULI TAHAP II	PPN	240,00	21040000
55	SDN 1 MENDAH PULI TAHAP II	PPN	180,00	21040000
56	SDN 1 MENDAH PULI TAHAP I	PPN	240.000,00	21040000
57	SDN 1 TELUK MALINDI TAHAP II	PPN	270.700,00	20030000
58	SDN 2 TERONG TAHAP I	PPN	580.000,00	19030000
59	SDN 2 TERONG TAHAP I	PPN	500.000,00	19030000
60	SDN 2 TERONG TAHAP II	PPN	584.700,00	19030000
61	SDN 2 TERONG TAHAP II	PPN	584.500,00	19030000
62	SDN 3 LAMANG TAHAP I	PPN	470.000,00	21030000
63	SDN 3 LAMANG TAHAP II	PPN	500.000,00	21030000
64	SDN 6 MELAYU TAHAP I	PPN	204.000,00	20030000
65	SDN 6 MELAYU TAHAP II	PPN	140.000,00	20030000
66	SD NUGEN 1 HUPANG KAMP	PPN	804.000,00	20040000
67	SD NUGEN 1 MONTALAT LAPANGAN	PPN	1.007.200,00	20040000
68	SD NUGEN 1 MELANG MEL KAMPUL	PPN	300.000,00	20040000
69	SD NUGEN 1 MELANG MEL KAMPUL	PPN	1.734.000,00	20040000
70	SD NUGEN 1 MELANG MEL KAMPUL	PPN	484.000,00	20040000
71	SD NUGEN 1 RANJEN APERANG	PPN	670.000,00	19030000
72	SD NUGEN 1 RANJEN APERANG	PPN	470.700,00	19030000
73	SD NUGEN 1 RANJEN APERANG	PPN	224.000,00	19030000
74	SD NUGEN 1 ROROT APERANG	PPN	484.000,00	20040000
75	SD NUGEN 1 SD LALU APERANG	PPN	1.000.400,00	20040000
76	SD NUGEN 2 MELANG MEL APERANG	PPN	300.000,00	20040000
77	SD NUGEN 1 PALANG Tahap I	PPN	310.000,00	21040000
78	SD NUGEN 1 JAMPIL Tahap I	PPN	1.001.400,00	20040000
79	SD NUGEN 1 JAMPIL Tahap I	PPN	600.200,00	20040000
80	SD NUGEN 1 JUAL MARY Tahap II	PPN	80.000,00	21040000
81	SD NUGEN 1 MELANGKAT Tahap II	PPN	80.000,00	20040000
82	SD NUGEN 2 PALANG Tahap II	PPN	20.000,00	21040000



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	NAMA BUDAJAR	JENIS PAJAK	NILAI SETOR (Rp)	TANGGAL SETOR
87	SD NEGRI 1 HALAU Tahun II	PTN	40.000,00	20240002
88	SD NEGRI 1 PFI Tahun I	PTN	100.000,00	20240002
89	SD NEGRI 1 PFI Tahun I	PTN	75.000,00	20240002
90	SD NEGRI 1 PFI Tahun I	PTN	40.000,00	20240002
91	SD NEGRI 1 PFI Tahun I	PTN	80.000,00	20240002
92	SD NEGRI 2 PFI Tahun I	PTN	270.000,00	20240002
93	SD NEGRI 1 PFI Tahun I	PTN	80.000,00	20240002
94	SD NEGRI 1 PFI Tahun I	PTN	180.000,00	20240002
95	SD NEGRI 1 PFI Tahun I	PTN	80.000,00	20240002
96	SD NEGRI 1 PFI Tahun I	PTN	270.000,00	20240002
97	SD NEGRI 2 PFI Tahun II	PTN	80.000,00	20240002
98	SD NEGRI 1 PFI Tahun II	PTN	270.000,00	20240002
99	SD NEGRI 1 PFI Tahun II	PTN	80.000,00	20240002
100	SD NEGRI 2 Jember Tahun I	PTN	120.000,00	20240002
101	SD NEGRI 1 BOLA Tahun II	PTN	20.000,00	20240002
102	SD NEGRI 1 HALAU Tahun I	PTN	200.000,00	20240002
103	SD NEGRI 1 MALAWAN Tahun I	PTN	74.000,00	20240002
104	SD NEGRI 1 MALAWAN Tahun II	PTN	100.000,00	20240002
105	SD NEGRI 1 MALAWAN Tahun II	PTN	200.000,00	20240002
106	SD NEGRI 4 HALAU Tahun I	PTN	40.000,00	20240002
107	SD NEGRI 4 HALAU Tahun I	PTN	80.000,00	20240002
108	SD NEGRI 4 JAMBU Tahun I	PTN	70.000,00	20240002
109	SD NEGRI 4 JAMBU Tahun I	PTN	20.000,00	20240002
110	SD NEGRI 4 JAMBU Tahun II	PTN	50.000,00	20240002
111	SD NEGRI 4 MALAWAN Tahun I	PTN	50.000,00	20240002
112	SD NEGRI 4 MALAWAN Tahun I	PTN	70.000,00	20240002
113	SD NEGRI 4 MALAWAN Tahun I	PTN	80.000,00	20240002
114	SD NEGRI 4 MALAWAN Tahun II	PTN	40.000,00	20240002
115	SDN 1 BAKU Tahun I	PTN	270.000,00	20240002
116	SDN 1 BAKU Tahun I	PTN	284.000,00	20240002
117	SDN 1 BATS (RAYA) Tahun I	PTN	204.000,00	20240002
118	SDN 1 BATS (RAYA) Tahun II	PTN	280.000,00	20240002
119	SDN 1 MALINGAU Tahun I	PTN	240.000,00	20240002
120	SDN 1 MAMPYAKI Tahun I	PTN	104.000,00	20240002
121	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	170.000,00	20240002
122	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	604.000,00	20240002
123	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	150.000,00	20240002
124	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	140.000,00	20240002
125	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	140.000,00	20240002
126	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	140.000,00	20240002
127	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	140.000,00	20240002
128	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	140.000,00	20240002
129	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	140.000,00	20240002
130	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	140.000,00	20240002
131	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	140.000,00	20240002
132	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	140.000,00	20240002
133	SDN 1 Mentawai II Tahun I	PTN	140.000,00	20240002
134	SDN 1 PANGUNG LAPOKUNG Tahun I	PTN	270.000,00	20240002
135	SDN 1 BOLA Tahun I	PTN	270.000,00	20240002
136	SDN 1 SAMBANGI Tahun I	PTN	1.700.000,00	20240002



**PEMERINTAH KABUPATEN HARAU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN TANGGUNG JAWAB 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	NAMA BEROLAH	JENIS PAJAK	NILAI SETOR (Rp)	TANGGAL SETOR
135	SDN 1 TAMPLAK LAUR (I) Tahap I	PPN	272.700,00	21/04/2022
136	SDN 1 TAMPLAK LAUR (I) Tahap I	PPN	192.900,00	21/04/2022
137	SDN 2 LAMPUNG 4 TAHAP II	PPN	74.400,00	14/04/2022
138	SDN 2 PANGSI LAMPUNG Tahap II	PPN	218.700,00	20/04/2022
139	SDN 2 SIRAN Tahap I	PPN	294.100,00	20/04/2022
140	SDN 2 SIRAN Tahap I	PPN	298.200,00	20/04/2022
141	SDN 2 SIRAN Tahap I	PPN	294.200,00	20/04/2022
142	SDN 2 SIRAN Tahap II	PPN	298.200,00	20/04/2022
143	SDN 2 TAMPLAK LAUR (I) Tahap II	PPN	227.600,00	20/04/2022
144	SDN 2 TAMPLAK LAUR (I) Tahap II	PPN	279.200,00	20/04/2022
145	SDN 2 MELATI Tahap II	PPN	292.000,00	11/04/2022
146	SDN 2 MELATI Tahap II	PPN	292.000,00	11/04/2022
147	SDN 1 BANTAR BAKU TAHAP II	PPN	282.000,00	20/04/2022
148	SDN 1 NEMAN HILU TAHAP I	PPN	481.700,00	20/04/2022
149	SDN 1 NEMAN HILU TAHAP I	PPN	128.000,00	20/04/2022
150	SDN 1 NEMAN HILU TAHAP II	PPN	128.000,00	20/04/2022
151	SDN 1 PAPAR PLURAH TAHAP I	PPN	282.270,00	20/04/2022
152	SDN 1 PAPAR PLURAH TAHAP I	PPN	286.900,00	20/04/2022
153	SDN 1 PAPAR PLURAH TAHAP II	PPN	122.800,00	20/04/2022
154	SDN 1 PAPAR PLURAH TAHAP II	PPN	122.800,00	20/04/2022
155	SDN 1 PAPAR PLURAH TAHAP II	PPN	288.200,00	20/04/2022
156	SDN 1 TIRINGI TAHAP I	PPN	282.200,00	20/04/2022
157	SDN 1 TIRINGI TAHAP II	PPN	298.200,00	20/04/2022
Jumlah yang PPN, PPN - 20			21.794.200,00	
158	SMP NEGRI 1 TEYEH BAKU TAHAP I	PPN	142.700,00	05/02/2022
159	SMP NEGRI 1 TEYEH BAKU TAHAP I	PPN	207.200,00	05/02/2022
160	SMP NEGRI 1 TEYEH BAKU TAHAP I	PPN	245.400,00	05/02/2022
161	SMP NEGRI 1 TEYEH BAKU TAHAP I	PPN	218.200,00	05/02/2022
162	SMP NEGRI 1 TEYEH BAKU TAHAP II	PPN	288.200,00	05/02/2022
163	SMP NEGRI 1 TEYEH BAKU TAHAP II	PPN	282.200,00	05/02/2022
164	SMP NEGRI 1 TEYEH BAKU TAHAP II	PPN	288.200,00	05/02/2022
165	SMP NEGRI 1 TEYEH BAKU TAHAP II	PPN	288.200,00	05/02/2022
166	SMP NEGRI 1 TEYEH BAKU TAHAP II	PPN	228.000,00	05/02/2022
167	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH Tahap II	PPN	128.000,00	04/11/2022
168	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
169	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
170	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
171	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
172	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
173	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
174	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
175	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
176	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
177	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
178	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
179	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
180	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	128.000,00	13/01/2022
181	SMP NEGRI 1 MARRA TEYEH TAHAP II	PPN	212.200,00	13/01/2022



**PEMERINTAH KABUPATEN HARAU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	NAMA BEROLAH	JENIS PALANG	NILAI BETOR (Rp)	TANGGAL BETOR
181	DMP NEGARA BUKARA TEWEH TAGAP II	PPN	130.585,00	15032000
182	DMP NEGARA BUKARA TEWEH TAGAP II	PPN	1.300.404,00	15032000
184	DMP NEGARA BUKARA TEWEH TAGAP II	PPN	130.000,00	15032000
185	DMP NEGARA BUKARA TEWEH TAGAP II	PPN	218.404,00	15032000
186	DMP NEGARA BUKARA TEWEH TAGAP II	PPN	218.800,00	15032000
187	DMP NEGARA BUKARA TEWEH TAGAP II	PPN	218.800,00	15032000
188	DMP NEGARA BUKARA TEWEH TAGAP II	PPN	414.816,00	15032000
189	DMP NEGARA BUKARA TEWEH TAGAP II	PPN	788.000,00	15032000
190	DMP NEGARA BUKARA TEWEH TAGAP II	PPN	894.872,00	15032000
191	DMP NEGARA BUKARA TEWEH	PPN	2.380.000,00	07032000
192	DMP NEGARA BUKARA TEWEH	PPN	1.880.000,00	01032000
193	DMP NEGARA BUKARA TAGAP I	PPN	390.000,00	04012000
194	DMP NEGARA BUKARA TAGAP I	PPN	400.000,00	04012000
195	DMP NEGARA BUKARA TAGAP I	PPN	300.000,00	04012000
196	DMP NEGARA BUKARA TAGAP II	PPN	300.000,00	14032000
197	DMP NEGARA BUKARA TAGAP II	PPN	318.000,00	14032000
198	DMP NEGARA LAHAT TAGAP II	PPN	380.000,00	04032000
Jumlah yang PPN-PPN-DMP			18.487.888,00	

**4.3.1.1. Utang Belanja**

Saldo Utang Belanja yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.782.859.049,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.025.564.611,00 dari saldo sebelumnya tahun sebelumnya sebesar Rp40.808.423.660,00 Adapun Rincian Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut:

**1. DINAS KESEHATAN**

**UTANG JASA PHAS, KETUA**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Usaha (sedia, PT. MYRA TATA LINDERSHAW SARI)	4.387.888,00
2	Utang Belanja Jasa Usaha (sedia/produksi, termasuk termasuk PT. MYRA TATA LINDERSHAW SARI)	4.395.040,00
Jumlah		11.948.948,00
JUMLAH TOTAL		11.948.948,00

**2. BLUD RSUD MUARA TEWEH**

**a. UTANG BELANJA PEGAWAI DAN JASA PELAYANAN UMUM**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Biaya Jasa Mula Penerimaan BPJS	
	- Gaji-R TKD	1.964.878.798,00
	- Karyawan	80.230.500,00
	- Lainnya (Karyawan)	1.300.000.000,00
	- Lainnya (Karyawan) (non-pegawai tetap) - non pegawai tetap	1.874.875,00
2	Biaya Jasa Mula Penerimaan BPJS 2021 dan 2022	1.060.000.000,00
3	Jasa Penerimaan Utang Pajak (terakhir per Desember 2021)	204.000.000,00
4	Biaya Jasa Mula Penerimaan Jasa Lainnya	138.250.250,00
Jumlah		4.208.944.611,00

**b. UTANG JASA KANTOR**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Biaya Jasa Usaha (sedia/produksi) (SMPN)	
1	Per 31	2.431.700,00
2	Desember 2021	2.431.700,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARTO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)
	Jumlah	4.348.389,00
	Revisi/Perbaikan	
2	Utang Pajak, dan Lain-lain	
	PA, PPh, Bea cukai, PPh	10.000.000,00
	Lain-lain	
3	Utang Jangka Panjang	
	Jumlah	2.708.389,00
	Jumlah	28.714.838,00

**e. UTANG JASA MELAKUKITKA (BELANJA HPP)**

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
A	UTANG HPP BERJANGKA	
1	PT. BARTO JAYA MULO	10.000.000,00
2	PT. 2D MEDICAL SYSTEMS INDONESIA	1.000.000,00
3	PT. BARTO PADANG	45.000.000,00
4	PT. BARTO PADANG	10.000.000,00
5	PT. BARTO JANGKOTA	10.000.000,00
	Jumlah	120.000.000,00
B	UTANG HPP JANGKA	
1	PT. ANJUNJAH PHARMASICO LESTARI	10.000.000,00
2	PT. ANJUNJAH PHARMASICO LESTARI	2.000.000,00
3	PT. BARTO JANGKA	175.000,00
4	PT. ANJUNJAH PHARMASICO	2.000.000,00
	Jumlah	21.000.000,00
	Jumlah Utang HPP dan Utang TA, 2022	141.000.000,00
	Jumlah Total	4.352.389.000,00
	Jumlah Total Belanja Barang dan Jasa HPP dan Bili-Beli Mula Yang	4.352.389.000,00

**3. HETANG BELANJA**

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
A	HETANG	
	Hutang Transaksi TWT	400.000.000,00
	Jumlah	400.000.000,00
	Jumlah Total, HETANG BELANJA	4.752.389.000,00

**5.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek lainnya yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.062.298.551,00 yang merupakan utang desde keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas PUWR yang mengalami konkritasi sebesar Rp105.600.290,00 dari saldo kewajiban lain sebelumnya sebesar Rp2.056.698.261,00. Adapun Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

NO	RAKAT PERBUKUAN	BIAYA (Rp)	BIAYA KONTRAK (Rp)	PERUBAHAN TANGGUNG ANGGARAN 2022 (Rp)	BIAYA LUNCURAN TAHUN 2022 (Rp)
1	Pembangunan Jembatan Sei Lutaw I - Jalan II (Lanjutan)	1.000.000.000,00	1.400.000.000,00	1.075.000.000,00	200.000.000,00
2	Pembangunan Jembatan - Kandang GPP (Perbaikan)	0,00	0,00	4.400.000.000,00	1.200.000.000,00
3	Pembangunan Jalan Di. Yohang - PPK Bawang (Perbaikan)	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00
4	Pembangunan Jalan Di. Yohang - PPK Bawang (Perbaikan)	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	TOTAL JUMLAH				1.000.000.000,00



**5.3.3. Ekuitas**

**31 Desember 2022**  
**Rp3.782.268.399.822,51**

**31 Desember 2021**  
**Rp3.299.568.765.782,86**

Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.782.268.399.822,51 termasuk sebesar Rp482.696.344.839,45 ditanggung dengan saldo laba seluasnya sebesar Rp3.299.568.765.782,86.

**5.4. Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan antara pemerintah yang tercermin dalam pendapatan-LO beban dan surplus/defisit operasional dari suatu tahun pelaporan yang penyajiannya diarahkan dengan periode seluasnya.

Laporan Operasional digunakan dalam mengevaluasi pendapatan - LO dan beban untuk menjelaskan suatu tahun atau siklus antara pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna dalam mengevaluasi pendapatan - LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengetahui besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengetahui operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan keamanan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Mengetahui pemenuhan siklus (bila defisit operasional) dan peningkatan siklus (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.

**5.4.1. Pendapatan-LO**

**Rp1.321.339.068.214,41**

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan Pendapatan - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.321.339.068.214,41 yang mengalami kenaikan sebesar Rp355.970.206.047,39 atau sebesar 36,60% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp1.164.388.862.166,71.

Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor 12 tentang Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA, Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah siklus dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan dalam pengakuannya Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (march) atau pada saat pendapatan dapat dimanfaatkan untuk adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Rincian Pendapatan - LO Kabupaten Barito Utara dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.78**  
**Pendapatan-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Tipe	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan (Peningkatan)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	96.298.265.499,69	118.898.041.499,79	(22.599.776.000,10)
Pendapatan Transfer	1.198.823.881.881,71	1.121.891.381.888,02	76.932.500.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah	26.178.121.831,01	21.194.440.379,90	5.000.471.451,11



**PEMERINTAH KABUPATEN HABITOUARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan(Perubahan)
Yang Sel. LO			
Jumlah	1.021.266.081.445,01	1.294.266.081.445,01	(273.000.000.000,00)

Realisasi masing-masing akan pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Rp21.266.116.445,20**

Pendapatan Asli Daerah – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 diangka sebesar Rp21.266.116.445,20 yang mengalami penurunan sebesar Rp23.342.816.003,01 atau sebesar 18,27% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp44.608.981.448,21.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga ada anggaran tahun sebelumnya yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Habitouara yang teruji dalam Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.71**  
**Pendapatan Asli Daerah-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan(Perubahan)
Pada Daerah – LO	21.266.116.445,20	11.964.001.343,00	10.302.115.102,20
Bantuan – LO	10.206.329.219,00	20.726.984.026,40	(10.520.654.807,40)
Pendapatan Hasil Penerimaan Belanja Daerah Yang Diutamakan – LO	10.412.369.519,00	10.342.984.580,00	69.384.939,00
Lain-lain Penerimaan Asli Daerah Yang Sel. – LO	34.000.000.000,00	80.000.000.000,00	(46.000.000.000,00)
Jumlah	86.324.814.183,20	119.033.969.949,40	(32.709.155.766,20)

**5.4.1.1.1. Pajak Daerah – LO Rp21.266.116.445,20**

Pendapatan Pajak Daerah – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 diangka sebesar Rp21.266.116.445,20 yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.266.116.445,20 atau sebesar 18,24% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp17.999.970.000,00.

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan pengakuan pendapatan dari pajak daerah dalam periode Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.72**  
**Pajak Daerah-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan(Perubahan)
Pajak Hotel – LO	600.700.000,00	400.000.000,00	200.700.000,00
Pajak Restoran – LO	4.210.000.000,00	3.740.000.000,00	470.000.000,00
Pajak Hiburan – LO	200.000.000,00	270.000.000,00	(70.000.000,00)
Pajak Hiburan – LO	600.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00
Pajak Pertambangan Bumi – LO	7.000.000.000,00	7.100.000.000,00	(100.000.000,00)
Pajak Hotel – LO	87.000.000,00	7.000.000,00	80.000.000,00
Pajak Hiburan Daerah Logistik dan Belanja – LO	600.000.000,00	100.000.000,00	500.000.000,00
Pajak Hiburan Hibung Hotel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Pertanian – LO	2.810.472.140,00	2.400.000.000,00	410.472.140,00
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah – LO	17.999.970.000,00	17.730.000.000,00	269.970.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Revisi/LPSPD - LO			
Jumlah	17.088.178.448,00	17.088.000.000,00	1.000.000.000,00

**5.4.1.1.2. Retribusi Daerah - LO Rp10.266.124.316,00**

Pendapatan Retribusi Daerah - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dijumlah sebesar Rp10.266.124.316,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp12.588.879.690,04 atau sebesar 55,29% dari pagu/jalan Tahun 2021 sebesar Rp22.794.964.006,40.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari pajak retribusi dalam periode Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.73**  
**Retribusi Daerah - LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan Persentase
Retribusi Pelayanan Pemukiman - LO	118.374.790,00	14.542.126.790,00	(12.117.064.150,00)
Retribusi Pelayanan Pemukiman	348.727.154,00	312.187.314,00	22.760.000,00
Retribusi Pelayanan Pemukiman - LO			
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	117.822.000,00	180.000.000,00	(24.000.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	124.770.000,00	174.970.471,00	(52.200.000,00)
Retribusi Pelayanan Tarif/Tarif Umum - LO	181.000.000,00	78.027.000,00	76.402.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan			
Retribusi - LO	124.180.000,00	0,00	124.180.000,00
Retribusi Pengendalian Ruang Cagar Budaya - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Minera Tambang			
Retribusi Pengendalian Minera Tambang	118.428.000,00	81.078.708,00	24.401.171,00
Retribusi Pengendalian Kebijakan Daerah			
Retribusi Pengendalian Kebijakan Daerah	814.870.000,00	826.189.907,00	68.228.210,00
Retribusi Pengendalian Kebijakan Daerah - LO			
Retribusi Pengendalian Kebijakan Daerah - LO	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)
Retribusi Terminal - LO	188.000,00	188.000,00	(200.000,00)
Retribusi Pelayanan Kependudukan - LO	7.480.940.000,00	6.247.200.000,00	1.240.075.000,00
Retribusi Tarif/Retribusi dan Lain-lain - LO	228.877.000,00	178.000.000,00	100.000.000,00
Retribusi Pelayanan Fasilitas Umum Daerah - LO	142.770.000,00	129.750.000,00	68.020.000,00
Retribusi dan Manfaat Lainnya - LO	10.879.040,00	478.000.070,40	(460.004.004,40)
Retribusi dan Tarif/Retribusi			
Retribusi dan Tarif/Retribusi - LO	127.000.000,00	130.000.000,00	(3.000.000,00)
Retribusi dan Tarif/Retribusi - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi dan Tarif/Retribusi - LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi dan Tarif/Retribusi - LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.266.124.316,00	22.794.964.006,40	(12.588.879.690,40)

**5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Rp10.093.389.005,00****Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dijumlah sebesar Rp10.093.389.005,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp149.195.330,30 atau sebesar 1,46% dari pagu/jalan Tahun 2021 sebesar Rp10.242.584.335,30.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO merupakan pengakuan pendapatan dari bagi hasil deviden perusahaan modal/venturil daerah dalam periode Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**Tabel 8.74**  
**Pendapatan Hasil Pengalihan Kelayakan Daerah Yang Dipisahkan – LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan (Peningkatan)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atau Penyelenggara Modal pada BUMD - LO	10.092.584.585,00	10.242.594.310,00	(149.909.725,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atau Penyelenggara Modal pada Perusahaan Daerah - LO	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.177.584.585,00</b>	<b>10.242.594.310,00</b>	<b>(149.909.725,00)</b>

**8.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Rp54.696.633.729,49**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp54.696.633.729,49 yang mengalami penurunan sebesar Rp13.899.343.782,51 atau sebesar 20,29% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp68.596.017.512,00.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO merupakan pengalihan pendapatan dalam periode Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 8.75**  
**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO**  
**Tahun 2021 dan 2022**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan (Peningkatan)
Hasil Pengalihan BUMD yang Tidak Dibebankan - LO	980.000,00	0,00	980.000,00
Hasil Salek Lain-Lain Tahun Mulaik BUMD yang	287.190.000,00	0,00	287.190.000,00
Hasil Pemertajuan BUMD yang Tidak Dibebankan-LO	224.395.800,00	228.418.000,00	(27.022.200,00)
Hasil Kerja Sama (Samsi-LO)	388.081,30	127.380,30	260.701,00
Pendapatan Jasa SDA - LO	1.047.000.210,00	1.224.292.000,00	(177.291.790,00)
Pendapatan Bunga - LO	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Tuntutan Ganti Rugi Daerah - LO	11.880.000,00	20.220.000,00	(8.340.000,00)
Pendapatan Perolehan Harta Milik Daerah Lain-LO	110.441.711,00	0.000.000,00	110.441.711,00
Pendapatan Daerah atas Keanggotaan Perusahaan Daerah - LO	1.027.480.126,00	1.198.219.000,00	(170.738.874,00)
Pendapatan Daerah Pagar - LO	1.228.218.000,00	118.288.700,00	1.109.929.300,00
Pendapatan Daerah Hibah - LO	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengalihan	807.000.000,00	228.000.000,00	579.000.000,00
Pendapatan BLUD - LO	46.126.274.215,00	46.200.000.000,00	(73.725.785,00)
Hasil dari Pemertajuan BUMD yang Tidak Dibebankan - LO	120.000,00	1.000.000,00	(880.000,00)
Jumlah PDA yang Sah Lainnya - LO	12.894.000.000,00	12.880.200,00	12.881.120,00
Pendapatan Dana Hibah JOM - LO	182.000.000,00	0.000.000,00	182.000.000,00
Hasil from Pajak (Lain - LO)	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Anggaran/Tabung Masyarakat - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Daerah atas Pengalihan Harta Milik Daerah - LO	0.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>64.696.633.729,49</b>	<b>68.596.017.512,00</b>	<b>(13.899.343.782,51)</b>

**8.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO Rp1.195.923.481.881,72**

Pendapatan Transfer-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.195.923.481.881,72 yang mengalami kenaikan sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN HARAU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 (Rp. 2021)

Rp171.938.200.211,79 atau sebesar 16,39% dari proyeksi Tahun 2021 sebesar Rp1.051.983.381.668,02.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Harau Utara pasal 47 Tahun 2012 tentang Transfer pendapatan transfer (LT) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan nasional pendapatan transfer pada Tahun 2022 dalam laporan operasional terdiri atas:

**5.4.1.1.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LD Rp1.336.732.870.954,85**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 diujikan sebesar Rp1.336.732.870.954,85 yang mengalami kenaikan sebesar Rp140.044.171.104,91 atau sebesar 11,27% dari proyeksi Tahun 2021 sebesar Rp1196.688.699.850,94.

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya terdiri atas Dana Perimbangan yang dapat dibagi menjadi Dana Insentif Daerah dan Alokasi Dana Dana Daerah pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang diujikan sebagai berikut:

**Tabel 5.76**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LD**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan (Persentase)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LD	1.336.732.870.954,85	1196.688.699.850,94	111.044.171.104,91
Jumlah	1.336.732.870.954,85	1196.688.699.850,94	111.044.171.104,91

**Tabel 5.77**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LD**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan (Persentase)
Bagi Hasil Pajak – LD	508.098.218.841,00	564.287.947.878,00	248.781.208.762,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumbah Daya Alam – LD	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LD	520.647.890.823,00	559.440.804.000,00	33.802.913.177,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LD	199.144.204.890,00	178.646.044.871,00	13.811.210.019,00
Dana Insentif Daerah (DID)	1.007.842.957,85	28.338.178.000,00	103.948.214.042,85
Dana Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.336.732.870.954,85	1196.688.699.850,94	111.044.171.104,91

**5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LD Rp69.196.610.926,79**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 diujikan sebesar Rp69.196.610.926,79 yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.894.029.148,77 atau sebesar 2,76% dari proyeksi Tahun 2021 sebesar Rp67.302.581.778,02.

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi untuk Tahun 2021 diujikan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**Tabel 5.78**  
**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	88.792.819.898,79	86.288.181.816,02	2.504.638.082,77
Jumlah	88.792.819.898,79	86.288.181.816,02	2.504.638.082,77

**5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sub-LO** **Rp29.179.320.837,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sub – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp29.179.320.837,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp6.374.821.837,00 atau sebesar 27,95% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp22.804.499.000,00.

Pemrisman yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sub – LO untuk Tahun 2022 dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Hibah - LLD	9.298.842.000,00	22.708.499.000,00	(13.409.657.000,00)
Lain-lain Pendapatan – LO	20.122.478.837,00	11.096.000,00	20.101.478.837,00
Jumlah	29.179.320.837,00	22.804.499.000,00	6.374.821.837,00

**5.4.2. Beban-LO** **Rp1.843.676.837.939,76**

Beban – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp1.843.676.837.939,76 yang mengalami kenaikan sebesar Rp22.310.978.583,42 atau sebesar 1,19% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp1.821.365.859.356,34.

Menurut Kebijakan Akuntansi Kabupaten Barito Utara Nomor 47 Beban adalah pemertamaan aset/nilai ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menunjukkan aktiva yang dapat berupa pengurangan atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban dan merupakan komponen yang digunakan untuk menyajikan Laporan Operasional dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.79**  
**Beban-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan
Beban Operasi	792.382.638.488,17	804.773.787.377,00	(12.391.148.888,83)
Beban Transfer	81.275.698.891,22	86.500.000.128,02	(5.224.301.236,80)
Jumlah	1.843.676.837.939,76	1.821.365.859.356,34	22.310.978.583,42

**Beban Operasi-LO** **Rp792.406.141.378,53**

Beban Operasi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp792.406.141.378,53 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.670.944.141,00 atau sebesar 0,80% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp794.773.193.217,53.

Beban operasi terdiri atas Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

**Beban Operasi – LO Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan
Beban Pegawai - LO	426.345.181.123,00	425.725.896.287,00	619.284.836,00
Beban Perbaikan	773.861.987.044,73	18.221.791.999,53	755.640.195.045,20



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**Tabel 5.76**  
**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan (Peningkatan)
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	60.119.819.005,78	60.299.891.808,02	18.080.000.798,77
Jumlah	60.119.819.005,78	60.299.891.808,02	18.080.000.798,77

**5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sub-LO** **Rp29.179.329.837,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sub – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 diujikan sebesar Rp29.179.329.837,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp6.174.821.837,00 atau sebesar 27,90% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp22.804.499.000,00.

Perincian yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sub – LO untuk Tahun 2022 dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan (Peningkatan)
Pendapatan Hibah – LO	1.388.947.000,00	12.718.499.000,00	11.329.552.000,00
Lain-lain Pendapatan – LO	20.140.479.837,00	10.086.000,00	20.140.479.837,00
Jumlah	29.179.329.837,00	12.804.499.000,00	8.374.830.837,00

**5.4.2. Beban-LO** **Rp1.043.876.837.939,76**

Beban – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 diujikan sebesar Rp1.043.876.837.939,76 yang mengalami kenaikan sebesar Rp22.110.978.381,42 atau sebesar 2,18% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp1.021.765.859.558,34.

Miswal Kebijakan Akuntansi Kabupaten Barito Utara Nomor 47 Beban adalah program manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menggunakan ekuitas yang dapat berupa pengabaian atau konversi aset atau timbulnya kewajiban dan merupakan komponen yang digunakan untuk menyusun Laporan Operasional dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.78**  
**Beban-LO**  
**Tahun 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan (Peningkatan)
Beban Operasi	798.784.898.408,77	862.170.197.217,03	
Beban Transfer	25.279.096.991,01	89.090.992.128,81	14.811.895.137,80
Jumlah	1.043.876.837.939,76	1.021.765.859.558,34	22.110.978.381,42

**Beban Operasi-LO** **Rp792.496.141.378,53**

Beban Operasi-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 diujikan sebesar Rp792.496.141.378,53 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.630.944.161,00 atau sebesar 0,80% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp794.775.197.217,03.

Beban operasi terdiri atas Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa Beban Dengan Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

**Beban Operasi – LO Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan (Peningkatan)
Beban Pegawai – LO	420.249.181.973,00	420.078.898.000,00	8.271.283.973,00
Beban Transfer	113.387.000.000,00	76.190.790.000,00	37.196.210.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Beban Jasa	52.732.128.304,00	130.273.800.000,00	199.241.467.321,00
Beban Pemeliharaan	11.289.848.207,00	8.254.124.991,00	3.845.271.215,00
Beban Penyelenggaraan	87.148.942.345,00	26.404.429.726,00	11.741.702.429,00
Beban Bangun	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa	18.720.000,00	30.800.000,00	20.214.250,00
Beban Listrik	25.738.892.000,00	46.994.000.140,00	109.452.000,00
Beban Bantuan Sosial	1.400.250.000,00	1.287.500.000,00	121.900.000,00
Beban Perjalanan Dinas	414.197.000,00	24.838.000,00	476.100.000,00
Beban Lain-lain	968.500.000,00	11.282.907.000,00	4.188.211.284,00
Beban Perbaikan Perbaikan dan Masak	81.823.408.518,00	88.276.128.844,00	(2.870.488.881,24)
Beban Penyelenggaraan Gedung dan Sarung	18.827.842.000,00	17.488.000.412,00	1.448.700.880,00
Beban Penyelenggaraan dan Jasa-jasa dari Negara	24.700.000.107,00	20.275.488.518,00	2.748.452.810,00
Beban Penyelenggaraan Asas Takip Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Penyelenggaraan Asas Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Perbaikan Asas Takip Persepsi	148.500.000,00	118.877.000,00	48.677.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>462.688.181.279,00</b>	<b>664.776.987.217,00</b>	<b>7.888.844.181,00</b>

Adapun penjelasan Tabel 3.1 atas Beban Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

**3.4.2.1. Beban Pegawai-LO**

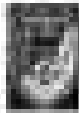
**Rp432.848.183.713,00**

Beban Pegawai-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dijabarkan sebesar Rp432.848.183.713,00 yang merupakan kenaikan sebesar Rp6.871.293.845,00 atau sebesar 1,61% dari pengujian Tahun 2021 sebesar Rp425.976.889.867,00.

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum termasuk PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan/kumulatif pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintahan regional. Rincian Beban Pegawai-LO dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2B  
Beban Pegawai-LO

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	(%)	ΔΔΔT <sub>2022</sub> year
1. Sal. dan Tunjangan	294.844.000.000,00	260.496.000.000,00	7,34	34.348.000.000,00
2. Tunjangan	88.104.000.000,00	88.247.274.281,00	0,04	(4.143.274.281,00)
3. Tunjangan Pensiun	14.429.777.461,00	15.740.164.048,00	(11,70)	(1.310.386.587,00)
4. Beban Lain-lain Tunjangan (SPPD)	11.860.708.720,00	12.264.400.200,00	(3,48)	(403.691.480,00)
5. Beban Lain-lain Tunjangan	191.274.468,00	188.008.000,00	10,70	(27.244.800,00)
6. Beban Perawatan Lainnya (Pensiun dan Angga SPPD) serta KOPAWASDI	183.423.278,00	871.600.000,00	88,74	(688.176.722,00)
7. Beban Pegawai (KUR)	478.120.000,00	288.770.000,00	48,08	189.350.000,00
8. Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Beban Persewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Beban Persewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Beban Persewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Beban Persewaan	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

LINTAS TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	Tahun 2022	Tahun 2021	(%)	Revisi Tahun
18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>421.448.353,00</b>	<b>421.479.840.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4.211.287.667.833,17</b>

**5.4.1.3. Beban Persediaan -LO**

**Rp113.387.667.833,17**

Beban Persediaan - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 (dibeban sebesar Rp113.387.667.833,17 yang mengalami kenaikan sebesar Rp37.203.873.036,24 atau sebesar 48,44% dari pengajian Tahun 2021 sebesar Rp76.183.794.800,00). Rincian Beban Persediaan -LO dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.81  
Rincian Beban Persediaan Berdasarkan SKPD  
Tahun Anggaran 2022

NO	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DAKAT PENGUSAHA	20.219.298.128,00
2	DAKAT PERUSAHAAN	11.261.377.213,00
3	DAKAT UNIT USM M LAINNYA ELSD	28.128.788.500,00
4	DAKAT PERUSAHAAN USM DAN PERUSAHAAN TERBUKA	10.217.499.500,17
5	DAKAT PERUSAHAAN RUMAH SAKIT KEMISKINAN PERUSAHAAN USM	261.877.600,00
6	PERUSAHAAN	447.200.000,00
7	KANTOR DAERAH POLISI (KADAPOL) BUKALAH	11.449.377,00
8	DAKAT PERUSAHAAN USM DAN PERUSAHAAN TERBUKA	1.420.887.999,00
9	DAKAT USM DAN PERUSAHAAN TERBUKA MAJLIS DESA	713.880.888,00
10	DAKAT USM DAN PERUSAHAAN TERBUKA KOPERASI	1.268.888.888,00
11	DAKAT USM DAN PERUSAHAAN TERBUKA PERUSAHAAN	1.267.888.788,00
12	DAKAT USM DAN PERUSAHAAN TERBUKA USM	1.219.888.688,00
13	DAKAT PERUSAHAAN TERBUKA USM DAN PERUSAHAAN TERBUKA	948.787.887,00
14	DAKAT PERUSAHAAN TERBUKA PERUSAHAAN TERBUKA	893.288.788,00
15	DAKAT PERUSAHAAN	893.288.688,00
16	DAKAT PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERUSAHAAN	844.288.188,00
17	DAKAT PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERUSAHAAN	677.488.088,00
18	DAKAT PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERUSAHAAN	544.288.088,00
19	DAKAT PERUSAHAAN TERBUKA DAN PERUSAHAAN TERBUKA	1.488.888.088,00
20	DAKAT PERUSAHAAN	10.874.588.088,00
21	DAKAT PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN	1.747.888.188,00
22	PERUSAHAAN TERBUKA	8.948.188.488,00
23	KDC LAMU	1.008.878.888,00
24	KDC TIRUH TIRUH	848.888.888,00
25	KDC TIRUH TIRUH	181.588.888,00
26	KDC LAMU	278.888.788,00
27	KDC LAMU TERBUKA	408.888.788,00
28	KDC MONTALAT	808.578.688,00
29	KDC GUNUNG PULUH	187.488.788,00
30	KDC LAMU TERBUKA	648.488.688,00
31	KDC TIRUH TERBUKA	124.008.688,00
32	KDC LAMU TERBUKA	122.187.588,00
33	PERUSAHAAN	498.388.488,00
34	SALAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN TERBUKA	888.888.788,00
35	SALAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN TERBUKA	678.788.688,00
36	SALAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN TERBUKA	648.788.588,00
37	DAKAT PERUSAHAAN TERBUKA PERUSAHAAN TERBUKA	0,00
38	SALAH PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN TERBUKA	112.848.788,00
	<b>Jumlah</b>	<b>593.987.667.833,17</b>

**5.4.1.4. Beban Jasa-LO**

**Rp133.732.199.004,00**

Beban Jasa - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 (dibeban sebesar Rp133.732.199.004,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Rp.141.407.621,00) atau sebesar 29,67% dari proyeksi Tahun 2021 sebesar Rp 190.871.804.623,00.

Rincian Belanja Jasa – LO berdasarkan RKPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Rincian Belanja Jasa Berdasarkan RKPD**  
**Tahun Anggaran 2022**

NO	RPKD	2021 2022
1	DAKSI PENDIDIKAN	16.388.393.176,00
2	DAKSI KESEHATAN	25.388.176.348,00
3	DAKSI SAKIT LAINNYA (GASAL, SLE, dll)	12.388.393.176,00
4	DAKSI PERKULIAHAN DAN AKTIVITAS PENYATAAN PELAJAR	11.388.347.716,00
5	DAKSI PERUMAHAN, KAWAN, KAWAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN	481.201.964,00
6	DAKSI KEWAJIBAN BERKAWAN DAN POLYTR	887.472.886,00
7	KAWAN DAN KAWAN POLYTR (KAWAN) POLYTR	1.324.288.176,00
8	DAKSI KEWAJIBAN BERKAWAN BERKAWAN DAN POLYTR	6.085.187.000,00
9	DAKSI BERKAWAN, KAWAN PERUMAHAN DAN BERKAWAN DAN POLYTR	888.232.856,00
10	DAKSI TENAGA KERJA DAN TENAGA KERJA KAWAN DAN POLYTR	1.477.880.000,00
11	DAKSI KEWAJIBAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.171.768,00
12	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	1.004.378.312,00
13	DAKSI KEWAJIBAN BERKAWAN DAN CATATAN BERKAWAN	888.478.888,00
14	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	1.201.180.888,00
15	DAKSI PERUMAHAN BERKAWAN	1.181.200.348,00
16	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	1.201.478.888,00
17	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	1.004.408.176,00
18	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
19	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN DAN PERUMAHAN	1.888.378.888,00
20	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	1.401.180.348,00
21	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	1.601.478.888,00
22	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
23	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
24	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
25	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
26	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
27	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
28	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
29	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
30	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
31	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
32	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
33	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
34	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
35	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
36	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
37	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
38	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
39	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
40	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
41	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
42	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
43	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
44	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
45	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
46	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
47	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
48	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
49	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
50	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
51	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
52	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
53	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
54	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
55	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
56	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
57	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
58	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
59	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
60	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
61	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
62	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
63	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
64	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
65	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
66	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
67	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
68	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
69	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
70	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
71	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
72	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
73	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
74	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
75	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
76	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
77	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
78	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
79	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
80	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
81	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
82	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
83	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
84	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
85	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
86	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
87	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
88	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
89	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
90	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
91	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
92	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
93	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
94	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
95	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
96	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
97	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
98	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
99	DAKSI BERKAWAN BERKAWAN DAN PERUMAHAN	888.378.888,00
100	JUMLAH	110.702.188.004,00

**3.4.3.4. Belanja Pemeliharaan-LO** **Rp10.099.846.207,00**

Belanja Pemeliharaan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dijabarkan sebesar Rp10.099.846.207,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp2.885.721.214,00 atau sebesar 81,69% dari proyeksi Tahun 2021 sebesar Rp7.214.125.000,00.

Rincian Belanja Pemeliharaan - LO berdasarkan RKPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 (Lampiran 202)

**Tabel 4.81**  
**Rencana Belanja Pemeliharaan Berdasarkan SKPD**  
**Tahun Anggaran 2022**

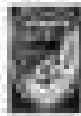
NO	SKPD	PERENCANAAN RPJ
1	DINAS PENDIDIKAN	72.200.000,00
2	DINAS KEMENTERIAN	140.190.100,00
3	PELAYANAN KEMENTERIAN (KEMENTERIAN BUKU)	0,00
4	DINAS PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN RUMAH	8.240.200.000,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN POMALUANG DAN PONTIANAK	12.000.000,00
6	KELOMPOK SARAN MANAJEMEN DAN POLITIK	10.000.000,00
7	KANTOR SATUAN PELAKSANA PEMERINTAH DAERAH	20.000.000,00
8	PELAYANAN PERENCANAAN LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN	0,00
9	DINAS SOSIAL DAN PEMBINAAN KEPERAWATAN DAN GIZI	40.000.000,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSDUKSI KOPERASI DAN UMM	10.000.000,00
11	DINAS KETANAGAHAN PERAGAN DAN PERUMAHAN	30.000.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000,00
13	DINAS KEMENTERIAN & CATATAN SIPIL	50.000.000,00
14	DINAS PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	71.000.000,00
15	PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN	0,00
16	DINAS PERENCANAAN	170.400.000,00
17	DINAS PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN	40.000.000,00
18	DINAS PERENCANAAN DAN PERENCANAAN	40.000.000,00
19	DINAS PERENCANAAN DAN PERENCANAAN	40.000.000,00
20	DINAS PERENCANAAN DAN PERENCANAAN	100.000.000,00
21	DINAS PERENCANAAN DAN PERENCANAAN	21.000.000,00
22	DINAS PERENCANAAN DAN PERENCANAAN	10.000.000,00
23	KELOMPOK SARAN (KELOMPOK SARAN)	1.740.000.000,00
24	KELOMPOK SARAN (KELOMPOK SARAN)	70.000.000,00
25	KEC. TANJUNGPINANG	100.000.000,00
26	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
27	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
28	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
29	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
30	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
31	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
32	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
33	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
34	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
35	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
36	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
37	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
38	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
39	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
40	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
41	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
42	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
43	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
44	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
45	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
46	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
47	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
48	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
49	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
50	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
51	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
52	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
53	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
54	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
55	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
56	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
57	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
58	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
59	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
60	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
61	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
62	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
63	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
64	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
65	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
66	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
67	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
68	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
69	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
70	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
71	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
72	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
73	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
74	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
75	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
76	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
77	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
78	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
79	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
80	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
81	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
82	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
83	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
84	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
85	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
86	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
87	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
88	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
89	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
90	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
91	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
92	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
93	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
94	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
95	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
96	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
97	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
98	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
99	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
100	KEC. TANJUNGPINANG	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>70.000.000.000,00</b>

**5.4.2.5. Belanja Perjalanan Dinas-LO Rp67.149.643.345,00**

Belanja Perjalanan Dinas – LO adalah beban yang besarnya merupakan selisih antara 31 Desember 2022 dengan beban Rp67.149.643.345,00, yang melebihi anggaran sebesar Rp11.745.183.636,00 atau sebesar 21,20% dari proyeksi Tahun 2021 sebesar Rp25.404.459.709,00.

Rencana Belanja Pemeliharaan – LO berdasarkan SKPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

ENTRIK TABEL YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**Tabel 5.84**  
**Realisasi Suban Perjanjian Oras Berdasarkan SKPD**  
**Tahun Anggaran 2022**

NO	SKPD	PEMULUANGAN (Rp)
1	DAIRAH PEMERINTAHAN	2.145.305.271,00
2	DAIRAH PERKOTAAN	12.707.414.303,00
3	BUMAH SAKIT DAIRAH (BENEFIT BUKU)	0,00
4	DAIRAH PERKULIAHAN ISLAM DAN PUSAT HUKUM ISLAM	4.209.000.000,00
5	DAIRAH PERKULIAHAN ISLAM DAN PUSAT HUKUM ISLAM	301.405.000,00
6	DAIRAH PERKULIAHAN ISLAM DAN PUSAT HUKUM ISLAM	794.120.000,00
7	KANTOR SAKITAN FIS. DI PANGKAL PUSAKA	401.004.000,00
8	KANTOR PERANGKIPALAN DAN KANTOR SAKITAN	1.888.491.000,00
9	DAIRAH TOTAL DAN PERANGKIPALAN KANTOR SAKITAN DAN USA	1.498.705.000,00
10	DAIRAH TENAGA KERJA DAN TERANGKIPALAN KOPERASI DAN UKM	609.000.000,00
11	DAIRAH KETUMBUHAN PANGKAL DAN PERANGKIPALAN	201.010.000,00
12	DAIRAH UPAYA LAYANAN DAIRAH	1.031.000.000,00
13	DAIRAH KEMERDEKAAN & CALONAN USA	252.889.000,00
14	DAIRAH PENGUSAHAAN DAN PENGUSAHA USA DAIRAH PEMERKIPALAN DAN PERANGKIPALAN	838.000.000,00
15	DAIRAH PERUSAHAAN USA	648.100.000,00
16	DAIRAH PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN	449.145.400,00
17	DAIRAH PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN	117.000.000,00
18	DAIRAH PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN	257.889.000,00
19	DAIRAH PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN	814.000.000,00
20	DAIRAH PERUSAHAAN	1.408.400.000,00
21	DAIRAH PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN	853.000.000,00
22	DAIRAH PERUSAHAAN	1.888.000.000,00
23	DAIRAH PERUSAHAAN	54.140.000.000,00
24	DAIRAH PERUSAHAAN	230.000.000,00
25	DAIRAH PERUSAHAAN	200.000.000,00
26	DAIRAH PERUSAHAAN	170.000.000,00
27	DAIRAH PERUSAHAAN	270.000.000,00
28	DAIRAH PERUSAHAAN	300.000.000,00
29	DAIRAH PERUSAHAAN	100.000.000,00
30	DAIRAH PERUSAHAAN	100.000.000,00
31	DAIRAH PERUSAHAAN	100.000.000,00
32	DAIRAH PERUSAHAAN	100.000.000,00
33	DAIRAH PERUSAHAAN	100.000.000,00
34	DAIRAH PERUSAHAAN	1.813.400.000,00
35	DAIRAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN	1.018.000.000,00
36	DAIRAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN	540.000.000,00
37	DAIRAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN	800.000.000,00
38	DAIRAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN	0,00
39	DAIRAH PERUSAHAAN PERUSAHAAN USA DAN PERUSAHAAN	1.018.000.000,00
	Jumlah	87.749.663.540,00

**5.4.2.6. Beban Bunga-LO**

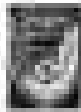
**Rp0,00**

Beban Bunga merupakan alokasi pengalokasian pemerintah daerah untuk pembiayaan bunga (interest) yang dibebankan atas kewajiban pengalokasian pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan lebih yang dibebankan pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya *default* sebagai realisasi beban bunga pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah Rp0,00.

**5.4.2.7. Beban Subsidi-LO**

**Rp15.700.000,00**

Beban Subsidi merupakan pengalokasian atas alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksinya yang dibebankan dapat terjangkau oleh masyarakat sehingga sebesar Rp15.700.000,00 dan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Penyajian Tahun 2021 sebesar Rp12.402.000,00 adalah rincian Saluran Schwab-LO adalah sebagai berikut:

**Tabel 8.88**  
**Saluran Schwab Kepada Dokter Umum MIRA Swab**  
**Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Saluran Schwab Kepada Dokter Umum MIRA Swab	18.708.000,00	62.442.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.708.000,00</b>	<b>62.442.000,00</b>

**8.4.2.8. Beban Hibah** **Rp25.758.852.844,00**

Beban Hibah – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp25.758.852.844,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp699.411.704,00 atau sebesar 2,64% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp26.458.264.548,00.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang tunai atau jasa kepada pemerintah-pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat sebagai rincian beban Hibah Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 dapat tergambar sebagai berikut:

**Tabel 8.89**  
**Beban Hibah**  
**Tahun 2022**

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	190.000.000,00	800.000.000,00
Beban Hibah kepada Badan Usaha yang bersifat khusus antara lain: hibah yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	22.225.240.500,00	18.848.888.000,00
Beban Hibah yang kepada Badan dan lembaga khusus lainnya dan badan yang telah memiliki Surat Kelengkapan Hibah	1.967.288.824,00	1.819.800.000,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Nirlaba Bersifat Sosial	15.452.078.275,00	8.853.791.400,00
Beban Hibah yang Dana Baku yang diberikan dan diberikan Hibah	3.003.212.880,00	4.832.837.500,00
Beban Hibah yang Dana Baku yang diberikan dan diberikan Hibah	434.812.500,00	787.807.400,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Pihak Luar	497.204.880,00	497.204.880,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Umum Hibah	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Pihak Kabupaten Barito Utara	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>26.758.852.844,00</b>	<b>26.458.264.548,00</b>

**8.4.2.9. Beban Bantuan Sosial** **Rp2.409.332.875,00**

Beban Bantuan Sosial – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp2.409.332.875,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp121.682.575,00 atau sebesar 5,37% dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp2.287.650.300,00. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang utamanya tidak mampu atau rentan dan sosial yang bertujuan untuk meringankan dan mengurangi terjadinya risiko sosial.



Adapun rincian Beban Bantuan Sosial sebagai berikut:

**Tabel 5.87**  
**Beban Bantuan Sosial**  
**Tahun 2022**

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Bantuan Sosial Uang yang Dirombakkan Aspek Hukum	1.281.470.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang Dirombakkan Aspek Kebijakan Masyarakat	240.150.870,00	744.803.000,00
Beban Bantuan Sosial Ruang Keluarga Masyarakat Masyarakat	0,00	1.242.787.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Dirombakkan Aspek Lembaga Non Pemerintah yang Pencapaian Pengawasan dan Bidang Lainnya	807.800.000,00	500.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah	2.469.220.870,00	2.287.589.000,00

**5.4.2.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi** **Rp175.626.504.970,36**

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atas pribadi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset selaras dengan penggunaan aset bersangkutan/bertalannya waktu dengan kata lain beban penyusutan dan amortisasi merupakan beban untuk mencatat lokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Selangh amortisasi digunakan untuk mencatat lokasi penurunan manfaat ekonomi suatu aset tak berwujud.

Untuk penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Kabupaten Barito Utara nomor 41 tentang aset tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap adalah Metode Garis Lurus (straight line method). Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut:

**Tabel 5.88**  
**Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
**Tahun 2022**

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kumulatif/Perencanaan
Beban Penyusutan Perumahan dan Monev	81.803.888.528,36	88.778.124.894,80	170.582.013.423,16
Beban Penyusutan Jembatan dan Bangunan	18.807.848.504,00	17.488.808.412,00	36.296.656.916,00
Beban Penyusutan Jalan Jembatan dan Bangunan	84.722.688.107,00	81.879.408.318,00	166.602.096.425,00
Beban Penyusutan Aset Tanah Berwujud	789.829.000,00	778.817.000,00	1.568.646.000,00
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah	175.624.264.139,36	178.954.359.624,80	354.578.624,16

**5.4.2.11. Beban Penyisihan Piutang** **Rp14.197.906,00**

Beban penyisihan piutang adalah rekening nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari memungut dan/atau keperluan lainnya setelah jatuh, adapun beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp14.197.906,00. Adapun Rincian Beban Penyisihan Piutang sebagai berikut:

**Tabel 5.89**  
**Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022**

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Kumulatif/Perencanaan
Beban Penyisihan Piutang Perseorangan	14.197.906,00	24.808.000,00	39.005.906,00
Jumlah	14.197.906,00	24.808.000,00	39.005.906,00



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI UTARA,  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**5.4.2.11. Beban Transfer**

**Rp81.276.096.461,23**

Beban Transfer-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp81.276.096.461,23 yang mengalami perubahan sebesar Rp1.480.014.422,42 dari penyajian Tahun 2021 sebesar Rp82.756.475,65.

Beban transfer tahun 2021 terdiri atas Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dan Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah. Adapun Rincian Beban Transfer sebagai berikut:

**Tabel 5.80  
Beban Transfer  
Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2021	Perubahan/Pemerkahan
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.000.745.004,31	1.000.077.240,04	667.764,27
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	848.827.000,00	790.407.000,00	58.420.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	488.000.000,00	240.000.000,00	248.000.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa	18.244.128.000,00	84.000.000,00	18.160.128.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	-
Beban Transfer Dana Desentralisasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	28.579.699.994,31	86.807.247,04	27.712.492.947,27

**5.4.2.12. Surplus/Defisit Dari Operasi-LO**

**Rp477.682.236.274,65**

Salah satu anggaran yang pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Dari perhitungan pendapatan dan beban operasional diperoleh surplus perhitungan Tahun 2022 sebesar Rp477.682.236.274,65. Adapun Rincian Surplus/Defisit dari Operasional sebagai berikut:

**Tabel 5.81  
Surplus/Defisit Dari Operasi-LO  
Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2021	Perubahan/Pemerkahan
Surplus/Defisit dari Operasi	477.682.236.274,65	143.000.000.000,00	334.682.236.274,65

**5.4.3. Pos Luar Biasa**

**Rp0,00**

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa mencakup kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadian yang tidak dapat diumukakan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian di luar kendali antara pemerintah.

Pos Luar Biasa yang disajikan dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Kutai Utara tahun 2022 merupakan beban dari program-program baru tak terduga dan perubahan dana tak terduga.

**Tabel 5.82  
Pos Luar Biasa  
Tahun 2023**

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2021	Perubahan/Pemerkahan
Pemerkahan Pos Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00
Saldo Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00



**5.4.4. Surplus/Defisit-LO**

**Rp471.654.043.631,65**

Surplus/Defisit -LO adalah pengujian untuk lebih lanjut antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kegiatan luar biasa.

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan - LO dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/ Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.83**  
**Surplus/Defisit**  
**Tahun 2022**

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Pembelajaran/Perbandingan
Surplus/Defisit Operasi	471.654.043.631,65	141.500.000.811,38	334.154.042.820,27
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	0,00	21.763.898.800,00	(21.763.898.800,00)
Surplus/Defisit Pro Lab/Biaya	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit-LO	471.654.043.631,65	141.263.898.811,38	330.390.144.820,27

**5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi pemertasaan dan pengaliran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transfer. Saldo awal kas harus ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berikutnya merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh HUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai HUD tidak termasuk sisa dana yang dikuasai oleh Bendahara Pemertasaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Pemertasaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas baik di HUD awal dengan SPID dan/atau pemertasaan daerah yang belum dicatat ke HUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah. Dimana sampai dengan akhir Tahun anggaran belum dicatat ke HUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Harau Utara TA 2022 dan TA 2021 terdiri atas:

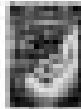
**5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

**Rp88.269.877.828,82**

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp88.269.877.828,82 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp127.323.478.281,44 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasinya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.84**  
**Arus Kas**  
**Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022**

URAIAN	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Sisa Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	127.323.478.281,44	87.387.320.178,00
Sisa Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Finansial Non Anggaran	229.304.981.898,00	(788.188.282.098,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pemertasaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Bendahara Non Anggaran	178.185.779,44	128.248.212,44
Jumlah	88.269.877.828,82	127.323.478.281,44



**PEMERINTAH KABUPATEN HARAU UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

**5.5.1.1. Arus Kas Manak Rp1.352.277.797.898,69**

Arus Kas Manak dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp1.352.277.797.898,69 merupakan pendapatan bersih dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Harau Utara tahun 2022. Sedangkan tahun 2021 sebesar Rp1.233.738.208.873,81. Arus kas Manak dari aktivitas operasi dijelaskan pada table sebagai berikut:

**Tabel 5.35**  
**Arus Kas Manak dari Aktivitas Operasi**  
**Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Manak</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	20.208.868.777,25	18.440.385.207,00
Pendapatan Retribusi Daerah	15.727.842.478,00	9.209.294.247,40
Pendapatan Hasil Pengolahan Sisa/Sampah Daerah yang ditertibkan	10.000.000.000,00	10.432.700.000,00
Pendapatan Lain-lain (PNL) yang lain	48.000.700.000,00	87.560.400.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak	178.202.148.000,00	80.702.342.100,00
Dana Bagi Hasil Sisa Hasil Pajak/DPA	240.700.000.000,00	178.987.000.000,00
Dana Hibah Lain-lain	500.000.000.000,00	107.400.000.000,00
Dana Alokasi Khusus	180.100.000.000,00	170.000.000.000,00
Dana Perimbangan	2.407.000.000,00	20.000.000.000,00
Dana Dana	77.475.000.000,00	30.470.000.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	80.000.000.000,00	40.000.000.000,00
Saluran Keuangan dari Pemerintah Pusat/Lainnya	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah (Dana Hibah)	20.110.700.000,00	20.100.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	10.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Manak</b>	<b>1.352.277.797.898,69</b>	<b>1.233.738.208.873,81</b>

**5.5.1.2. Arus Kas Keluar Rp975.448.410.468,23**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp975.448.410.468,23 terdiri dari Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran ditambah Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 diperoleh dari selisih antara Arus Kas Manak dan Arus Kas Keluar. Arus kas Keluar dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.36**  
**Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**  
**Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Belanja Pegawai	430.762.210.870,20	430.000.000.000,00
Belanja Barang	347.000.000.000,00	287.000.000.000,00
Belanja Hibah	20.100.000.000,00	20.000.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.400.000.000,00	2.200.000.000,00
Belanja Lain-lain	11.700.000,00	60.000.000,00
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Transfer Bagi Hasil Sisa Hasil Pajak	100.000.000,00	100.000.000,00
Transfer Bagi Hasil Sisa Hasil Pajak ke Provinsi dan Kabupaten/Lainnya	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Daerah Kabupaten/Lainnya	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lain-lain	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>975.448.410.468,23</b>	<b>972.340.000.000,00</b>

**5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan Rp293.383.355.839,68**

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp293.383.355.839,68 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2021

pergerakan kas bruto dalam rangka perubahan dan peliputan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa:

**Tabel 5.07**  
**Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan**  
**Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Positif		
Salah Tambah	200.000.000,00	140.000.000,00
Salah Pengeluaran dan Akumulasi	86.478.750.400,00	86.200.000.000,00
Salah Pengeluaran dan Investasi	112.322.800.000,00	75.100.000.000,00
Salah Uang Pinjam dan Laba/Rugi	112.312.017.750,00	84.743.190.000,00
Salah Akumulasi Laba/Rugi	400.412.000,00	620.000.000,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penghasilan Mula Perolehan Investasi	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Positif	200.000.000.000,00	199.164.000.000,00

**5.5.5. Arus Kas dari Aktivitas Pembelian** **Rp0,00**

Arus Kas Hasil Aktivitas Pembelian per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Aktivitas Pembelian mencerminkan pemertasaan dan pengalihan kas bruto dalam rangka Pembelian Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas Pembelian Tahun 2021 berupa pembelian Sisa Dana Cadangan ke Rekening Kas Daerah.

**5.5.5.1. Arus Kas Mula** **Rp73.335.673.753,97**

**Arus Kas Mula Aktivitas Transferts/Non Anggaran**  
**Tahun 2021 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Mula		
Pembelian Pembelian Pihak Ketiga (PK)	73.335.673.753,97	80.000.000.000,00
Salah Kas di BUD	0,00	0,00
Salah Mula Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Mula	73.335.673.753,97	80.000.000.000,00

**5.5.5.2. Arus Kas Keluar** **Rp73.335.673.753,97**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transferts/Non Anggaran pada TA 2022 sebesar Rp73.335.673.753,97

Arus Kas Hasil dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 73.335.673.753,97 adalah dari Arus Kas Mula dan Arus Kas Keluar. Kondisi SILPA Tahun 2022 sebesar Rp128.183.770,64 merupakan kas di bendahara pengalihan TA2022 pada Dana Pendidikan pada tahun 2021.

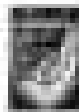
**5.5.4. Kenaikan/Penurunan Kas** **Rp80.269.877.820,82**

Dari perhitungan arus kas mula dan keluar serta aktivitas likuidasi terjadi surplus kas sebesar Rp80.269.877.820,82

**5.5.5. Saldo Awal Kas di BUD** **Rp80.000.200.316,03**

Saldo Awal kas di BUD sebesar Rp 80.000.200.316,03 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Rekening/Perolehan Kas	80.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Salah Awal Kas di BUD	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
Perolehan/Perolehan Pengalihan	0,00	0,00
Salah Kas		



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Januari 2022	Januari 2021
Saldo Awal Periode Tahun	0,00	0,00
Saldo Akhir Periode (Rp)	465.273.128.136,85	398.268.754.004,85

**5.5.2. Saldo Akhir Kas**

**Rp465.273.128.136,85**

Saldo Akhir Kas sebesar Rp 465.273.128.136,85 terdiri atas:

URAIAN	Januari 2022	Januari 2021
Rekening/Pencantolan Kas	88.268.877.405,85	117.315.458.189,44
Saldo Awal Kas di BUD	386.004.250.731,00	280.953.295.815,41
Kurasa:		
Pembayaran/Pengurangan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		
Kurasa/Pembayaran Saldo		
Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD		
- Saldo Akhir Kas di Bank	418.268.565.141,85	328.204.258.248,26
- Saldo Akhir Kas di BUKD	67.735.685.589,95	52.749.037.567,15
Saldo Akhir Kas di		
Rekening G/CR	8.214.200.000,00	8.308.240.000,00
Saldo Akhir Kas di		
Rekening Non	2.655.000,00	482.818.215,04
Saldo Akhir Kas di		
Pembayaran Penghasilan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di		
Rekening Pembiayaan	0,00	0,00
Kas Lainnya	1.375.448,00	4.228.801,00
Utang PTK (PPN 2021)	18.792.811,00	

**5.6. Laporan Perubahan Ekuitas Neraca**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.6.1. Ekuitas Awal**

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.298.568.763.782,86 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2021.

**5.6.2. Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)**

Pembayaran/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp(72.654.043.451,83).

**5.6.2.1. Dampak Konsolidasi Perubahan Kebijakan/Kondahan Modalitas**

Dampak Konsolidasi Perubahan Kebijakan/Kondahan Modalitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.6.2.1.1. Koreksi Nilai Perolehan**

Koreksi Nilai Perolehan sebesar Rp8.785.582.523,00

**5.6.2.1.2. Saldo Revaluasi Aset Tetap Rp0,00**

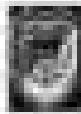
Saldo Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp0,00 karena tidak ada dijabarkan revaluasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

**5.6.2.1.3. Koreksi Ekuitas Lainnya**

Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp1.456.997.881,00

Ekuitas akhir senilai Rp1.782.263.369.821,31





**BAB VI**

**PEJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Selengkapnya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDD Pasal 14 ayat 1 dan 2 dipadukan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tahunan-kemungkinan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2021 disajikan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknik Pengalihan Keuangan Daerah. Namun demikian penyajian yang diperlukan atas pos-pos dalam laporan keuangan yang meliputi LRA, LD, LPI, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Arus Kas telah dilakukan dalam rangka penyajiannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Barito Utara. Beberapa informasi berkenaan dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara:

**Identifikasi Entitas**

Pemerintah Kabupaten Barito Utara beridentitas J. Jend. A. Yani No. 76, Tabagon (0219) 21120-245546, Telepon: (0219) 22432 Merau, Teweh-73811, Website: [www.kabupatenbarito-utara.go.id](http://www.kabupatenbarito-utara.go.id) Email: [web@kabupatenbarito-utara.go.id](mailto:web@kabupatenbarito-utara.go.id)

**Misi Operasional Entitas dan Kegiatan Pokoknya**

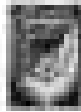
Tugas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara adalah menyusun program kegiatan sesuai rencana dan kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJ) Kabupaten Barito Utara serta visi dan misi Bupati Barito Utara untuk peningkatan pembangunan di segala bidang.

**Kerangka Perundang-Undangan Sebagai Landasan Operasional**

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
4. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjelasan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019.
5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjelasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Bendahara Umum Daerah**

Bupati	H.Nurhidayah
Wakil Bupati	Sugianto Pando Perm. S.H.
Sekretaris Daerah	Drs. Muklis
Bendahara Umum	Drs. Juhanaayah, M.A.P.



### **Visi dan Misi Bupati Barito Utara**

#### **Visi**

Terselenggaranya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkelanjutan Menuju Kabupaten Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera.

#### **Misi**

Membelajarkan Pada Percepatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Serta Mengembangkan BUMD yang Berbasis Keunggulan Lokal. Mendukung Laju Investasi Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Serta Pembangunan Memperhatikan Kelestarian Ruang.

Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan Peningkatan Lapangan Kerja dalam Rangka Penguatan Kemiskinan.

Mengembangkan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam (Pertambangan, Kehutanan, Perikanan dan Pertanian), Serta Potensi Lainnya ke Arah Yang Lebih Baik Secara Terintegrasi dan Lestari. Dari Kapasitas Konsumen Rakyat Sesuai Skala Prioritas Berbasis Daya Penguatan Sosial Terutama Kabupaten Lokal dan Nasional.

Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan serta Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang Menempatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Tepatnya Tempat yang Benar.

Membantu Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Budaya Kearifan Lokal, Tolakanti Korupsi, Kerukunan Antar Umat Beragama, Suku, Rasa, rasapen Golongan.

### **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Aspek dan Jenis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektori, Badan dan Dinas serta 9 Kantor Kecamatan.

### **Lembaga Vertikal**

Disamping berbagai perangkat daerah diatas maka dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara seperti di bidang peningkatan budaya, kesehatan, ketahanan, pendidikan, perlindungan, agama dan lain-lain terdapat instansi vertikal yang menunjang hal tersebut yaitu:

1. Kepolisian Resort Barito Utara
2. Pengadilan Negeri Muara Teweh
3. Kodim 1013 Muara Teweh
4. KPPN
5. Kejaksaan Negeri Muara Teweh
6. Pengadilan Agama Muara Teweh
7. Badan Pusat Statistik
8. Kantor Kementerian Agama Kab. Barito Utara
9. Badan Pertanahan Nasional Kab. Barito Utara
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh
11. Sekretariat KPU Kab. Barito Utara
12. BPJH Kesehatan Muara Teweh

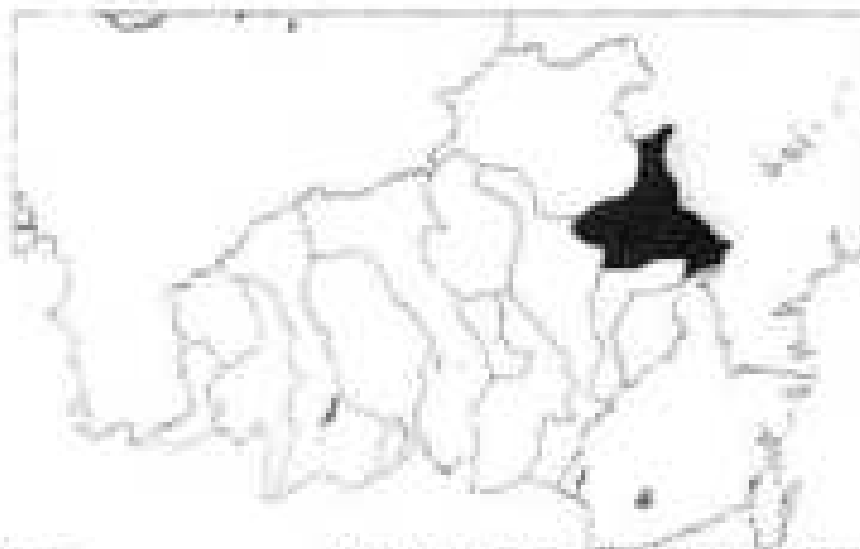


### **Lembaga Keuangan dan Perbankan**

Daftar dari Lembaga Keuangan dan Perbankan di Kab. Bukit Utara

1. Bank Syariah Mandiri
2. Bank Mega
3. Bank Nasional Indonesia 1948 Cabang Terwah
4. Bank Danamon Cabang Muara Terwah
5. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Muara Terwah
6. Bank Rakyat Indonesia Cabang Muara Terwah
7. Bank Mandiri Cabang Muara Terwah
8. Bank Syariah

### **Profil Kabupaten Bukit Utara**



Sambayan	: Iya Matak Bontang Teras (Pantang Masyarah Sebelan Bontok)
Peta lokasi	: Koordinat: 114° 27' 00" – 115° 40' 00" Bujur Tinggi dan 0° 58' 30" Lintang Utara – 1° 26' 00" Lintang Selatan
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Daerah	: Muara Terwah
Regent	: H. Nurdiazah
DAD	: 875.180.280.000
Luas	: 8.300km <sup>2</sup>
Total Populasi	: 123.781 jiwa (2010)
Kepadatan	: 14,81 jiwa/km <sup>2</sup>
Kode area telepon	: 0118
Kelembagaan	: 9 (sambutan)
Website	: <a href="http://www.bukituntara.go.id/">http://www.bukituntara.go.id/</a>

Perintah (a) adalah daftar nama-nama yang pernah memimpin Kabupaten Bukit Utara sejak tahun 1951:

1. George Chua(1951-1954)
2. Harnanto Baboo (1954-1956)
3. M. Saleh(1956)



4. Saperer Huter (1956-1957)
5. M. Darban (1958-1959)
6. Sami Siani (1959-1966)
7. H. Abdul Muhsin (1966-1969)
8. Yeto Simang (1969-1977)
9. Drs. E. Husang (1977-1988)
10. Drs. H.A. Dj. Nisip (1988-1998)
11. Dr. H. Endarsihita (1998-2003)
12. Dr. H. Achmad Yuliansyah, M.M. (2003-2008, 2008-2013)
13. H. Nuhaleyah (2013-2018)



**BAB VI  
PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara disusun untuk memonitor kualitas selanjutnya dilaksanakan oleh Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan sebagai tindakan yang dituntut oleh adanya pelaksanaan selama satu periode pelaksanaan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitasnya dalam membuat keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dasar, dan modal.

Peningkatan kualitas pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan menyelenggarakan Berbagai Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PPK SKPD, Penyusunan Perencanaan dan Desentralisasi Pengeluaran, melalui kemampuan kapabilitas pegawai yang berkorelasi untuk meningkatkan profesional dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan insentifnya baik langsung maupun tidak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Berikutnya guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional sehingga diharapkan akan meningkatkan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat dipertahankan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan berusaha melakukan perbaikan baik pemerintahan pengelolaan keuangan maupun sistem pengendalian intern. Harapannya dengan Rencana Aksi dan dukungan seluruh aparatur pemerintahan dapat mencapai komitmen bersama untuk mendukung dipertahankannya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021.

**MUPATI BARITO UTARA,**



**NABALSYAH**